

**TINGKAT KESIAPAN SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI
PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
DI KELAS IV B SD NEGERI 1 TIRENGGO
BANTUL YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh
Fahad Nisa Utami
NIM 12108241088

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
JURUSAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
JANUARI 2017**

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “TINGKAT KESIAPAN SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUSDI KELAS IV B SD NEGERI 1 TRIRENGGO BANTUL YOGYAKARTA” yang disusun oleh Fahad Nisa Utami, NIM 12108241088 ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.



Yogyakarta, 19 Desember 2016
Pembimbing,

Agung Hastomo, M.Pd.
NIP. 19800811 200604 1 002

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Tanda tangan dosen penguji yang tertera dalam halaman pengesahan adalah asli. Jika tidak asli, saya siap menerima sanksi ditunda yudisium pada periode berikutnya.

Yogyakarta, 19 Desember 2016

Yang menyatakan,



Fahad Nisa Utami

NIM 12108241088

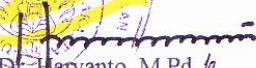
PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “TINGKAT KESIAPAN SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KELAS IV B SD NEGERI 1 TIRENGGO BANTUL YOGYAKARTA” yang disusun oleh Fahad Nisa Utami, NIM 12108241088 ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 4 Januari 2017 dan dinyatakan lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Agung Hastomo, M.Pd.	Ketua Penguji		11/01-17
Dwi Yunairifi, M.Si.	Sekretaris Penguji		13/01-17
Dr. Mumpuniarti, M.Pd.	Penguji Utama		12/01-17

19 JAN 2017
Yogyakarta,
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan


Dr. Maryanto, M.Pd.
NIP. 19600902 198702 1 001

MOTTO

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang beriman.”

(Q. S Ali Imran: 139)

Setiap murid dapat belajar, hanya saja tidak pada hari yang sama atau cara yang sama.

(George Evans)

*Karena hidup bukan mie instan,
yang kau tinggal tuang lalu terkabul harapan.*

(Dari Sabayota)

PERSEMBAHAN

Seiring rasa syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat-Nya, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibuku tercinta yang selalu mendukung, memberikan motivasi, dan melantunkan doa di setiap shalatnya.
2. Almamaterku.
3. Agama, Nusa, dan Bangsa.

**TINGKAT KESIAPAN SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI
PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
DI KELAS IV B SD NEGERI 1 TRIRENGGO
BANTUL YOGYAKARTA**

Oleh
Fahad Nisa Utami
NIM 12108241088

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan sekolah dalam implementasi pendidikan anak berkebutuhan khusus di kelas IV B SD Negeri 1 Trirenggo Bantul Yogyakarta yang meliputi: kurikulum, tenaga pendidik, sarana-prasarana, dan lingkungan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru kelas, GPK dan siswa kelas IV B, dengan pertimbangan individu yang terlibat secara langsung dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan langkah-langkah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi metode dan sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di SD Negeri 1 Trirenggo pada aspek kurikulum, belum semua proses pengembangan PPI diikuti, yaitu untuk pertemuan tim rujukan dan juga pertemuan tim asesmen; tim pengembang PPI dan pengembangan PPI juga belum dapat dilakukan; modifikasi kurikulum dan inti materi, pengaturan pemberian layanan, perencanaan waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi sudah dilakukan meskipun belum sempurna, sedangkan untuk format PPI, sekolah telah memiliki format tersebut. Pada aspek tenaga pendidik, berdasarkan empat kompetensi teknis guru yang harus dicapai, baru dua kompetensi yang telah dilakukan oleh guru, serta terdapat dua kompetensi kolaboratif yang haruslah dilakukan, namun baru satu kompetensi kolaboratif yang dapat dilakukan. Pada aspek sarana dan prasarana, meskipun sarana prasarana yang ada belum bisa sesuai dengan standar yang seharusnya ada, namun sarana dan prasarana yang ada sudah dapat menunjang kebutuhan siswa; sekolah juga telah melakukan pengelolaan sarana dan prasarana khusus. Pada aspek lingkungan masyarakat, semua indikator telah dilaksanakan, namun pengiriman hasil belajar akan lebih maksimal bila tidak hanya dilakukan satu bulan satu kali.

Kata kunci: *tingkat kesiapan sekolah, pendidikan inklusi, ABK*

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Tingkat Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Kelas IV B SD Negeri 1 Tlirenggo Bantul Yogyakarta”.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A, yang telah memberikan kebijakan untuk menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Dr. Haryanto, M.Pd yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Pendidikan Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Drs. Suparlan, M.Pd. I, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memaparkan gagasan dalam bentuk skripsi.
4. Pembimbing Skripsi Bapak Agung Hastomo, M.Pd yang dengan penuh kesabaran dan perhatian telah membimbing peneliti sampai penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik.

5. Kepala SD Negeri 1 Tlrenggo Bantul Yogyakarta Ibu Istiani Nurhasanah, M.Pd., yang telah memberikan ijin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di SD Negeri 1 Tlrenggo Bantul Yogyakarta.
6. Guru yang mengampu di IV B SD Negeri 1 Tlrenggo Bantul Yogyakarta, yang telah bersedia sebagai subjek dalam pelaksanaan penelitian.
7. Segenap staff dan siswa kelas IV B SD Negeri 1 Tlrenggo Bantul Yogyakarta yang telah banyak membantu selama proses penyusunan skripsi.
8. Orang tuaku, Bapak Budi Sanyata dan Ibu Riyanti serta keluarga tercinta di rumah yang selalu mendukung, memberikan motivasi dan mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan penelitian ini.

Semoga segala bantuan, dukungan, dan pengorbanan yang telah diberikan kepada peneliti menjadi amal yang dapat diterima dan mendapat balasan dari Allah SWT. Peneliti juga berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 19 Desember 2016
Penulis



Fahad Nisa Utami
NIM 12108241088

DAFTAR ISI

	hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Fokus Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfa’at Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Hakikat Kesiapan Sekolah	11
1. Pengertian Kesiapan	11
2. Kesiapan Sekolah.....	11
B. Konsep Dasar Program Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi	21
1. Pendidikan Inklusi	21
2. Perbedaan Pendidikan Segregasi, Pendidikan Terpadu dan Pendidikan Inklusi	24
3. Anak Berkebutuhan Khusus	27
4. Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus	28

C. Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Anak	31
Berkebutuhan Khusus.....	31
1. Kesiapan Sekolah dalam Aspek Kurikulum	35
2. Kesiapan Sekolah dalam Aspek Peserta Didik	39
3. Kesiapan Sekolah dalam Aspek Tenaga Pendidik	39
4. Kesiapan Sekolah dalam Aspek Sarana Prasarana	43
5. Kesiapan Sekolah dalam Aspek Pendanaan	53
6. Kesiapan Sekolah dalam Aspek Manajemen Sekolah	55
7. Kesiapan Sekolah dalam Aspek Lingkungan Masyarakat	56
8. Kesiapan Sekolah dalam Aspek Proses Belajar Mengajar	59
D. Indikator Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Anak	61
Berkebutuhan Khusus	61
E. Kerangka Berpikir	63
F. Pertanyaan Penelitian	64
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Pendekatan Penelitian.....	66
B. Setting Penelitian	67
C. Objek dan Subjek Penelitian	67
D. Teknik Pengumpulan Data	68
E. Instrumen Penelitian	71
F. Teknik Analisis Data	74
G. Pengujian Keabsahan Data	76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	78
1. Lokasi Sekolah	78
2. Visi, Misi dan Tujuan SD Negeri 1 Tirirenggo	79
B. Deskripsi Subjek dan Obyek Penelitian	82
1. Subjek Penelitian	82
2. Obyek Penelitian	82
C. Deskripsi Data	82
1. Gambaran Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan	
Anak Berkebutuhan Khusus di Kelas IV B Berdasarkan Aspek	

Kurikulum	82
2. Gambaran Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Kelas IV B Berdasarkan Aspek Tenaga Pendidik	95
3. Gambaran Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Kelas IV B Berdasarkan Aspek Sarana dan Prasarana	105
4. Gambaran Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Kelas IV B Berdasarkan Aspek Lingkungan Masyarakat	116
D. Pembahasan	127
1. Tingkat Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Kelas IV B Berdasarkan Aspek Kurikulum.....	127
2. Tingkat Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Kelas IV B Berdasarkan Aspek Tenaga Pendidik	135
3. Tingkat Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Kelas IV B Berdasarkan Aspek Sarana dan Prasarana	138
4. Tingkat Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Kelas IV B Berdasarkan Aspek Lingkungan . Masyarakat.....	141
E. Keterbatasan Penelitian	146
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran	148
Daftar Pustaka	150
Lampiran	153

DAFTAR TABEL

	hal
Tabel 2.1 Komponen Kesiapan Sekolah dalam Implementasi..... Pendidikan ABK.....	62
Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	73

DAFTAR GAMBAR

	hal
Gambar 1. Komponen Pendidikan Inklusi.....	31
Gambar 2. Komponen dalam Analisis Data (<i>Interactive Model</i>)	72
Gambar 3. Hasil Asesmen Mandiri ABK	85
Gambar 4. Pertemuan Guru dengan Wali Murid.....	103
Gambar 5. Toilet Khusus ABK	109
Gambar 6. Alat Terapi Jalan untuk ABK	110
Gambar 7. <i>Hand Dreel</i> /Alat Bantu Jalan.....	110
Gambar 8. Media Melatik Motorik Halus	110
Gambar 9. Dokumen Data Media untuk Melatih Motorik Halus	111
Gambar 10. Bupati Bantul Meresmikan SD N 1 Tlirenggo sebagai Sekolah Inklusi	113
Gambar 11. Notulen Hasil Pertemuan dengan Orang Tua	118
Gambar 12. Orang Tua Menunggu Langsung Anaknya di Kelas	123
Gambar 13. Orang Tua Menghadiri Rapat Rutin di Sekolah.....	124
Gambar 14. Tim Ahli yang Datang Mengisi Pertemuan dengan Orang Tua Siswa.....	126
Gambar 15. Surat Ucapan Terimakasih untuk Narasumber	126

DAFTAR LAMPIRAN

	hal
Lampiran 1 Lembar Observasi Lingkungan Fisik/Non Fisik Sekolah	154
Lampiran 2 Lembar Observasi Kompetensi Guru dalam Proses Pembelajaran	155
Lampiran 3 Lembar Dokumentasi	156
Lampiran 4 Lembar Wawancara Kepala Sekolah dan Guru.....	157
Lampiran 5 Lembar Wawancara dengan Siswa.....	160
Lampiran 6 Hasil Observasi Lingkungan Fisik/ Non Fisik	161
Lampiran 7 Hasil Observasi Kompetensi Guru dalam Proses Pembelajaran	163
Lampiran 8 Hasil Dokumentasi	177
Lampiran 9 Hasil Wawancara dan reduksi data dengan Kepala..... Sekolah dan guru kelas	179
Lampiran 10 Hasil Wawancara dan reduksi data hasil wawancara dengan Siswa	207
Lampiran 11 Reduksi, Penyajian Data dan Kesimpulan Hasil Observasi Kompetensi Guru dalam Pembelajaran	210
Lampiran 12 Triangulasi Data	216
Lampiran 13 Dokumentasi	224

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu hak dasar yang dapat diperoleh oleh seluruh warga negara. Hal ini tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab IV pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Berdasarkan undang-undang tersebut, tak terkecuali warga negara yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, sosial, maupun intelektual pun juga berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama.

Dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan Inklusif, dijelaskan bahwa kebijakan pendidikan inklusif merupakan, kebijakan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan bersama dengan peserta didik pada umumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan inklusif sebagai suatu sistem yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus (ABK) mendapatkan layanan dalam sekolah terdekat dengan lingkungan tempat tinggalnya.

Dalam Jambore Nasional Anak Berkebutuhan Khusus Jenjang Pendidikan Dasar tahun 2013, Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Hamid Muhammad menjelaskan bahwa saat ini terdapat 330.000 anak berkebutuhan khusus tingkat pendidikan dasar. Namun dari jumlah itu yang mengenyam

pendidikan sebanyak 116.000 anak. "Jadi masih ada 65% anak berkebutuhan khusus yang belum terlayani pendidikan. Untuk menyukseskan wajib belajar sembilan tahun, pemerintah akan menyiapkan layanan pendidikan melalui SLB dan sekolah inklusif. Akan tetapi, masih ada 100 lebih kabupaten yang belum mempunyai SLB, sehingga ini memberikan kesempatan kepada sekolah reguler mau menjadi sekolah inklusif. Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk sekolah inklusif menyediakan pendidikan yang lebih layak untuk anak berkebutuhan khusus tanpa harus mengenyam pendidikan di SLB. (PKLK, 2013)

Terselenggaranya pendidikan inklusif merupakan suatu kebijakan dari pemerintah agar seluruh warga negara, termasuk anak berkebutuhan khusus dapat merasakan pemerataan pendidikan. Sekolah inklusif berusaha untuk mengatasi masalah pemerataan kesempatan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus supaya bisa belajar di sekolah reguler. Sebagai pembaharuan pendidikan, pendidikan inklusif lahir karena banyaknya anak berkebutuhan khusus yang semakin bertambah dan akses pendidikannya terbatas, karena lokasi SLB pada umumnya berada di Ibu Kota Kabupaten. Padahal anak-anak berkebutuhan khusus tersebar tidak hanya di Ibu Kota Kabupaten tetapi hampir di seluruh daerah (kecamatan/desa). Akibatnya, sebagian anak berkebutuhan khusus, karena faktor ekonomi terpaksa tidak disekolahkan oleh orang tuanya karena lokasi SLB jauh dari rumah, sedangkan SD terdekat tidak bisa menerima karena merasa tidak mampu melayaninya. Sebagian yang lain, mungkin selama ini dapat diterima di SD

terdekat, namun karena ketiadaan pelayanan khusus bagi mereka, akibatnya mereka kurang dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki secara optimal (Direktorat PLB, 2007: i).

Selain disebabkan tidak meratanya SLB yang ada saat ini, menurut Subagya (2010:2) pembelajaran dengan sistem segregasi di SLB tidak banyak memberi kesempatan pengembangan sosialitas pada anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka yang telah tamatpun tetap tidak mudah diterima oleh masyarakat. Dengan adanya sekolah inklusi, akan menjadi strategi perlindungan hak asasi di bidang perolehan layanan pendidikan bagi setiap warganegara tanpa kecuali termasuk ABK, sehingga dengan adanya sekolah inklusi dapat menjadi langkah awal diterimanya ABK bersosialisasi dengan anak normal pada umumnya.

Adanya model pendidikan inklusi juga merupakan suatu wadah untuk mencapai ketuntasan wajib belajar sembilan tahun. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih saja banyak fakta yang menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi tersebut. Seperti hasil penelitian Ishartiwi pada tahun 2009 yang dilakukan di Yogyakarta. Dari penelitian tersebut diungkapkan beberapa permasalahan, antara lain: (1) masih ada kesulitan menyelaraskan antara standar layanan persekolahan reguler yang selama ini berjalan dan variasi kebutuhan belajar ABK; (2) sekolah inklusi belum menerima siswa ABK; (3) sekolah belum mampu menyediakan program yang tepat, bagi ABK dengan kondisi kecerdasan di bawah rata-rata (tunagrahita); (4) belum ada sistem evaluasi hasil belajar (baik formatif dan

sumatif) yang tepat sesuai kebutuhan ABK; (5) kurangnya sarana dan sumber belajar asesabilitas untuk mengakomodasi kebutuhan mobilitas dan belajar ABK; (6) belum semua guru reguler memiliki kompetensi memberikan layanan ABK dan masih guru khusus di sekolah inklusi, meskipun bukan suatu keharusan (indentik) antara memiliki kesepahaman tentang pendidikan inklusi dan layanan ABK; (8) masih adanya anggapan keberadaan ABK akan mempengaruhi ketuntasan hasil belajar akhir tahun, akibatnya ABK dipindahkan di SLB menjelang ujian; (9) layanan inklusi masih belum menyatu dalam sistem dan iklim sekolah, sehingga ada dua label siswa ABK dan reguler; (10) belum semua pengambil kebijakan termasuk bidang pendidikan memahami tentang sistem inklusi; (11) secara pengelolaan pelaksanaan pendidikan inklusi kurang dipersiapkan dengan komprehensif, dan (12) belum optimalnya penyediaan bahan ajar sesuai kebutuhan ABK (Ishartiwi, 2010:2).

Masalah kesiapan sekolah dalam pengimplementasian pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus juga telah dibahas oleh Praptiningrum. Dari hasil penelitian yang dilakukan Praptiningrum (2010:35), terdapat beberapa kasus yang dikemukakannya, antara lain: minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusif; terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru; kurikulum pendidikan umum yang digunakan belum mengakomodasi keberadaan anak berkebutuhan khusus sehingga nampaknya program penyelenggaraan pendidikan inklusif hanya terkesan program eksperimental.

Beberapa masalah yang serupa pun juga tidak jauh berbeda dengan penyelenggaraan pendidikan ABK di Kabupaten Bantul. Seperti yang telah dimuat dalam Harian Jogja (10/4/2015), Kabupaten Bantul sampai saat ini sama sekali belum memiliki tenaga pendidik untuk sekolah inklusi. Kepala Dinas Pendidikan Dasar (Disdikdas) Bantul, Totok Sudarto mengatakan, bahwa selama ini masih mendapat pinjaman tenaga pendidik dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY. Padahal Bantul membutuhkan 33 tenaga pendidik untuk sekolah inklusi.

Dari data dinas pendidikan sekolah dasar Kabupaten Bantul, Penyelenggaraan pendidikan anak berkebutuhan khusus tingkat sekolah dasar telah diselenggarakan oleh 58 sekolah dasar. Tapi belum kesemua sekolah memiliki tingkat kesiapan yang baik seperti standar yang telah ditetapkan dalam pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusi. Di Kabupaten Bantul sendiri, saat ini terdapat 741 anak berkebutuhan khusus yang telah terdaftar di dinas pendidikan Bantul. Salah satu sekolah dasar yang telah diberi wewenang untuk menjadi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI) di Kabupaten Bantul adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Trirenggo yang beralamat di Klembo, Trirenggo, Bantul. Sejak tahun 2014 SD Negeri 1 Trirenggo mendapatkan SK langsung dari dinas Bantul untuk menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi.

SD 1 Trirenggo merupakan sekolah dasar *re-grouping* dari SD Klembo dan SD Tanubayan, setelah gempa Yogyakarta tahun 2007 lalu. Sebelum mengalami *re-grouping*, SD Tanubayan sudah menjadi sekolah penyelenggara

pendidikan inklusi (SPPI). Setelah kedua SD tersebut mengalami *regrouping*, ABK yang dulu bersekolah di SD Tanubayan pun juga ikut berpindah ke SD 1 Tirenggo. Akan tetapi hal ini mengakibatkan banyak wali murid dari siswa yang menjadi enggan untuk menyekolahkan anak mereka bersama ABK yang ada, hingga banyak orang tua yang memindahkan anak mereka dari SD tersebut. Tahun 2014 SD tersebut melakukan kerjasama dengan jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) UNY untuk menjadi sekolah model berbasis pendidikan inklusi. Pada tahun pelajaran 2015/2016 ini, terdapat kurang lebih 40 siswa ABK, mulai dari tuna grahita, tuna netra, dan tuna rungu, tapi baru 26 siswa yang mendapatkan *assesment* langsung dari PLB UNY.

SD 1 Tirenggo, saat ini memiliki 1 Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang diperbantukan dari dinas, akan tetapi GPK tersebut hanya akan berada di sekolah tersebut selama 2 hari setiap minggunya, selebihnya akan berada di sekolah lain. Hal ini mengakibatkan kurangnya bimbingan yang seharusnya diberikan kepada siswa berkebutuhan khusus. Terlebih lagi untuk siswa di kelas IV B. Di kelas tersebut terdapat beberapa anak yang mengalami kelainan dan membutuhkan perhatian khusus, diantaranya adalah anak yang mengalami tuna daksa, dan anak autis. Selain hal tersebut, saat ini sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran terutama untuk ABK juga belum maksimal, karena masih disamakan dengan sarana-prasarana untuk siswa normal dalam pembelajaran yang berlangsung. Saat proses pembelajaran berlangsung, guru kelas pun masih menggunakan kurikulum terpadu, sehingga kebutuhan ABK yang ada kurang terwadahi secara maksimal.

Dijelaskan pada pasal 5 Kepmendiknas No. 70 Tahun 2009 yakni penerimaan peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada satuan pendidikan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah. Sehingga, dengan terpilihnya suatu sekolah sebagai sekolah penyelenggara layanan inklusi, sekolah tersebut seharusnya telah memiliki kesiapan sesuai SPN (Standar Nasional Pendidikan).

Pasal 1 ayat 1 PP No. 19 Tahun 2005 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan SNP ialah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pasal 2 (dua) menjabarkan mengenai lingkup SNP yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut, manajemen dan kesiapan penyelenggaraan pendidikan suatu sekolah akan efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah, kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa, kemampuan dan tanggung jawab tenaga kependidikan yang handal, sarana prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, dana yang cukup untuk menggaji staf sesuai dengan fungsinya, serta partisipasi masyarakat yang tinggi. Apabila salah satu hal di atas tidak sesuai dengan yang diharapkan dan/atau tidak berfungsi

sebagaimana mestinya, maka tingkat kesiapan penyelenggaraan pendidikan menjadi kurang optimal.

Berangkat dari fenomena yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Tingkat Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di kelas IV B SD 1 Tirirenggo Bantul”. Dalam hal ini kesiapan sekolah dilihat dari aspek kurikulum, tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat/lingkungan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan seperti di bawah ini.

1. Permasalahan kurikulum: belum semua anak yang teridentifikasi merupakan ABK mendapatkan *assesmen* dari pihak sekolah.
2. Permasalahan tenaga pendidik: belum maksimalnya fungsi GPK yang ada.
3. Permasalahan sarana dan prasarana: kurangnya sarana-prasarana khusus untuk memfasilitasi ABK.
4. Permasalahan lingkungan masyarakat: banyak orang tua yang masih enggan menyekolahkan anaknya di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi.

C. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi tingkat kesiapan sekolah dalam

penyelenggaraan pendidikan anak berkebutuhan khusus di kelas IV B SD Negeri 1 Trirenggo, Bantul, pada aspek kurikulum; tenaga pendidik; sarana-prasaran; dan lingkungan masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian pada penelitian ini yaitu: Bagaimana tingkat kesiapan sekolah dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus di kelas IV B SD Negeri 1 Trirenggo Bantul pada aspek kurikulum, tenaga pendidik, sarana - prasaran dan lingkungan masyarakat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesiapan penyelenggaraan pendidikan anak berkebutuhan khusus di kelas IV B SD Negeri 1 Trirenggo Bantul yang diantaranya meliputi: kurikulum, tenaga pendidik, sarana- prasarana, dan lingkungan masyarakat.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini bermanfaat sebagai masukan terkait dengan tingkat kesiapan sekolah dalam penyelenggara pendidikan anak berkebutuhan khusus untuk memperkaya referensi terutama yang terkait dengan penelitian tentang program sekolah inklusi.

2. Bagi Sekolah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan, dan referensi dalam meningkatkan kesiapan penyelenggara pendidikan anak berkebutuhan khusus, yang nantinya dapat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi sesuai dengan tujuan pendidikan nasional khususnya pendidikan inklusi di Indonesia.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Hakikat Kesiapan Sekolah

1. Pengertian Kesiapan

Slameto (2010:113) mengartikan kesiapan sebagai keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Menurut Dalyono (2005: 52) juga mengartikan kesiapan adalah kemampuan yang cukup baik fisik dan mental. Kesiapan fisik berarti tenaga yang cukup dan kesehatan yang baik, sementara kesiapan mental berarti memiliki minat dan motivasi yang cukup untuk melakukan suatu kegiatan. Sedangkan Cronbach (dalam Dalyono, 2005:52) memberikan pengertian kesiapan sebagai segenap sifat atau kekuatan yang membuat dapat bereaksi dengan cara tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kesiapan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu kegiatan sebagai respon terhadap suatu situasi yang baru.

2. Kesiapan Sekolah

Sekolah merupakan salah satu tempat yang digunakan para siswa untuk menuntut ilmu. Kenyataan yang ada pada saat ini, banyak orang tua dan masyarakat yang mempercayakan sekolah sebagai tempat untuk belajar, berlatih kecakapan, menyerap pendidikan, atau melakukan proses pendewasaan dari yang awalnya belum tahu menjadi tahu. Pun juga

dengan pemerintah, sesuai dengan pasal 31 UUD 1945, pemerintah juga mempercayakan sekolah untuk mewujudkan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan.

Melalui PP No. 19 Tahun 2005, pemerintah telah mengatur mengenai Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang bertujuan agar sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat lebih terarah serta tetap terjamin mutu dan kualitasnya. Pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan SNP ialah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beracuan dari SNP tersebut, pemerintah kemudian mengikuti Permendiknas No. 29 Tahun 2005 membentuk suatu Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) sebagai badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan formal di seluruh wilayah Indonesia. BAN-S/M tersebut kemudian akan melakukan akreditasi untuk menilai kesiapan sekolah pada delapan aspek, antara lain:

a. Standar Isi (Permendiknas No. 22 Tahun 2006)

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

b. Standar Kompetensi Lulusan (Permendiknas No. 26 Tahun 2006)

Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

- c. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Permendiknas No. 13 Tahun 2007 Tentang Kompetensi Kepala Sekolah, Permendiknas No. 16 Tahun 2007 Tentang Kompetensi Guru, Permendiknas No. 24 Tahun 2008 Tentang Kompetensi Tenaga Administrasi)

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

- d. Standar Pengelolaan (Permendiknas No. 19 Tahun 2007)

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

- e. Standar Penilaian (Permendiknas No. 20 Tahun 2007)

Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

- f. Standar Sarana dan Prasarana (Permendiknas No. 24 Tahun 2007)

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel

kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

g. Standar Proses (Permendiknas No. 41 Tahun 2007)

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

h. Standar Pembiayaan (Permendiknas No. 48 Tahun 2008)

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. (PP No. 19 Tahun 2005, Pasal 1 Butir 4-11).

Berdasarkan SNP tersebut, dapat disimpulkan bahwa sekolah dapat dikatakan siap apabila telah memenuhi kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang meliputi standar isi, standar kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan, standar sarana-prasarana, standar pembiayaan, standar pengelolaan, standar penilaian, serta standar proses. Dibawah ini akan dijelaskan masing-masing komponen yang penting disiapkan oleh sekolah, sehingga dapat dikatakan siap sesuai dengan peraturan pemerintah.

1) Kurikulum

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) pada pasal 1 butir 19 menyebutkan bahwa Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Di Indonesia, kurikulum yang berlaku saat ini adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), dengan beberapa sekolah ditunjuk untuk melakukan uji coba kurikulum 2013. Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut: (1) Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya; (2) beragam dan terpadu; (3) tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (4) relevan dengan kebutuhan kehidupan; (5) menyeluruh dan berkesinambungan; (6) belajar sepanjang hayat, dan (7) seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah (Permen No 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi).

2) Tenaga Kependidikan

Pada aspek ini yang dimaksud dengan tenaga kependidikan terdiri dari pendidik, Kepala Sekolah, dan tenaga administrasi. Dijelaskan dalam PP No 19 Tahun 2005 bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen

pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (pasal 28 ayat 1).

Dijelaskan dalam ayat selanjutnya, yang dimaksud dengan kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Sedangkan menurut Usman, yang dimaksud dengan kompetensi adalah kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya (2011:14).

Selanjutnya Rusman (2012:38) menjelaskan macam-macam kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru atau pendidik adalah sebagai berikut: (a) kompetensi pedagogik, ialah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya; (b) kompetensi kepribadian, adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia; (c) Kompetensi sosial, adalah kemampuan seorang guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, dan tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar; (d) kompetensi profesional. Adalah

kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan terintegrasikannya konten pembelajaran dengan penggunaan TIK dan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SPN).

Selanjutnya, untuk menjadi kepala SD/MI dijelaskan dalam PP No 19 Tahun 2005 bahwa kriteria minimal haruslah berstatus sebagai guru SD/MI; memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan (pasal 38 ayat 2).

3) Sarana-prasarana

Pasal 42 butir pertama dan kedua pada PP No 19 Tahun 2005 menjelaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Sedangkan prasarana yang wajib dimiliki oleh sekolah meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga,

tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

4) Manajemen

Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Tanpa manajemen, tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif dan efisien. Manajemen sekolah memberikan kewenangan pada Kepala Sekolah dan guru dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur serta memimpin sumber-sumber insani serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah.

Menurut Mulyasa (2009:20) terdapat empat macam fungsi pokok manajemen, yaitu:

a) Perencanaan

Merupakan proses sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan, sebagai pedoman kerja.

b) Pelaksanaan

Kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

c) Pengawasan

Upaya untuk mengamati secara sistematis dan berkesinambungan; merekam; memberi penjelasan, petunjuk, pembinaan dan meluruskan berbagai hal yang kurang tepat; serta memperbaiki kesalahan.

d) Pembinaan

Upaya pengendalian secara profesional semua unsur organisasi agar berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana.

5) Dana

Pendanaan pendidikan diatur dalam Permen Nomor 48 Tahun 2008 menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Biaya pendidikan dijelaskan pada pasal 3 (tiga) meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik.

6) Proses Belajar-mengajar

Menurut Nana Sudjana (2005:29), diperlukan suatu keterpaduan antara proses belajar siswa dengan proses mengajar guru sehingga terjadi interaksi belajar-mengajar (proses pengajaran). Dalam pengajaran tersebut, proses tersebut tidak dapat datang begitu saja tanpa adanya pengaturan dan perencanaan. Pengaturan diperlukan dalam menentukan komponen dan variabel yang harus ada dalam pengajaran tersebut dan perencanaan dimaksudkan untuk

merumuskan dan menetapkan interelasi sejumlah komponen dan variabel sehingga memungkinkan terselenggaranya pengajaran yang efektif.

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain ketentuan tersebut dalam proses pembelajaran pendidik juga harus mampu memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan mampu melakukan perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Berdasarkan penjelasan di atas, sekolah dapat dikatakan siap apabila telah memenuhi kriteria minimal tentang sistem pendidikan di Indonesia, yang meliputi standar ini, standar kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan, standar sarana-prasarana, standar pembiayaan, standar pengelolaan, standar penilaian dan standar proses.

B. Konsep Dasar Program Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi

1. Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusi merupakan perkembangan terkini dari model pendidikan bagi anak berkelainan yang secara formal kemudian ditegaskan dalam pernyataan Salamanca pada Konferensi Dunia tentang Pendidikan Berkelainan bulan Juni 1994 bahwa, Prinsip mendasar dari pendidikan inklusi adalah: selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka (Suyanto & Mudjito, 2014:33).

Dalam sistem pendidikan saat ini, siswa dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu siswa normal dan berkelainan. Sebagai konsekuensinya, siswa normal akan dimasukkan ke dalam sekolah reguler sedangkan siswa berkelainan akan dimasukkan ke dalam sekolah khusus atau sekolah luar biasa. Akan tetapi, dalam sistem pendidikan inklusi pengkategorian siswa ke dalam kelompok normal dan berkelainan ditiadakan. Seperti yang diungkapkan oleh Wahyu Sri Ambar A., pendidikan inklusi diartikan sebagai penggabungan penyelenggaraan pendidikan luar biasa dan pendidikan reguler dalam satu sistem pendidikan yang dipersatukan (2005:106). Hal senada juga diungkapkan oleh David Smith (2009:45). Menurutnya, istilah pendidikan inklusi digunakan untuk mendiskripsikan penyatuan anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program sekolah. Konsep inklusi memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerimaan anak-anak yang memiliki

hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial yang ada di sekolah. Adanya peniadaan penggolongan tersebut karena dipandang dengan adanya penggolongan dapat menjadi penyebab adanya pelabelan, dan pelabelan menyebabkan adanya rasa malu dan rendah diri bagi siswa yang berkekurangan. Selain itu dapat pula menyebabkan adanya arogansi bagi siswa yang memiliki keunggulan. Padahal dalam realitas kehidupan tidak sedikit orang yang memiliki kekurangan, namun mereka memiliki suatu keunggulan yang tidak dimiliki oleh semua orang yang normal.

Menurut Permendiknas No 70 tahun 2009, menyebutkan bahwa:

“Pendidikan inklusi didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik secara umumnya.”

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi yaitu sekolah yang mengadopsi pendidikan untuk semua (*education for all*) yaitu semua anak bisa belajar di lingkungan yang sama baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus (ABK) tanpa memandang kelainan fisik maupun mental, tanpa adanya diskriminatif dari lingkungan belajar dan saling menghargai keanekaragaman yang bertujuan untuk mewujudkan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus memperoleh pendidikan yang bermutu untuk mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya.

Model pendidikan inklusi yang diselenggarakan pemerintah Indonesia yaitu model pendidikan inklusif moderat (Direktorat PLB, 2007 :8-9). Pendidikan inklusi moderat yang dimaksud yaitu:

- a. Pendidikan inklusif yang memadukan antara terpadu dan Inklusi penuh.
- b. Model moderat dikenal dengan model *mainstreaming*.
- c. Filosofinya tetap pendidikan inklusif, tetapi dalam prakteknya anak berkebutuhan khusus disediakan berbagai alternatif layanan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Menurut Agustyawati & Solicha (2009:100), anak berkebutuhan khusus fleksibel pindah dari satu bentuk layanan ke bentuk layanan yang lain, seperti :
 - 1) bentuk kelas reguler penuh
anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama
 - 2) bentuk kelas reguler dengan *cluster*
anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus
 - 3) bentuk kelas reguler dengan *pull out*
anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus

4) bentuk kelas reguler dengan *cluster* dan *pull out*

anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar bersama dengan guru pembimbing khusus

5) bentuk kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian

anak berkelainan belajar di kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler

6) bentuk kelas khusus penuh di sekolah reguler

anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler.

2. Perbedaan Pendidikan Segregasi, Pendidikan Terpadu dan Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusif hanya merupakan salah satu model penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Model yang lain diantaranya adalah sekolah segregasi dan pendidikan terpadu. Perbedaan ketiga model tersebut dijelaskan oleh Direktorat PLB (2007: 4-

6) dapat diringkas sebagai berikut:

a. Pendidikan Segregasi

Pendidikan segregasi adalah sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Di Indonesia bentuk sekolah segregasi ini berupa satuan pendidikan khusus atau

Sekolah Luar Biasa sesuai dengan jenis kelainan peserta didik. Seperti SLB/A (untuk anak tunanetra), SLB/B (untuk anak tunarungu), SLB/C (untuk anak tunagrahita), SLB/D (untuk anak tunadaksa), SLB/E (untuk anak tunalaras), dan lain-lain. Satuan pendidikan khusus (SLB) terdiri atas jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB. Sebagai satuan pendidikan khusus, maka sistem pendidikan yang digunakan terpisah sama sekali dari sistem pendidikan di sekolah reguler, baik kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, sampai pada sistem pembelajaran dan evaluasinya. Kelemahan dari sekolah segregasi ini antara lain aspek perkembangan emosi dan sosial anak kurang luas karena lingkungan pergaulan yang terbatas.

b. Pendidikan Terpadu

Pendidikan terpadu adalah sekolah yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler tanpa adanya perlakuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan individual anak. Sekolah tetap menggunakan kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta sistem pembelajaran reguler untuk semua peserta didik. Jika ada peserta didik tertentu mengalami kesulitan dalam mengikuti pendidikan, maka konsekuensinya peserta didik itu sendiri yang harus menyesuaikan dengan sistem yang dituntut di sekolah reguler. Dengan kata lain pendidikan terpadu menuntut anak yang

harus menyesuaikan dengan sistem yang dipersyaratkan sekolah reguler. Kelemahan dari pendidikan melalui sekolah terpadu ini antara lain, anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan individual anak. Sedangkan keuntungannya adalah anak berkebutuhan khusus dapat bergaul di lingkungan sosial yang luas dan wajar.

c. Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada pendidikan inklusif setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan/atau penyesuaian mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya. Dengan kata lain pendidikan inklusif mensyaratkan pihak sekolah yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan peserta didik yang menyesuaikan dengan sistem persekolahan. Keuntungan dari pendidikan inklusif anak berkebutuhan khusus maupun anak biasa dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat, dan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai potensinya masing-masing. Konsekuensi penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah pihak sekolah dituntut melakukan berbagai perubahan, mulai cara

pandang, sikap, sampai pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual tanpa diskriminasi

3. Anak Berkebutuhan Khusus

Menurut M. Takdir Ilahi (2013: 138) anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus sementara atau permanen sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan yang lebih intens. Kebutuhan tersebut dapat disebabkan bawaan dari lahir ataupun karena suatu tekanan sosial, emosi ataupun perilaku yang menyimpang.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Permendiknas No. 70/2009 pasal 3 ayat 1) dijelaskan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus dibahasakan sebagai peserta didik yang memiliki kelainan. Sedangkan menurut Suyanto dan Mudjito (2014: 59) pengertian dari anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam proses pertumbuhan/perkembangannya secara signifikan mengalami kelainan/penyimpangan (fisik, mental-intelektual, sosial, emosional) dibanding dengan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik dibandingkan dengan siswa pada umumnya, dikarenakan mengalami kelainan fisik, mental-intelektual, sosial maupun emosional.

4. Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus

Dalam dunia pendidikan saat ini, anak berkebutuhan khusus diklasifikasikan atas beberapa kelompok sesuai jenis kelainan anak. Menurut Abdul (2006:6), anak berkebutuhan khusus terbagi kedalam delapan klasifikasi kelompok, yaitu

a. Keterbelakangan Mental

Anak dalam kelompok ini memiliki fungsi intelektual umum dibawah rata-rata secara signifikan yang berkaitan dengan gangguan dalam penyesuaian perilaku yang terwujud atau terjadi selama periode perkembangan

b. Tidak Mampu Belajar

Merupakan anak yang mengalami kesenjangan yang berat antara kemampuan intelektual yang dimiliki dengan hasil belajar yang dicapai pada salah satu atau lebih bidang belajar berupa: ekspresi oral, pemahaman pendengaran, keterampilan membaca dasar, pemahaman bacaan, dan kalkulasi matematika atau pemikiran matematika

c. Gangguan Emosional

Gangguan emosional diartikan sebagai suatu ketidakmampuan belajar yang disebabkan oleh faktor kesehatan, intelektual dan sensorik. Gangguan emosional juga dapat diartikan sebagai suatu ketidakmampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam membangun dan memelihara hubungan yang memuaskan dengan teman sebaya dan guru.

d. Kelainan Fisik

Merupakan anak yang mengalami ketidakfungsian fungsi fisik yang disebabkan karena penyakit, kecelakaan, radiasi, dll.

e. Kerusakan /Gangguan Pendengaran

Merupakan anak yang memiliki gangguan pendengaran yang menyebabkan anak tidak memiliki keterampilan dalam berkomunikasi dan keterampilan lain yang dibutuhkan dalam proses pendidikan di kelas.

f. Kerusakan /Gangguan Penglihatan,

Merupakan individu yang mengalami kerusakan penglihatan sehingga dalam proses pendidikannya harus diajar dengan membaca dengan menggunakan alat bantu Braille atau dengan metode aural (menggunakan media tape yang dapat merekam dan didengar).

g. Gangguan Bahasa dan Wicara,

Merupakan individu yang mengalami gangguan atau keterlambatan dalam wicaranya atau dalam menggunakan bahasa pada saat kehidupan sehari-harinya, sehingga tidak sesuai dengan tahapan perkembangan di usianya.

h. Anak Berbakat.

Anak berbakat merupakan anak yang memiliki bakat yang istimewa di bidang intelektual, seni, olahraga, dan keterampilan tertentu. Biasanya mereka memiliki kemampuan berpikir yang

istimewa, cerdas dan kreatif sehingga memiliki prestasi yang baik di sekolah.

Sedangkan menurut Mohammad Efendi (2006:4-11), anak berkebutuhan khusus dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Kelainan Fisik

Kelainan fisik adalah kelainan yang terjadi pada satu atau lebih organ tubuh tertentu. Akibat kelainan tersebut timbul suatu keadaan pada fungsi fisik tubuhnya tidak dapat menjalankan tugasnya secara normal.

b. Kelainan Mental

Dalam hal ini ialah anak yang memiliki penyimpangan kemampuan berpikir secara kritis, logis dalam menanggapi dunia sekitarnya.

c. Kelainan perilaku Sosial

Kelainan perilaku sosial atau disebut tuna laras ini merupakan anak yang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tata tertib, norma sosial, dan lain-lain.

Menurut Krik dan Gallagher dalam Ellah (2005:19) anak berkebutuhan khusus atau anak luar biasa dikelompokkan menjadi lima golongan, yaitu:

a. Kelainan mental, yang meliputi anak-anak yang memiliki kapasitas intelektual luar biasa tinggi (*intellectually superior*) dan yang lambat dalam belajar (*mentally retarded*)

- b. Kelainan sensoris, meliputi anak-anak dengan kerusakan pendengaran (*auditory impairments*) dan kerusakan visual (*visual impairments*)
- c. Gangguan komunikasi, meliputi anak-anak yang berkesulitan belajar (*learning disability*) dan gangguan dalam berbicara dan berbahasa
- d. Gangguan perilaku, meliputi anak-anak yang memiliki gangguan emosional dan ketidaksesuaian perilaku sosial atau tuna laras
- e. Tunaganda atau cacat berat, meliputi macam-macam kombinasi kecacatan seperti tunagrahita, tunanetra dengan tunagrahita.

Dari klasifikasi yang telah diungkapkan di atas, klasifikasi anak berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan dalam anak yang mengalami gangguan penglihatan (tunanetra), gangguan pendengaran (tunarungu), gangguan mental (tunagrahita), kelainan fisik (tunadaksa), gangguan sosial (tunalaras), anak berbakat dan anak berkesulitan belajar.

C. Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

Adanya penyelenggaraan atau pelaksanaan suatu program pembelajaran yang baru di dunia pendidikan, maka sekolah sebagai organisasi pelaksana program pembelajaran, tentu perlu menyiapkan berbagai aspek guna menyukkseskan implementasi program-program tersebut.

Schultz menemukan 10 (sepuluh) kategori utama kesiapan yang merupakan prasyarat bagi sekolah yang lebih ramah dan inklusi. Lebih lanjut menurutnya lingkungan pembelajaran inklusi dapat dicapai jika

memperhatikan kategori-kategori tersebut. Kesepuluh kategori yang dimaksud antara lain:

1. Sikap (*Attitudes*)

Guru dan administrator harus percaya bahwa inklusi yang lebih besar akan menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran yang meningkat bagi semua orang.

2. Persahabatan (*Relationship*)

Persahabatan dan kerjasama antara siswa dengan atau tanpa hambatan harus dipandang sebagai suatu norma yang berlaku.

3. Dukungan bagi Siswa (*Support for Student*)

Harus ada personil dan sumber daya lain yang diperlukan untuk memberikan layanan kebutuhan bagi siswa yang berbeda di kelas inklusi agar berhasil.

4. Dukungan untuk Guru (*Support for Teacher*)

Guru harus mempunyai kesempatan latihan yang akan digunakan dalam menangani jumlah keberagaman siswa yang lebih berbeda.

5. Kepemimpinan Administratif (*Administrative Leadership*)

Kepala Sekolah dan staf lain harus antusias dalam memberikan dukungan dan kepemimpinan di sekolah yang lebih inklusi.

6. Kurikulum (*Curriculum*)

Kurikulum harus cukup fleksibel sehingga tiap siswa dapat tertantang untuk meraih yang terbaik.

7. Penilaian (*Assesment*)

Pencapaian prestasi dan tujuan belajar harus diberi penilaian yang memberi gambaran akhir setiap siswa.

8. Program dan Evaluasi Staf (*Program and Staf Evaluation*)

Suatu sistem harus diletakkan dalam mengevaluasi keberhasilan sekolah yang menyeluruh supaya dapat memberikan suatu lingkungan inklusif dan ramah bagi siswa.

9. Keterlibatan Orangtua (*Parental Involvement*)

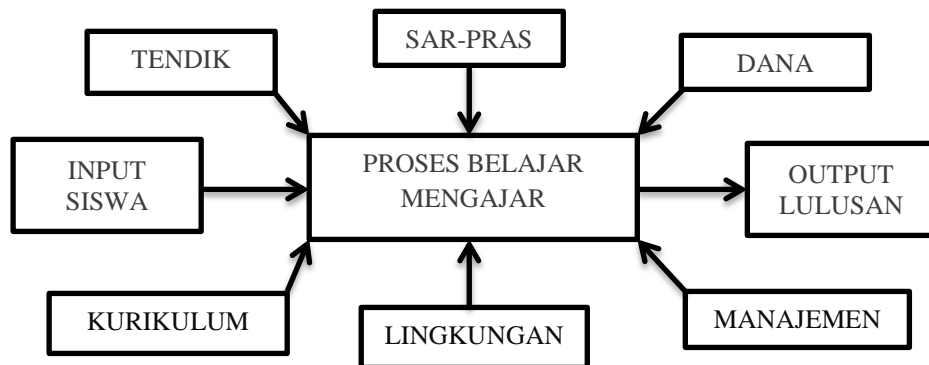
Orangtua siswa dengan ataupun tanpa hambatan harus memahami rencana untuk membentuk suatu lingkungan inklusi dan ramah bagi setiap siswa.

10. Keterlibatan Masyarakat (*Community Involvement*)

Melalui publikasi media dan sekolah, masyarakat harus diberi tahu dan dilibatkan dalam usaha-usaha meningkatkan keterlibatan dan diterimanya siswa penyandang hambatan di dalam kehidupan sekolah. Penerimaan ini harus didorong untuk memperluas penerimaan di dalam masyarakat itu sendiri (dalam Smith, 2009:399-400).

Sedangkan menurut Suyanto dan Mudjito (2014:40-50) terdapat delapan komponen yang harus direncanakan, diorganisasikan, diarahkan, dikoordinasikan diawasi dan dievaluasi oleh pihak sekolah. Komponen tersebut adalah (a) Peserta Didik (b) Kurikulum (c) Proses Pembelajaran (d) Manajemen (e) Tenaga Pendidik (f) Sarana dan Prasarana (g) Pendanaan (h) Sumber Daya Lingkungan.

Direktorat Pendidikan Luar Biasa juga telah merumuskan komponen-komponen dalam pendidikan inklusi yang secara dragmatis dapat dilihat pada diagaram berikut:



Gambar 1. Komponen Pendidikan Inklusi
(Buku 5 Direktorat PKLK, 2007:6)

Komponen-komponen seperti pada diagram merupakan sub-sistem dalam sistem pendidikan. Bila terdapat perubahan pada salah satu komponen, maka akan menuntut adanya perubahan/penyesuaian pada komponen yang lainnya. Misal saja, bila dalam suatu kelas terdapat perubahan pada input siswa, yakni tidak hanya menampung anak normal tetapi juga anak berkelainan, maka menuntut penyesuaian (modifikasi) kurikulum (bahan ajar), peran serta guru, sarana-prasarana, dana, manajemen (pengelola kelas), lingkungan, serta kegiatan belajar-mengajar.

Pengertian dari kesiapan sekolah dalam implementasi pendidikan anak berkebutuhan khusus dapat disimpulkan sebagai kondisi sekolah yang bersedia menerapkan program layanan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus, dan memberikan respon sesuai dengan kebutuhan anak sebagai

bagian dari peserta didik guna memajukan pendidikan di Indonesia. Secara umum, penilaian kesiapan sekolah berdasarkan komponen yang telah dipaparkan sebelumnya meliputi: kurikulum, peserta didik, tenaga kependidikan, sarana-prasarana, pendanaan, manajemen sekolah, lingkungan, dan proses belajar-mengajar.

1. Kesiapan Sekolah dalam Aspek Kurikulum

Dalam pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusi (2007:19) dijelaskan bahwa kurikulum dalam pendidikan inklusi pada dasarnya menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum, namun perlu dilakukan modifikasi (penyelarasan) sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Modifikasi tersebut dilakukan oleh tim pengembang kurikulum sekolah. Tim pengembang kurikulum ini terdiri dari Kepala Sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pendidikan khusus, konselor, psikolog, dan ahli lain yang terkait.

Tugas dari tim pengembang kurikulum ini adalah mempersiapkan program pendidikan atau pengajaran individual (PPI), yang disusun dengan mengacu kurikulum nasional satuan pendidikan yang bersangkutan dengan disesuaikan kebutuhan peserta didik secara individual. Lingkup pengembangan PPI meliputi aspek pendidikan akademik dan non akademik.

Sekolah dapat dikatakan siap dilihat dari komponen kurikulum jika memenuhi kriteria antara lain:

a. Mengikuti Proses Pengembangan PPI

Proses Pengembangan PPI meliputi tahap penjangkauan dan identifikasi, rujukan, pertemuan tim rujukan, asesmen, dan pertemuan tim asesmen.

b. Membentuk tim pengembang PPI

Tim pengembang PPI terdiri dari orang-orang yang diharapkan terlibat dalam penanganan masalah peserta didik secara individual. Konsisten dengan tujuan dibentuknya, tim pendidikan khusus atau tim pengembang PPI yaitu (1) Kepala Sekolah; (b) pengawas; (c) guru kelas; (d) guru pendidikan khusus; (e) guru kunjung; (f) individu yang merujuk; (g) tenaga profesi lain sesuai kebutuhan; (h) orangtua anak dan anak sendiri (jika diperlukan).

c. Melaksanakan pengembangan PPI

Pengembangan PPI meliputi deskripsi tingkat kemampuan peserta didik, tujuan jangka panjang (umum) dan tujuan jangka pendek (khusus).

d. Melakukan modifikasi kurikulum dan isi materi.

Khusus di bidang akademik ada beberapa teknik memodifikasi isi materi untuk disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik secara individual, misalnya:

- 1) Bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan di atas normal (berbakat), materi dalam kurikulum sekolah reguler dapat dimodifikasi dengan memperluas dan

memperdalam isi materi seperti mengembangkan proses berfikir tingkat tinggi (analisis, sintesis, evaluasi, dan pemecahan masalah), menambah materi baru yang tidak ada di dalam kurikulum sekolah reguler, tetapi materi tersebut dianggap penting untuk peserta didik berbakat, atau menambah materi yang ada di dalam kurikulum sekolah reguler pada pokok bahasan berikutnya (percepatan).

- 2) Bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan relatif normal materi dalam kurikulum sekolah reguler dapat tetap dipertahankan, atau tingkat kesulitannya diturunkan sedikit.
- 3) Bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan di bawah normal (peserta didik lamban belajar atau tunagrahita) materi dalam kurikulum sekolah reguler dapat dikurangi atau diturunkan tingkat kesulitannya seperlunya, atau bahkan dihilangkan bagian tertentu (Buku 3 DPLB, 2004:32-33).

Sedangkan Ishartiwi (2010:4) memilah kurikulum akademik bagi ABK menjadi tiga, antara lain:

- 1) ABK dengan kemampuan akademik rata-rata dan di atas tinggi disiapkan kurikulum terpadu dengan kurikulum normal atau kurikulum modifikasi.
- 2) ABK dengan kemampuan akademik sedang (di bawah rata-rata) disiapkan kurikulum fungsional atau vokasional.

3) ABK dengan kemampuan akademik sangat rendah disiapkan kurikulum pengembangan bina diri. Juga perlu disiapkan kurikulum kompensatoris, yaitu kurikulum khusus untuk meminimalisasai *barier* pada setiap ABK sebelum belajar aspek akademik.

e. Mampu Mengatur Pemberian Layanan

Tim pengembang PPI harus secara tegas menyebut seberapa besar peserta didik dapat diintegrasikan dalam program-program pendidikan biasa. Untuk peserta didik tertentu mungkin program integrasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian peserta didik tersebut harus diberi kesempatan berinteraksi dengan teman-temannya yang normal.

f. Merencanakan Waktu Pelaksanaan dan Kriteria Evaluasi

Komponen ini berisi rencana tanggal dimulainya kegiatan untuk setiap tujuan khusus, jangka waktu kegiatan dan tanggal evaluasi untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan tersebut. Di samping itu juga perlu dideskripsikan metode dan kriteria evaluasi setiap tahun.

g. Memiliki Model atau Format PPI

Meliputi komponen deskripsi singkat kemampuan peserta didik sekarang, tujuan, jangka waktu jenis layanan khusus, dan evaluasi.

2. Kesiapan Sekolah dalam Aspek Peserta Didik

Direktoran PLB dalam buku 5 Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (2007:10) menjelaskan bahwa penerimaan peserta didik baru pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif hendaknya memberi kesempatan dan peluang kepada anak berkebutuhan khusus untuk dapat diterima dan mengikuti pendidikan di sekolah terdekat. Untuk tahap awal, agar memudahkan pengelolaan kelas, seyogyanya setiap kelas inklusif dibatasi tidak lebih dari 2 (dua) jenis kekhususan, dan jumlah keduanya tidak lebih dari 5 (lima) peserta didik.

Maka sekolah yang menunjukkan kesiapan dalam komponen peserta didik adalah sekolah yang memperhatikan keberagaman peserta didik, untuk itu sekolah juga dituntut agar dapat melakukan identifikasi terlebih dahulu serta mampu merencanakan tindakan selanjutnya. Identifikasi ABK dapat dilakukan oleh guru kelas, orangtua anak, dan atau tenaga profesional terkait.

3. Kesiapan Sekolah dalam Aspek Tenaga Pendidik

Salah satu tenaga kependidikan di sekolah ialah pendidik atau guru. Lebih lanjut dijelaskan bahwa guru yang terlibat di sekolah inklusi diantaranya ialah guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Butir 1 Pasal 28 PP No.19 Tahun 2005).

Direktorat PLB dalam Buku 5 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (2007:13) menjelaskan bahwa tugas dari tenaga kependidikan adalah menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan.

a. Guru Kelas

Menurut Lerner (dalam Mulyono, 2003:103), ada dua kompetensi yang perlu dikuasai oleh guru bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu kompetensi teknis (*technical competencies*) dan kompetensi kolaboratif (*collaborative consultation competencies*). Kompetensi teknis mencakup; 1) memahami berbagai teori tentang anak berkebutuhan khusus; 2) memahami berbagai tes yang terkait dengan kebutuhan khusus; 3) terampil dalam melaksanakan asesmen dan evaluasi, dan; 4) terampil dalam mengajarkan bahasa lisan, membaca, matematika, mengelola perilaku, serta terampil dalam memberikan pelajaran prevokasional dan vokasional. Sedangkan kompetensi konsultasi kolaboratif mencakup kemampuan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan semua orang terkait dengan upaya memberikan bantuan kepada anak berkebutuhan khusus.

Hasil penelitian Praptiningrum (2010: 36-37) menjelaskan mengenai kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi Beberapa kemampuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan tentang perkembangan anak berkebutuhan khusus
- 2) Pemahaman akan pentingnya mendorong rasa penghargaan anak berkaitan dengan perkembangannya, motivasi belajar melalui suatu interaksi positif dan berorientasi pada sumber belajar
- 3) Pemahaman tentang konvensi hak anak dan implikasinya terhadap implementasi pendidikan dan perkembangan semua anak
- 4) Pemahaman tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran yang berkaitan dengan isi, hubungan sosial pendekatan, dan bahan pembelajaran
- 5) Pemahaman arti pentingnya belajar aktif dan pengembangan pemikiran kreatif dan logis
- 6) Pemahaman pentingnya evaluasi dan assesmen berkesinambungan oleh guru
- 7) Pemahaman konsep inklusi dan pengayaan serta cara pelaksanaan inklusi dan pembelajaran yang berdeferensi
- 8) Pemahaman terhadap hambatan belajar termasuk yang disebabkan oleh kelainan fisik maupun mental
- 9) Pemahaman konsep pendidikan berkualitas dan kebutuhan implementasi pendekatan dan metode baru

Kemampuan-kemampuan di atas merupakan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru dan sekaligus pendamping bagi ABK di sekolah inklusi, dengan harapan program penyelenggaraan sekolah

inklusi dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan ABK.

b. Guru Pembimbing Khusus

Menurut Lerner dalam Mulyono Abrurrahman (2003: 102) ada sembilan peranan guru khusus bagi ABK di sekolah. Kesembilan peranan tersebut adalah:

- 1) Menyusun rancangan program identifikasi, asesmen, dan pembelajaran ABK;
- 2) Berpartisipasi dalam penjaringan, asesmen, dan evaluasi ABK;
- 3) Berkonsultasi dengan para ahli yang terkait dan menginterpretasikan laporan mereka;
- 4) Melaksanakan tes, baik dengan tes formal maupun informal;
- 5) Berpartisipasi dalam penyusunan program pendidikan yang diindividualkan;
- 6) Mengimplementasikan program pendidikan yang diindividualkan;
- 7) Menyelenggarakan pertemuan dan wawancara dengan orangtua;
- 8) Bekerjasama dengan guru reguler atau guru kelas untuk memahami anak dan menyediakan pembelajaran yang efektif; dan
- 9) Membantu anak dalam mengembangkan pemahaman diri dan memperoleh harapan untuk berhasil serta keyakinan kesanggupan mengatasi kelainannya.

Ina Rosilawati (2013:27) juga menjelaskan tugas GPK antara lain adalah:

- 1) Menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran.
- 2) Membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah dan orang tua peserta didik.
- 3) Melaksanakan pendampingan bersama-sama dengan guru kelas/guru mata pelajaran/ guru bidang studi.
- 4) Memberikan bantuan layanan khusus bagi anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa remidi ataupun pengayaan.
- 5) Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus, kepada anak-anak berkebutuhan khusus selama mengikuti kegiatan pembelajaran, yang dapat dip[ahami jika terjadi pergantian guru.
- 6) Memberikan bantuan (berbagi pengalaman) pada guru kelas dan/ atau guru mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus.

4. Kesiapan Sekolah dalam Aspek Sarana-Prasarana

Dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 dijelaskan bahwa satuan pendidikan yang memiliki peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka

(Butir 1 pasal 46). Selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana bahwa bangunan gedung memenuhi persyaratan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat.

Peserta didik di sekolah inklusi terdiri atas anak-anak normal dan anak-anak yang mengalami kelainan atau menyimpang baik fisik, intelektual, sosial, maupun emosional. Guna mengembangkan potensi yang dimiliki peserta berkebutuhan khusus, maka sarana-prasarana yang diperlukan sekolah inklusi selain sarana-prasarana umum (seperti halnya sekolah umum) juga sarana-prasarana yang sesuai dengan jenis kelainan anak (sarana-prasarana khusus). Sarana-prasarana khusus tersebut dipaparkan dalam Buku 7 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan inklusi, sebagai berikut:

1) Tunanetra

- a) Alat asesmen meliputi SVR (*Trial Lens Set*), *Snellen Chart*, *Ishihara Test*, *Snellen Chart Electronic*.
- b) Orientasi dan mobilitas seperti tongkat panjang, tongkat lipat, tongkat elektrik, bola bunyi, pelindung kepala.
- c) Alat bantu pelajaran atau akademik dapat berupa globe timbul, peta timbul, abacus, penggaris braille, blokies, puzzle ball, papan baca, model anatomi mata, meteran braille, puzzle buah-buahan, puzzle binatang, kompas braille, talking watch, gelas rasa, botol

aroma, bentuk-bentuk geometri, collar sorting box, braille kit, *reglets* dan *stylush*, mesin tik biasa, mesin tik braille, komputer dan printer braille, kompas bicara, kamus bicara.

- d) Alat bantu visual seperti magnifier lens set, CCTV, view scan, televisi, microscope.
 - e) Alat bantu auditif meliputi tape recorder double deck, alat musik pukul, alat musik tiup.
 - f) Alat latihan fisik antara lain catur tunanetra, bridge tunanetra, sepak bola dengan bola bunyi, papan keseimbangan, power raider, dan static bicycle.
 - g) Prasarana khusus yang perlu disediakan di sekolah inklusi, apabila peserta didiknya ada yang tunanetra meliputi ruang asesmen, ruang konsultasi, ruang orientasi mobilitas, ruang remedial teaching, belajar menulis braille, ruang latihan mendengar, ruang latihan fisik, ruang ketrampilan, ruang penyimpanan alat, dan lapangan olahraga.
- 2) Tunarungu atau gangguan komunikasi
- a) Alat asesmen dapat seperti, *scan test*, bunyi-bunyian, garpatula, *audiometer* dan *blanko audiogram*, *mobile sound proof*, *sound level meter*.
 - b) Alat bantu dengar seperti model saku, model belakang telinga dan model kaca mata. Sedangkan untuk membantu pendengaran

dalam proses pembelajaran dapat digunakan alat *hearing group* dan *loop induction system*.

- c) Latihan bina komunikasi persepsi bunyi dan irama seperti *speech and sound simulation*, spatel, cermin, alat latihan meniup, alat musik perkusi, meja latihan wicara, sikat getar, lampu aksen, TV/VCD.
- d) Alat bantu belajar atau akademik dapat berupa anatomi telinga, miniatur benda, *finger alphabet*, model telinga, torso setengah badan, puzzle buahbuahan, puzzle binatang, puzzle konstruksi, silinder, model geometri, kartu kata, kartu kalimat, menara segi tiga, menara gelang, menara segi empat, atlas, globe, peta dinding, miniatur rumah adat.
- e) Alat latihan fisik yang dapat digunakan sebagai berikut, bola dan net volley, bola sepak, meja pingpong, raket, net bulu tangkis dan *sittle cock*, *power raider*, dan *static bycycle*.
- f) Prasarana khusus yang perlu disediakan di sekolah inklusi, apabila peserta didiknya ada yang tunarungu meliputi ruang asesmen, ruang konsultasi, ruang latihan bina wicara, ruang bina persepsi bunyi dan irama, ruang remedial teaching, ruang latihan fisik, ruang penyimpanan barang, dan lapangan olahraga.

3) Tunagrahita atau lamban

- a. Alat asesmen untuk anak tunagrahita dapat digunakan seperti tes intelegensi WISC-R, Tes Intelegensi Stanford Binet, *Cognitive Ability* tes.
- b. Latihan sensori visual yang dapat digunakan alat sebagai berikut: gradasi kubus; gradasi balok 1 dan 2; silinder 1, 2, dan 3; menara gelang 1, 2, dan 3; kotak silinder; multi indera; puzzle binatang; puzzle konstruksi; puzzle bola; Boks Sortor Warna; Geometri Tiga Dimensi; Papan Geometri; Kotak Geometri; konsentrasi mekanis; *Frommenstockbox Mit*; *Frommenstockbox*; *Scheiben-Stepel Puzzle*; *Formstec- Stepel Puzzle*; *Fadeldreiecke*; *Schmetterling Puzzle*; Puzzle set; *Streckspiel*; *Geo- Streckbrett*; *Rogenbugentorte*.
- c. Latihan sensori perabaan yang dapat digunakan untuk membantu sensori perabaan anak tunagrahita diantaranya: Keping Raba 1, 2, dan 3; Alas Raba; *Fub And Hand*; *Puzzle Pubtastplatten*; *Tactila*; *Balance Labirinth Spirale*; *Balance Labirinth Maander*.
- d. Alat sensori pengecap dan perasa yang dapat digunakan adalah gelas rasa, botol aroma, *tactile perception*, *aesthesiometer*.
- e. Latihan Bina Diri. Alat yang dapat digunakan antara lain: Berpakaian 1, 2, dan 3; *Dressing Frame Set*; Sikat dan pasta gigi.

- f. Alat yang digunakan untuk memahami konsep dan simbol bilangan dapat berupa: Keping Pecahan; Balok Bilangan 1 dan 2; Geometri Tiga Dimensi; Abacus; Papan Bilangan; Tiang Bilangan; Kotak Bilangan.
- g. Alat yang digunakan sebagai latihan memahami kreativitas dan daya pikir dapat berupa *Das Baukastchen*, *Das Wurfelaugen*, *Maxi Bausteinwagen*, *Steck Spilzug*, *Groberforstellung*, dan *Wurfspiel*.
- h. Alat pengajaran bahasa dapat berupa *alphabet loeincase*, pias huruf, *alphabet fibrebox*, dan pias kalimat.
- i. Alat yang dapat digunakan melatih perseptual motor dapat berupa bak pasir, papan keseimbangan, gradasi papan titian, keping keseimbangan, *power raider*, *formensortierspiel*, *balancier zehner*; *balancier brett*, *handbalancier spidel*, *balancierwipe*, *balancier steg*.
- j. Prasarana khusus yang perlu disediakan di sekolah inklusi, apabila peserta didiknya ada yang tunagrahita meliputi ruang asesmen, ruang konsultasi, ruang latihan sensori, ruang latihan bina diri, ruang remedial teaching, ruang latihan perseptual motor, ruang ketrampilan, ruang penyimpanan barang, lapangan olahraga.

4) Tunadaksa

- a) Alat yang digunakan untuk asesmen anak tunadaksa seperti berikut ini *finger goniometer, flexometer, plastic goniometer, reflex hammer, posture evaluation set, TPD Arsthesiometer, Gound Rhytem Tibre Instrumen, Cabinet Geometric Insert, Color Sorting Box, Tactile Board Set.*
- b) Alat latihan fisik yang dapat digunakan *pulley weight, kanavel table, squezz ball, restorator hand, restorator leg, treatmill jogger, safety walking strap, straight, sand-bag, exercise mat, incline mat, neuro development roll, heigh adjustable cowler, floor sitter, kursi cp, individual stand-in table, walking paralael, walker khusus cp, vestibular board, balance beam set, dynamic body and balance, kolam bola-bola, fibrator, infra red lamp, dual speed massager, speed training devices, bola karet, balok berganda, balok titian.*
- c) Alat bina diri yang dapat digunakan dapat berupa *swivel utensil, dressing frame set, lacing shoes, deluxe mobile commade.*
- d) Alat orthotic dan prostetic seperti *cock-up resting splint, rigid immobilitation elbow brace, fletion extention, back splint, night splint, denish broans splint, X Splint, O Splint, Log Leg Brace Set, Ankle or short leg brace, original thomas collar, simple cervival Brace, Corsett, Crutch, Wlaker Shoes, Thomas Heel*

Shoes, Wheel Chair, Kaki Palsu Sebatas Lutut, Kaki Palsu Sampai Paha.

- e) Alat bantu belajar atau akademik dapat berupa kartu abjad, kartu kata, kartu kalimat, torso seluruh badan, *geometri sharpe*, menara gelang, menara segitiga, menara segiempat, gelas rasa, botol aroma, *abacus dan washer*, papan pasak, dan kotak bilangan.
- f) Prasarana khusus yang perlu disediakan di sekolah inklusi, apabila peserta didiknya ada yang tunadaksa meliputi ruang asesmen, ruang konsultasi, ruang latihan fisik, ruang bina diri, remedial teaching, ruang ketrampilan, lapangan olahraga, ruang penyimpanan alat.

5) Tuna laras

- a) Alat yang digunakan untuk asesmen anak tunalaras seperti berikut ini *Adaptive Behavior Inventory for Children*, dan *AADM Adaptive Behavior Scale*.
- b) Alat terapi perilaku dapat berupa *duck wall, step* dan *count*, bola sepak bertali, *puppenhause, rolling boxer*, samsak, sarung tinju, *hoopla, sand pits, animal matching games, organ*, tambur dengan *stick* dan *tripod, rebana, Flute, torso, constructive puzzle, animal puzzle, fruits puzzle*, basket mini, konsentrasi mekanis.

- c) Alat terapi fisik seperti berikut ini: matras, *straight-type staircase*, bola sepak, bola dan net volley, meja pingpong, *power raider*, *strickleiter*, *trecketsando*, *rope ladder*.
 - d) Prasarana khusus yang perlu disediakan di sekolah inklusi, apabila peserta didiknya ada yang tunalaras meliputi ruang asesmen, ruang konsultasi, ruang terapi perilaku, ruang terapi bermain, ruang terapi fisik, ruang remedial teaching, ruang penyimpanan barang, lapangan olahraga.
- 6) Anak berbakat
- a) Alat asesmen dapat berupa tes inteligensi WISC-R, Tes Inteligensi Stanford Binet, *Cognitive Ability Test*; dan *Differential Aptitude Test*.
 - b) Alat bantu ajar atau akademik meliputi sumber belajar yang mencakup buku paket, buku pelengkap, buku referensi, buku bacaan, majalah, koran, internet, modul, lembar kerja, kaset video, VCD, museum, perpustakaan, CD-Rom, dan lain sebagainya. Serta media pembelajaran yang mencakup radio, cassette recorder, TV, OHP, wireless, slide projector, LD/VCD/DVD player, chart, komputer, dan lain sebagainya.
 - c) Prasarana khusus yang perlu disediakan adalah ruang asesmen.

7) Anak yang mengalami kesulitan belajar

- a) Alat yang digunakan untuk asesmen anak yang mengalami kesulitan belajar ialah instrumen ungkap riwbutir kelainan dan tes intelegensi WISC.
- b) Alat bantu ajar atau akademik, meliputi: (a) Kesulitan belajar membaca (Diskleksia) meliputi kartu abjad, kartu kata, dan kartu kalimat; (b) Kesulitan belajar bahasa meliputi kartu abjad, karti kata, dan kartu kalimat; (c) Kesulitan Belajar Menulis (Disgrafia) meliputi kartu abjad, karti kata, kartu kalimat, balok bilangan 1 dan 2; (d) Kesulitan Belajar Berhitung (Diskalkulia) meliputi balok bilangan 1 dan 2, pias angka, kotak bilangan, dan papan bilangan.
- c) Prasarana khusus yang perlu disediakan di sekolah inklusi, apabila peserta didiknya ada yang mengalami kesulitan belajar, meliputi ruang asesmen dan ruang remedial.

Dengan adanya sarana dan prasarana khusus, sekolah juga harus melakukan pengelolaan terhadap saran dan prasaran khusus tersebut. Dalam buku 7 Direktorat PLB (2007:32) dijelaskan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dilakukan secara terpadu oleh guru pendidikan khusus (GPK), guru kelas dan tim dari berbagai profesi yang terkait (antara lain, dokter mata, psikolog, ahli pendidikan luar biasa, ahli olahraga anak luar biasa, social worker, konselor, dokter ahli THT, ahli terapi wicara, neurolog,

dokter spesialis anak, dokter ortopedi, ortotis protetis, fisioterapis, okupasional terapis, ahli bahasa (ahli remedial bahasa/menulis) sesuai jenis dan tingkat kemampuan anak berkebutuhan khusus.

Penggunaan sarana dan prasarana bersifat fleksibel artinya tidak dikhususkan untuk setiap anak dan tiap bidang pengajaran, akan tetapi dapat digunakan oleh anak-anak lain dan dalam bidang studi yang berbeda dan dalam kelas yang berbeda. Jadi dalam hal ini dibutuhkan kreativitas pengelola dalam menentukan jenis alat serta penentuan tujuan penggunaan sarana dan prasarana tersebut.

Dapat pula dikatakan bahwa penggunaan sarana tersebut terintegrasi dalam setiap aspek pengembangan, maksudnya dalam sekali melakukan kegiatan, penggunaannya dapat membelajarkan semua aspek (fisik, intelektual, sosial, dan emosi) dari anak berkebutuhan khusus. Sebagai contoh, penggunaan alat latih sensori motor selain untuk melatih ketajaman indera dapat pula melatih kemampuan berbicara, bersosialisasi ataupun keseimbangan.

5. Kesiapan Sekolah dalam Aspek Pendanaan

Menurut Ina Rosilawati (2013:14), pada tahap perintisan sekolah inklusif, diperlukan dana bantuan sebagai stimulasi, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun, untuk penyelenggaraan program selanjutnya diusahakan agar sekolah bersama-sama orang tua siswa dan masyarakat (Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah), serta pemerintah daerah dapat menaggulangnya.

Diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 mengenai standar pembiayaan, dimana pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi yang meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap; biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan; dan terakhir biaya operasi yang mencakup gaji dan tunjangan, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung (Pasal 62:1-4).

Permendiknas Nomor 48 Tahun 2008 menetapkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (Pasal 2:1). Sedangkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 yang mengatur tentang pendidikan inklusi menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusi pada satuan pendidikan yang ditunjuk, dan pada butir berikutnya dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusi (Pasal 6:2-3).

Dari paparan di atas, sekolah dapat dikatakan siap dalam aspek pendanaan jika dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi memiliki alokasi dana khusus sebagaimana dijelaskan Direktorat PLB (dalam Buku 5, 2007:15). Dana tersebut antara lain digunakan untuk keperluan: (1) Kegiatan identifikasi input siswa, (2) Modifikasi

kurikulum, (3) Intensif bagi tenaga kependidikan yang terlibat, (4) pengadaan sarana-prasarana, (5) Pemberdayaan peranserta masyarakat, dan (6) Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar.

6. Kesiapan Sekolah dalam Aspek Manajemen Sekolah

Dalam pelaksanaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, dalam buku 5 Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi dijelaskan bahwa pengelolaannya dilandasi oleh pola manajemen mutu terpadu, yang meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Mengutamakan Kepuasan Pelanggan (Customer Satisfaction)

Pelanggan utama dalam sekolah inklusif ini antara lain adalah seluruh peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat. Sekolah harus dapat memberikan jaminan kepuasan, terutama kepuasan menikmati proses pembelajaran di sekolah.

2. Perbaikan Terus Menerus (*Continous Improvement*)

Seluruh pengelola dan penyelenggara sekolah inklusif harus senantiasa melakukan evaluasi program sebagai bahan pelaksanaan perbaikan terus menerus dilakukan. Setiap tahap dan proses selalu dievaluasi keterlaksanaannya, sehingga kendala-kendala yang mungkin timbul segera dapat dikenali dan diberikan solusinya. Sikap untuk mau melakukan perbaikan terus menerus harus terwujud dalam perilaku setiap personil yang terlibat dalam penyelenggaraan sekolah inklusif.

3. Kebiasaan Berbicara dengan Fakta (*Speaking With Fact*)

Manajemen yang bermutu selalu ditandai dengan kebiasaan para stake holder yang selalu berbicara dan komunikasi dengan fakta. Untuk dapat membangun kebiasaan ini maka sekolah harus mampu melakukan pengoleksian data (*Colecting data*), pengolahan data dan penyajian data, yang diantaranya, meliputi data-data tentang kepeserta didikan, sarana dan prasarana, ketenagaan, keuangan, kurikulum dan sistem evaluasi.

4. Sikap Menghargai Orang Lain (*Respect for People*)

Budaya untuk senantiasa menghargai orang lain, dalam penyelenggaraan sekolah inklusi akan berpengaruh terhadap mutu layanan dan penyelenggaraan pendidikan. Dalam sebuah sistem tidak ada orang yang paling penting, dan yang paling tidak penting, karena semua unsur menjadi penting. Oleh karena itu budaya saling menghargai ini harus ditumbuhkan agar setiap orang dapat memaksimalkan kekaryaannya. Khusus bagi murid, berkenaan dengan sikap menghargai orang lain ini diwujudkan dalam suasana sekolah yang akrab dan ramah terhadap peserta didik berkebutuhan khusus.

7. Kesiapan Sekolah dalam Aspek Lingkungan Masyarakat

Pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus akan sangat besar pengaruhnya terhadap upaya

pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (Buku 5 Direktorat PLB, 2007:18).

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan terutama dalam rangka melakukan sosialisasi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Dengan adanya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus akan memberikan dampak yang besar terhadap upaya pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pemahaman dan kepedulian masyarakat seperti ini akan berimbas secara positif terhadap sikap peserta didik lainnya yang belajar bersama-sama dengan anak berkebutuhan khusus. Dengan demikian akan tercipta iklim belajar yang kondusif bagi anak berkebutuhan khusus dan peserta didik-peserta didik lainnya di sekolah.

Beberapa cara yang efektif untuk bekerjasama dengan lingkungan dituangkan dalam Buku 2 oleh Tim Penyusun LIRP (2007:6), antara lain:

- a. Mengadakan pertemuan
- b. Menjadwalkan diskusi informal
- c. Mengirim hasil laporan belajar peserta didik pada keluarga atau orangtua
- d. Melakukan kunjungan lapangan ke masyarakat
- e. Melibatkan anggota keluarga dalam kegiatan kelas
- f. Mengundang ahli-ahli di masyarakat untuk berbagi pengetahuan

Agar terbentuk suasana dan keahlian yang dibutuhkan untuk lingkungan yang lebih inklusi, McLaughlin dan Warren menyarankan beberapa strategi dasar yang harus dikerjakan pada tingkat pendidikan individual, antara lain:

- a. Mengorganisasi aktivitas pengembangan staf seputar pembagian tugas dalam menciptakan sekolah yang lebih inklusi.
- b. Melibatkan seluruh staf sekolah dalam merencanakan program pengembangan staf.
- c. Melibatkan orangtua dalam proses pengembangan staf.
- d. Jika dipandang perlu staf sekolah dapat bekerja sama dengan ahli pendidikan khusus.
- e. Menggunakan metode *peer-watching* dan *peer mentoring* di antara staf sekolah untuk membantu pengembangan staf.
- f. Membuat rujukan dan prosedur sekolah untuk menyiapkan ABK ditempatkan di sekolah inklusi.
- g. Mengembangkan petunjuk dan prosedur bagi persiapan anak-anak tanpa hambatan untuk ditempatkan bersama-sama ABK di kelas mereka.
- h. Menggunakan teknologi yang ada dalam menjalankan tugas pengembangan staf.
- i. Menunjukkan dukungan usaha-usaha tersebut dengan keterlibatan penuh dari Kepala Sekolah serta pimpinan sekolah lainnya (dalam Smith, 2009:408).

8. Kesiapan Sekolah dalam Aspek Proses Belajar Mengajar

Kegiatan pembelajaran merupakan inti dari pengelolaan sekolah, oleh sebab itu semua kegiatan pendukung lainnya harus diarahkan pada terciptanya suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM). Terlebih dalam inklusi, proses belajar mengajar haruslah lebih banyak memberikan kesempatan belajar kepada siswa melalui pengalaman nyata. Implikasi yang perlu disiapkan dalam komponen proses belajar mengajar meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan belajar mengajar.

Kegiatan pembelajaran pada setting inklusi secara umum sama pelaksanaannya dengan kegiatan pembelajaran di kelas umum. Akan tetapi, karena dalam kelas inklusi terdapat siswa yang lebih heterogen, maka memerlukan modifikasi dalam strategi, kegiatan, media serta metode pembelajarannya. Dalam setting inklusi, guru dituntut untuk dapat mengakomodasi semua kebutuhan siswa baik siswa normal maupun siswa berkebutuhan khusus. Direktorat PLB (2007:28-34) menjelaskan hal yang perlu dilakukan saat proses pembelajaran dalam kelas berseting inklusi antara lain:

- a. Merencanakan Kegiatan Belajar-Mengajar
 - 1) Merencanakan Pengelolaan Kelas
 - 2) Merencanakan Pengorganisasian Bahan
 - 3) Merencanakan Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar
 - 4) Merencanakan Penggunaan Sumber Belajar

- 5) Merencanakan Penilaian
- b. Melaksanakan Kegiatan Belajar-Mengajar
 - 1) Berkomunikasi dengan Siswa
 - 2) Mengimplementasikan Metode, Sumber Belajar dan Bahan Latihan yang Sesuai dengan Tujuan
 - 3) Mendorong Siswa untuk Terlibat Secara Aktif
 - 4) Mendemonstrasikan Penguasaan Materi
 - 5) Mengelola Waktu, Ruang, Bahan dan Perlengkapan Pengajaran
 - 6) Melakukan Evaluasi
 - c. Membina Hubungan Antar Pribadi
 1. Bersikap Terbuka, Toleran dan Simpati terhadap Siswa
 2. Menampilkan Kegairahan Kesungguhan
 3. Mengelola Interaksi antar Pribadi

Lombardi (dalam Smith, 2006:400-401) menjelaskan beberapa model pengajaran yang dapat membantu meningkatkan keberhasilan kelas inklusif. Model-model tersebut meliputi:

- a. Pengajaran Langsung (*Direct Instruction*)

Menggunakan seluruh sumber daya guru secara efisien (baik pendidikan umum maupun khusus) di kelas umum dan pemantauan kemajuan secara seksama.

- b. Intervensi Strategi (*Strategy Intervention*)

Penekanan dalam kemampuan pengajaran seperti mendengar (*Listening*), membuat catatan (*Note Talking*), pertanyaan mandiri

(*Self-Questioning*), tes lisan (*Test Talking*), dan pemantauan kesalahan (*Error Monitor*).

c. Tim Asisten-Guru (*Teacher-Assistance Team*)

Guru umum dan guru pendidikan khusus bekerja sebagai tim yang bertemu secara teratur untuk mengatasi masalah dan memberikan bantuan dalam mengatur siswa dan pertanyaan mengenai kesulitan akademis.

d. Model Guru sebagai Konsultan (*Consulting Teacher Model*)

Guru-guru khusus dilatih sebagai konsultan untuk memberikan bimbingan dan bantuan kepada guru kelas umum. Selain itu juga melatih para profesional yang ditugaskan di kelas umum untuk membantu siswa penyandang hambatan.

D. Indikator Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam komponen kesiapan sekolah dalam implementasi pendidikan anak berkebutuhan khusus di atas, dapat dijelaskan beberapa indikator terkait komponen tersebut, yaitu:

Tabel 2.1 Komponen Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan ABK

Aspek	Komponen
1. Kurikulum	Mengikuti proses pengembangan PPI, membentuk tim PPI, Melaksanakan pengembangan PPI, Melakukan modifikasi kurikulum dan isi materi, Mengatur pemberian layanan, Merencanakan waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi, Memiliki model atau format PPI
2. Peserta Didik	Terdapat keberagaman peserta didik, Melakukan identifikasi bagi peserta didik (menghimpun data tentang peserta didik, menganalisis data dan mengklasifikasikan peserta didik, mengadakan pertemuan dengan Kepala Sekolah, menyelenggarakan pertemuan kasus, menyusun laporan hasil pertemuan khusus).
3. Tenaga Kependidikan	Guru kelas (kompetensi teknis dan kompetensi kolaboratif), Guru pembimbing khusus (menyusun rancangan program ABK, Berpartisipasi dalam penjangkaran ABK, Berkonsultasi dengan ahli terkait, Melaksanakan tes, Berpartisipasi dalam penyusunan PPI, Mengimplementasi PPI, Menyelenggarakan pertemuan dengan orangtua, Bekerjasama dengan guru reguler, Membantu anak dalam mengembangkan pemahaman diri)
4. Sarana-Prasarana	Adanya pengadaan sarana - prasarana khusus, pengelolaan sarana – prasarana khusus
5. Manajemen Sekolah	Pengutamaan kepuasan pelanggan, Perbaikan terus-menerus, kebiasaan berbicara dengan fakta, sikap menghargai oranglain, melaksanakan fungsi sesuai pembagian tugas.
6. Dana	Dana khusus untuk keperluan: Identifikasi input siswa, Modifikasi kurikulum, Intensif bagi tenaga pendidik yang terlibat, Pengadaan saranaprasarana, Pemberdayaan peran serta masyarakat, Kegiatan belajar-mengajar.
7. Lingkungan	Mengadakan pertemuan dengan masyarakat atau orangtua, Menjadwalkan diskusi informal, Mengirim hasil laporan belajar peserta didik pada orangtua, Melakukan kunjungan lapangan ke masyarakat, Melibatkan anggota keluarga dalam kegiatan kelas, Mengundang ahli-ahli di masyarakat.
8. Proses Belajar Mengajar	Pengajaran langsung, Intervensi strategi, Tim asisten guru, Model guru sebagai konsultan.

E. Kerangka Pikir

Sekolah merupakan suatu lembaga yang dirancang untuk melakukan pengajaran terhadap siswa dibawah pengawasan guru. Saat ini sekolah masih dipercaya oleh sebagian besar anggota masyarakat sebagai salah satu tempat untuk belajar, berlatih kecakapan, menyerap pendidikan atau tempat proses mendewasakan anak. Sehingga, sekolah juga digunakan pemerintah untuk menjadi wadah tercapainya salah satu tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Langkah yang digunakan pemerintah kemudian adalah melaksanakan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun untuk anak tingkat SD dan SMP. Dengan adanya program tersebut diharapkan dapat memberikan presentase yang besar dalam peningkatan kecerdasan bangsa.

Seiring berjalannya ilmu pengetahuan dan tuntutan di lapangan, pemerintah terus melakukan pembaharuan dalam bidang pendidikan untuk menunjang pemerataan pendidikan, salah satunya melalui Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan Inklusif. Dengan permendiknas tersebut, anak berkebutuhan khusus yang awalnya dipersulit untuk mengenyam pendidikan di sekolah formal, kemudian menjadi lebih mudah aksesnya dalam mendapatkan ilmu pendidikan formal. Pendidikan inklusi yang mampu menerima siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus merupakan perkembangan dari pendidikan segregasi, yang membedakan antara siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus. Dengan adanya pendidikan inklusi tersebut sekolah kemudian dituntut untuk melakukan penyesuaian terhadap siswa berkebutuhan khusus.

Apabila sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusi, maka akan berimplikasi harus memenuhi kebutuhan belajar ABK, sehingga menuntut penyesuaian atau modifikasi mulai dari: (1) kurikulum (bahan ajar), karena khusus bagi peserta didik berkelainan dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa diperlukan persiapan program pendidikan atau pengajaran individual (PPI); (2) peran serta guru (tenaga kependidikan) untuk menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan; (3) sarana-prasarana yang meliputi sarana khusus dan prasarana khusus disesuaikan dengan masing-masing jenis ABK; (4) serta lingkungan, tidak hanya lingkungan sekolah namun juga melibatkan masyarakat. Jadi keberhasilan belajar ABK dipengaruhi oleh iklim belajar dan pergaulan yang kondusif. Suasana kondusif tersebut akan tercapai apabila kondisi di sekolah menunjukkan kesiapan komponen di atas.

F. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesiapan sekolah dalam implementasi pendidikan anak berkebutuhan khusus di kelas IV B SD Negeri 1 Trirenggo dilihat dari aspek kurikulum?
2. Bagaimana tingkat kesiapan sekolah dalam implementasi pendidikan anak berkebutuhan khusus di kelas IV B SD Negeri 1 Trirenggo dilihat dari aspek tenaga pendidik?

3. Bagaimana tingkat kesiapan sekolah dalam implementasi pendidikan anak berkebutuhan khusus di kelas IV B SD Negeri 1 Tirenggo dilihat dari aspek sarana-prasarana?
4. Bagaimana tingkat kesiapan sekolah dalam implementasi pendidikan anak berkebutuhan khusus di kelas IV B SD Negeri 1 Tirenggo dilihat dari aspek lingkungan?

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitaian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong (2007: 9) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif ini digunakan dengan maksud mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna. Penelitian ini tidak menekankan pada generalisasi.

Jika digolongkan berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk pada penelitian deskriptif. Suharsimi Arikunto (2007: 234) berpendapat penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai tingkat kesiapan sekolah dalam implementasi pendidikan anak berkebutuhan khusus di kelas IV B SD Negeri Trirenggo 1 Bantul secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan anak berkebutuhan khusus pada kelas IV B di SD tersebut.

B. Setting Penelitian

Penelitian mengenai tingkat kesiapan sekolah dalam implementasi pendidikan anak berkebutuhan khusus ini dilakukan di kelas IV B SD Negeri Trirenggo 1 Yogyakarta. Kegiatan ini dimulai sejak disahkannya proposal penelitian serta surat izin penelitian.

C. Obyek dan Subjek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pendidikan anak berkebutuhan khusus di kelas IV B SD Negeri 1 Trirenggo. Hal ini berdasarkan pendapat dari Spradley (Sugiyono, 2010: 297-298) menyatakan bahwa objek penelitian kualitatif berupa situasi sosial, tidak menggunakan istilah populasi. Situasi sosial tersebut terdiri atas tempat, pelaku, dan aktivitas. Objek penelitian digunakan untuk menentukan subyek penelitian. Subjek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang darinya diperoleh keterangan.

Menurut Andi Prastowo (2012: 195), subjek penelitian kualitatif adalah informan. Sementara itu, informan menurut Lexy J. Moleong (2007: 132) diartikan sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan kondisi latar penelitian. Informan bertugas memberikan pandangan dari segi orang dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian tersebut. Dalam menentukan sampel sumber data, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*. Snowball sampling menurut Sugiyono (2010:300) merupakan teknik pengambilan sampel sumber data, yang awalnya sedikit, lama-lama

menjadi besar. Hal ini dilakukan agar data yang didapat menjadi semakin lengkap, sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penelitian ini mengambil subjek atau sampel sumber datanya adalah Kepala Sekolah, guru, dan siswa kelas IV B SD Negeri 1 Tirirenggo.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Sugiyono (2010: 309) dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara (*interview*), kuisisoner (angket), dokumentasi, dan gabungan keempatnya. Dari berbagai macam teknik pengumpulan data tersebut, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Observasi secara langsung dilaksanakan di SD Negeri 1 Tirirenggo. Pengambilan data dengan teknik observasi bertujuan untuk mengambil data secara langsung dari obyek yang akan diteliti. Menggunakan teknik observasi dapat menjadi acuan peneliti untuk mendeskripsikan obyek yang akan diteliti. Djam'an Satori dan Aan Komariah (2011:105) mendefinisikan teknik observasi sebagai pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung

maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.

Ada dua macam observasi dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, yaitu *participant observation* atau observasi berperan serta dan *non participant observation* atau observasi non partisipan (Sugiyono, 2010: 204). Selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh sumber data dan hanya sebagai pengamat independen. Peneliti mencatat, menganalisis, dan membuat kesimpulan tentang tingkat kesiapan sekolah dalam implementasi pendidikan anak berkebutuhan khusus di kelas IV B SD Negeri 1 Tirirenggo Bantul. Sedangkan dari segi instrumentasi, peneliti menggunakan observasi terstruktur karena observasi telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang diamati, kapan dan dimana tempatnya.

2. Metode Wawancara

Menurut Haris Herdiansyah (2015:31), wawancara merupakan sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses

memahami. Dengan adanya *trust/* kepercayaan tersebut diharapkan terciptanya suatu keabsahan suatu data. Djamar Satori dan Aan Komariah (2011:130) menjelaskan teknik wawancara dalam suatu pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara yang dilakukan kepada nara sumber diharapkan mendapatkan data langsung dari sumber utama penelitian. Di dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang terlibat langsung dalam kesiapan pelaksanaan pendidikan inklusi di kelas IV B SD Negeri 1 Trirenggo.

Esterberg (Sugiyono, 2010: 233) mengemukakan beberapa macam wawancara, yakni wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur karena wawancara ini termasuk dalam kategori *in-depth interview*, di mana pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Jenis wawancara ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka sehingga peneliti dapat memperluas atau menambah pertanyaan di luar pedoman wawancara agar pendapat dan permasalahan-permasalahan yang dialami responden dapat terungkap. Sasaran wawancara dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, guru, dan juga peserta didik.

3. Metode Dokumentasi

Informasi mengenai data yang diperlukan dalam penelitian selain bersumber dari observasi dan wawancara, peneliti juga menggunakan dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2007: 231). Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data dokumentasi dari dokumen-dokumen yang berupa data siswa ABK, notulen pertemuan dengan wali murid, undangan untuk tim ahli yang dihadirkan di sekolah, daftar hadir guru dalam pelatihan, serta rekaman media pembelajaran untuk melatih motorik halus ABK yang ada di SD Negeri 1 Trirenggo Bantul.

E. Instrumen Penelitaian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri sebagai instrument. Sugiyono (2010: 307) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan alat bantu pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memudahkan mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Pedoman observasi dirancang sebagai pedoman mengobservasi pelaksanaan pendidikan anak berkebutuhan khusus di kelas IV B SD Negeri 1 Tirirenggo. Pedoman wawancara digunakan sebagai pedoman untuk melakukan wawancara langsung kepada nara sumber, yaitu Kepala Sekolah, guru, dan beberapa murid. Adapun pedoman observasi dan wawancara peneliti merancang sebagai berikut.

1. Lembar Observasi

Lembar observasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan pendidikan anak berkebutuhan khusus di kelas IV B SD Negeri 1 Tirirenggo. Lembar observasi ini disusun berdasarkan pedoman observasi yang diambil dari kajian pustaka. Observasi ini dilakukan terhadap bangunan fisik yang ada, sarana-prasaran inklusi, dan proses belajar-mengajar yang dilakukan oleh guru. Adapun pedoman observasi terlampir.

2. Lembar Wawancara

Wawancara bertujuan untuk memperoleh data melalui tanya jawab secara langsung. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan pada Kepala Sekolah, guru kelas, GPK, dan juga siswa untuk mengetahui bagaimana tingkat kesiapan implementasi pendidikan anak berkebutuhan khusus di kelas IV B SD Negeri 1 Tirirenggo. Adapun pedoman wawancara disusun berdasarkan kisi-kisi wawancara yang diambil dari kajian pustaka.

Adapun kisi-kisi instrumen penelitian tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.1. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

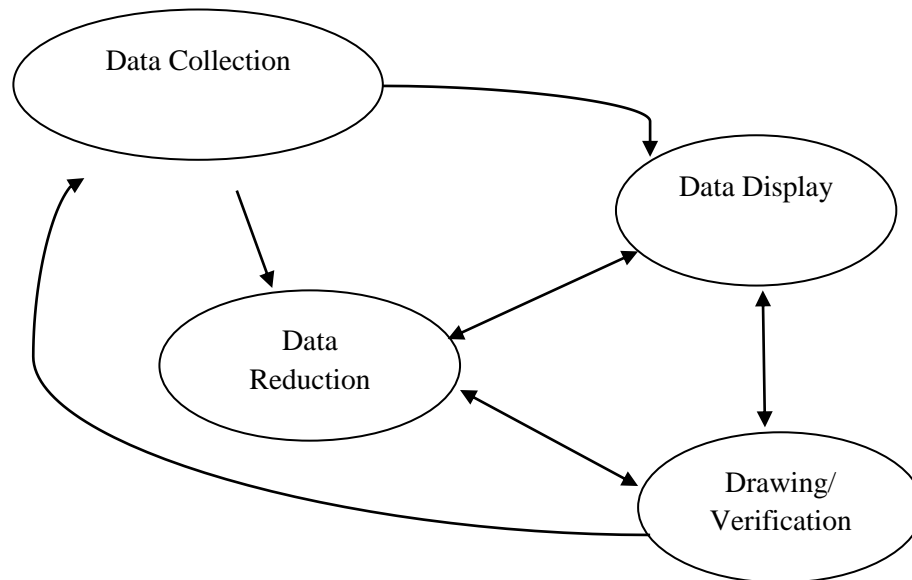
Aspek	Indikator	Teknik Pengumpulan Data					
		Observasi	Wawancara				Dokumentasi
			Kepala Sekolah	Guru	GPK	Siswa	
Kurikulum	a. Mengikuti proses pengembangan PPI		√	√	√		
	b. Membentuk tim pengembang PPI		√	√	√		
	c. Melaksanakan pengembangan PPI		√	√	√		
	d. Melakukan modifikasi kurikulum dan isi materi		√	√	√		
	e. Mengatur pemberian layanan		√	√	√		
	f. Merencanakan waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi		√	√	√		
	g. Memiliki model atau format PPI		√	√	√		√
Tenaga Pendidik	a. Kompetensi teknis	√	√	√	√	√	
	b. Kompetensi kolaboratif		√	√	√		
Sarana-Prasarana	a. Pengadaan sarana-prasarana khusus	√	√	√	√	√	√
	b. Pengelolaan sarana-prasarana		√	√	√		√
Lingkungan Masyarakat	a. Mengadakan pertemuan		√	√	√		√
	b. Mengirim hasil laporan belajar		√	√	√		
	c. Melakukan kunjungan lapangan		√	√	√		
	d. Melibatkan anggota keluarga	√	√	√	√	√	
	e. Mengundang ahli		√	√	√		√

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah didapatkan peneliti tidak dapat langsung dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian, tetapi data tersebut haruslah dianalisis terlebih dahulu. Analisis data dimaksudkan agar data yang dilaporkan merupakan data-data yang benar sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen (Lexy J. Moleong, 2007: 248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Maka dari itulah suatu data perlu dianalisis dahulu sebelum dilaporkan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif membutuhkan langkah dan teknik yang jelas, karena data yang dihasilkan dari berupa kata-kata. Sehingga dalam analisis data penelitian kualitatif juga membutuhkan kecermatan dan ketepatan. Analisis data yang digunakan peneliti di dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010: 337) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Adapun model interaktif dalam analisis data digambarkan seperti di bawah ini:



Gambar 2. Komponen dalam Analisis Data
(*Interactive Model*)

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak dibutuhkan (Sugiyono, 2010:338). Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan di lapangan dengan cara mengambil data yang diperlukan dan sesuai dengan tujuan penelitian, serta membuang data yang dianggap tidak diperlukan. Dengan demikian, adanya reduksi data akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yaitu penyusunan sekelompok informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan penelitian secara sistematis.

3. Penarikan Kesimpulan (*Data Drawing/ Verification*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap menjadi jelas setelah diteliti, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, dan hipotesis/teori (Sugiyono, 2010: 345).

Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan dapat disesuaikan dengan rumusan masalah atau bahkan berkembang sesuai dengan data yang telah diperoleh dan dianalisis. Dengan demikian, data yang telah disajikan dipilih yang penting saja, kemudian dibuat kategori tertentu.

G. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* atau validitas internal, *transferability* atau validitas eksternal, *dependability* atau reliabilitas, dan *confirmability* atau objektivitas (Sugiyono, 2010: 270). Uji keabsahan yang dilakukan peneliti adalah uji

kredibilitas. Dalam menguji kredibilitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber yaitu Kepala Sekolah, guru kelas, GPK, dan siswa. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jika ketiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut pada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Lokasi Sekolah

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Tirenggo yang beralamat di Klembon, Tirenggo, Bantul, Yogyakarta. SD Negeri 1 Tirenggo merupakan SD hasil *regrouping* antara SD Klembon dan SD Tanubayan pada tahun 2007 dan diubah namanya menjadi SD Negeri 1 Tirenggo agar tidak menimbulkan rasa iri di antara kedua sekolah tersebut. Saat awal *regrouping*, bangunan SD Tanubayan masih digunakan sebagai Unit 2 SD Negeri 1 Tirenggo. Namun karena koordinasi dan pengawasan yang dilakukan di dua tempat yang berbeda, mengakibatkan kurang maksimal sehingga kegiatan pembelajaran difokuskan di Unit 1 dan Unit 2 digunakan sebagai tempat olahraga dan penyimpanan alat.

SD Negeri 1 Tirenggo saat ini dipimpin oleh Kepala Sekolah yang bernama Istiani Nurhasanah, M.Pd. Tenaga guru sebagai pengajar berjumlah 17 orang, terdiri dari 12 guru kelas, 1 guru agama islam, 2 guru olah raga, 1 guru krawitan, dan 1 guru batik. Sebelah barat SD Negeri 1 Tirenggo berbatasan dengan jalan perdesaan, sebelah utara berbatasan dengan jalan dan rumah warga, sebelah timur berbatasan dengan sungai, dan sebelah selatan berbatasan dengan puskesmas Tirenggo.

Secara umum, SD Negeri 1 Tirenggo memiliki keadaan fisik yang baik. Kondisi lingkungan SD Negeri 1 Tirenggo cukup aman dan tidak bising karena tidak terletak di tepi jalan utama. Meskipun terletak di daerah perdesaan dan berjarak kurang lebih 3 km dari kecamatan, sekolah ini memiliki fasilitas yang memadai, seperti mushola, ruang Kepala Sekolah, ruang guru, 12 ruang kelas, UKS, ruang kerawitan, ruang sumber inklusi, perpustakaan, kantin, dapur, kamar mandi, ruang penyimpanan alat, gudang, tempat parkir dan halaman yang cukup luas. Selain merupakan sekolah inklusi, SD Negeri 1 Tirenggo juga merupakan sekolah berbasis budaya, nominasi Sekolah Sehat tingkat provinsi dan dalam penilaian menuju sekolah Adiwiyata.

2. Visi, Misi dan Tujuan SD Negeri 1 Tirenggo

a. Visi

Terwujudnya insan yang berprestasi, berbasis budaya, berwawasan lingkungan berdasar iman dan taqwa.

b. Misi

1. Menanamkan nilai-nilai religius dalam setiap kegiatan sekolah untuk membentuk kepribadian peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki iman dan taqwa, berakhlak mulia berkarakter Indonesia.
2. Menanamkan dasar-dasar pengetahuan dan teknologi sebagai bekal untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi.

3. Mengoptimalkan proses pembelajaran aktif, kreatif, efektif, berwawasan lingkungan dan menyenangkan.
4. Membina prestasi seni budaya sesuai bakat, minat dan potensi sekolah.
5. Membina prestasi olah raga sesuai bakat, minat dan potensi sekolah.
6. Membina prestasi bidang keagamaan.
7. Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang berwawasan lingkungan sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa.
8. Membiasakan perilaku yang mencerminkan cinta lingkungan dan budi pekerti luhur dengan berpedoman pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terangkum dalam Pancasila.
9. Menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, ijo royo-royo dengan menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah, instansi terkait dan lingkungan masyarakat.
10. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

c. Tujuan

1. Meraih juara dalam lomba non akademik di tingkat kecamatan dan kabupaten
 - a. Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler tari, pramuka, drum band, krawitan, TPA, TIK, dan seni musik untuk anak-anak minimal 1 kali dalam satu minggu.

- b. Mengadakan pembinaan yang insentif kegiatan tari, pramuka, drum band, krawitan, TPA, TIK, dan seni musik
 - c. Mengadakan pembinaan sekolah sehat berwawasan lingkungan
 - 2. Pengembangan pendidikan karakter yaitu taqwa, jujur, bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan
 - a. Membudayakan Program 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) untuk semua warga sekolah.
 - b. Membudayakan berkomunikasi dengan bahasa jawa pada hari sabtu untuk semua warga sekolah.
 - c. Memberikan keteladanan dari Kepala Sekolah, guru dan karyawan
 - d. Membudayakan Jumat bersih
 - 3. Peningkatan pelayanan untuk anak didik baik yang ABK maupun Non ABK
 - a. Menyelenggarakan program keunggulan sekolah yaitu life skill (hidup mandiri, memelihara tanaman, menjaga kebersihan diri dan lingkungan dan mengolah sampah) bagi siswa kelas 4, 5 dan 6)
 - b. Memberikan layanan bimbingan dan konseling oleh masing-masing guru kelas.
 - c. Pengadaan sarana dan prasarana bagi terlaksananya pelayanan semua peserta didik

- d. Penguasaan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi.

B. Deskripsi Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, guru kelas IV B, GPK, dan siswa kelas IV B SD Negeri 1 Trirenggo. Kepala Sekolah yang dijadikan subjek penelitian adalah In, dan juga guru yang mengampu kelas IV B, antara lain guru kelas IV B, Am; guru Pendidikan Agama Islam, Sa; guru Pendidikan Olahraga, Id; dan guru Seni Batik An.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah kesiapan sekolah dalam pelaksanaan pendidikan anak berkebutuhan khusus di kelas IV B SD Negeri 1 Trirenggo Bantul Yogyakarta.

C. Deskripsi Data

1. Gambaran Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di kelas IV B Berdasarkan Aspek Kurikulum.

a. Proses Pengembangan PPI

Proses Pengembangan PPI meliputi tahap penjaringan dan identifikasi, rujukan, pertemuan tim rujukan, asesmen, dan pertemuan tim asesmen. Kepala Sekolah menuturkan tahap identifikasi ABK yang ada di SD Negeri 1 Trirenggo sebagai berikut.

In : “Biasanya orang tua ke sini bawa anak ABK, terus *tak* tanyani anake kebutuhan khusus *opo?* Kalo Dia belum tahu anake tak suruh mbawa ke sini. Jadi itu untuk identifikasi ya. Kan nanti sudah ada *tabele* identifikasi

untuk ABK. Dari ciri fisiknya atau yang lainnya. Kalau nanti dicurigai Dia berkebutuhan khusus baru kita lakukan asesmen.”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sekolah sudah melakukan tahap identifikasi awal, yaitu pada saat siswa dibawa mendaftar pertama kali ke sekolah. Pihak sekolah akan bertanya jawab dengan orang tua siswa mengenai kekhasan yang dimiliki anaknya, atau dapat juga dengan cara membawa anak tersebut ke sekolah agar dapat diidentifikasi secara langsung. Jawaban dari Kepala Sekolah diperkuat dengan jawaban guru Am (wawancara Rabu, 4 Mei 2016) berikut ini.

Am : “Iya. Sebelum mendaftarkan itu ada tim khusus yang melakukan penilaian dan observasi pada anak.”

Am menyatakan bahwa terdapat proses identifikasi awal sebelum anak diterima menjadi siswa. Identifikasi itu dilakukan oleh tim khusus terdiri dari guru yang telah ditunjuk oleh pihak sekolah. Guru Sa (wawancara Jumat, 13 Mei 2016) dan Id (wawancara 9 Mei 2016) juga memperkuat data bahwa terdapat proses identifikasi awal untuk siswa yang diduga/dilaporkan memiliki kebutuhan khusus.

Setelah dilakukan proses identifikasi, tahap selanjutnya dalam proses pengembangan PPI adalah asesmen pada siswa yang telah teridentifikasi memiliki kebutuhan khusus. Proses asesmen yang dilakukan oleh pihak sekolah dijelaskan oleh Kepala Sekolah saat wawancara pada tanggal 2 Mei 2016.

In : “Itu nanti yang melakukan asesmen dari pihak UNY. Soalnya kan instansi kita sudah MOU *dadi nek* misalnya

ada asesmen jadi kita kerjasamanya sama sana. Tapi kalo itu kolektif, kalo ada dana. Kalo tidak ada nanti mungkin orang tuanya tak suruh mandiri. Seperti kemaren kan kita sudah kolektif 40 anak terus tak asesmen. Tapi kok tiba-tiba datang lagi kesini, padahal habis ada asesmen berlalu. Ya udah tak anjurkan asesmen mandiri.”

Hasil wawancara Kepala Sekolah menyatakan bahwa terdapat proses asesmen untuk ABK. Asesmen tersebut dilakukan bekerjasama dengan pihak UNY ataupun secara mandiri oleh orang tua siswa. Asesmen yang dilakukan pihak UNY dilakukan secara kolektif. Sedangkan siswa yang belum mengikuti asesmen secara kolektif akan dianjurkan untuk melakukan asesmen mandiri.

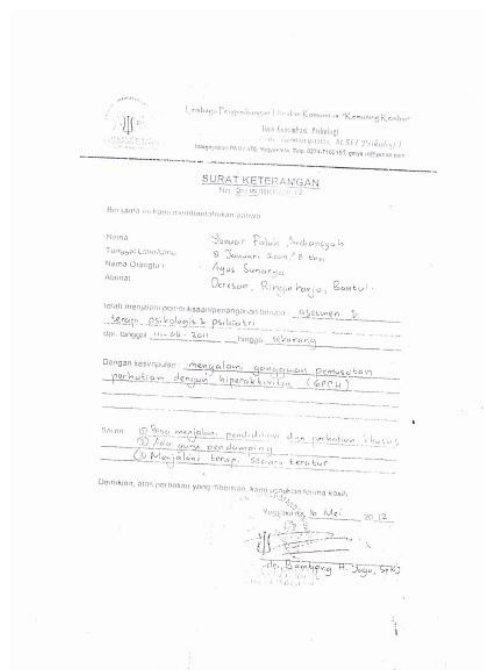
Saat diwawancara, guru An (wawancara 11 Mei 2016) dan Sa (wawancara 13 Mei 2016) pun menjawab dengan jawaban yang menguatkan jawaban Kepala Sekolah. Berikut penuturan guru.

An : “Sekolah ini sudah bekerjasama dengan pihak UNY kalo tidak salah. Jadi nanti ada tim dari UNY yang melakukan asesmen ke siswa. Dari siswa yang sudah diidentifikasi tadi kemudian dirujuk dan assesmennya dari UNY itu.”

Sa : “Assesmentnya nanti ya dari UNY. Kan kita bekerjasama dengan mereka.”

Guru An dan Sa keduanya juga menerangkan bahwa asesmen dilakukan bekerjasama dengan pihak UNY. Setelah terdapat anak yang telah diidentifikasi memiliki kebutuhan khusus kemudian akan diberikan rujukan, setelah itu baru diadakan asesmen.

Dari hasil dokumentasi yang ada, terdapat hasil asesmen yang telah dilakukan mandiri oleh orang tua siswa.



Gambar 3. Hasil Asesmen Mandiri ABK

Dari penjelasan Kepala Sekolah dan guru-guru, serta hasil dokumentasi yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa sekolah telah melaksanakan program penjarangan dan identifikasi peserta didik ABK.

b. Membentuk tim pengembang PPI

Setelah terjaring ABK di sekolah, menuntut pihak sekolah untuk membentuk tim yang dapat menangani masalah peserta didik secara individual, yang nantinya dapat membuat acuan pengembangan PPI untuk siswa. Terkait pembentukan tim PPI dijelaskan Kepala Sekolah dalam wawancara 2 Mei 2016 sebagai berikut.

In : “Sekarang PPI masih dalam proses. Kemarin sudah dirumuskan, diprogramkan, tetapi kemudian per Januari kemarin GPKnya ditarik ke provinsi, soalnya Bu Mn tadi kan diperbantukan disini dari provinsi. Jadi kita nggak punya GPK. Cuma ada GPK mandiri. Sedangkan GPK

mandirinya kan punya kesibukan masing-masing, dan mereka kan juga nggak terikat dengan pihak sekolah. Jadi ya kita tidak bisa menuntut mereka membuat PPInya.”

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa PPI di SD Negeri 1 Trirenggo sedang dalam proses pemrograman, dikarenakan saat ini tidak ada GPK yang mengampu siswa secara keseluruhan. GPK yang terdapat di SD 1 Trirenggo merupakan GPK yang diperbantukan dari Dinas Provinsi, dan per Januari 2016 GPK tersebut ditarik lagi oleh provinsi. Sehingga di sekolah hanya ada GPK mandiri yang tanpa ada ikatan apapun dengan pihak sekolah.

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah tersebut didukung pula oleh jawaban guru Am sebagai berikut.

Am : “Sepertinya belum ada. Soalnya PPI untuk tiap siswa juga belum ada.”

Dari jawaban guru Am diketahui bahwa SD Negeri 1 Trirenggo belum memiliki tim pengembang PPI, dan dampaknya pun belum adanya PPI untuk setiap siswa berkebutuhan. An (wawancara 11 Mei 2016) juga menjelaskan hal yang serupa, tim pengembang PPI belumlah dibentuk, karena guru-guru masih banyak kesibukan lain. Sehingga PPI juga belum dibentuk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah dan guru, diketahui bahwa belum dimilikinya tim pengembang PPI di SD Negeri 1 Trirenggo, sehingga PPI juga belum dibentuk untuk setiap siswa berkebutuhan khusus.

c. Melaksanakan pengembangan PPI

Pengembangan PPI meliputi deskripsi tingkat kemampuan peserta didik, tujuan jangka panjang (umum) dan tujuan jangka pendek (khusus). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, pengembangan PPI yang ada di SD Negeri 1 Trirenggo adalah sebagai berikut.

In : “Secara umum sih disini PPI belum dibuat *Mbak*, kaya yang tak jelasin tadi, masih diproses programnya. Disini guru-guru juga belum tak wajibkan mbuat. Tapi ada guru yang sudah mbuat PPI itu ada *Mbak*. Bu An, kelas II A. PPI yang Dia buat ya seperti RPP itu. Nanti dibuat khusus persiswa berkebutuhan.”

Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah (wawancara 2 Mei 2016), untuk secara umum PPI masih belum ada karena program pembuatan masih dalam proses. Terlebih, guru-guru juga belum diwajibkan untuk membuat PPI. In menambahkan, akan tetapi ada guru kelas II A yang sudah mencoba untuk membuat contoh PPI untuk tiap siswa berkebutuhan.

Wujud pengembangan PPI yang ada di SD 1 Trirenggo juga telah dijelaskan guru melalui pertanyaan sebelumnya yang telah diajukan peneliti. Am (wawancara 4 Mei 2016) menjelaskan bahwa tim pengembang PPI belum dibuat, sehingga PPI untuk tiap siswa berkebutuhan juga belum ada. Begitu pula penjelasan dari guru An, An sebelumnya telah menjelaskan bahwa di SD Negeri 1 Trirenggo belumlah dibentuk tim pengembang PPI, sehingga PPI untuk tiap siswa berkebutuhan juga belum dibentuk.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Sekolah dengan guru, dapat disimpulkan bahwa di SD Negeri 1 Tirirenggo belumlah terdapat pengembangan PPI untuk setiap siswa berkebutuhan.

d. Melakukan modifikasi kurikulum dan isi materi

Dalam pendidikan inklusi, pembelajaran di kelas akan mengalami modifikasi pada kurikulumnya ataupun isi materi pembelajaran.

In : “Kalau selama ini kan masih dalam proses perintisan, memberdayaan guru kelas menjadi guru pendamping khusus itu juga sudah kita tempuh. Pelatihan membuat RPP yang modifikasi itu juga sudah kita tempuh. Tetapi guru-guru itu bisanya baru memberikan sampel-sampelnya saja. Jadi tidak secara keseluruhan. Kan ya tugas bebannya sudah banyak. Dan lagi kan tidak semua anak membutuhkan itu, kan hanya anak-anak tertentu to *Mbak*. Misalnya *sing* tunarungu ringan *yo* mungkin hanya dalam hal tertentu. Jadi tidak semuanya modifikasi. Selama *IQ*nya masih bisa menjangkau, masih bisa mengikuti kurikulum yang normal. Dia ya memakai yang normal, tapi kalau Dia sudah di bawah standar, misalnya ada tuna grahita ringan, lha itu baru ada modifikasi. Kalo *slow leaner* kita saja istilahnya masih perbaikan. Diperbanyak diperbaiki dan pengayaan. Kalau yang CI kan kebetulan belum ada, kalo CI kan banyak di pengayaannya.”

Dalam wawancara tersebut (2 Mei 2016), Kepala Sekolah menyatakan tidak semua siswa ABK memerlukan adanya modifikasi kurikulum maupun isi materi. Hanya siswa-siswa tertentu dan dalam materi tertentu saja, tidak pada semua materi akan diberikan modifikasi. Modifikasi misal saja dilakukan pada tuna grahita ringan, sedangkan untuk *slow leaner* terdapat program remidi/perbaikan, dan untuk anak CI terdapat program pengayaan. Saat ini pula, di SD Negeri 1 Tirirenggo sedang dalam proses perintisan pemberdayaan

guru kelas menjadi guru pendamping khusus, sehingga guru-guru kelas mendapatkan pelatihan dalam pemodifikasian kurikulum dan pembelajarannya.

Guru Id (wawancara 9 Mei 2016) mengungkapkan bahwa modifikasi yang dilakukan tergantung dengan kebutuhan khusus yang dimiliki oleh siswa. Saat awal siswa bersekolah sudah terdapat identifikasi untuk mengetahui kekhususan siswa, sehingga nantinya modifikasi kurikulum maupun isi materi disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Sa (13 Mei 2016) menjelaskan bahwa modifikasi untuk ABK berupa pengurangan beban pelajaran. Jika siswa normal harus mengerjakan 10 soal, maka siswa ABK akan mengerjakan 5 soal saja. Namun nilainya sudah seperti 10 soal. Am (wawancara 4 Mei 2016) juga menuturkan bahwa kurikulumnya masih sama seperti siswa reguler. Hanya saja terdapat pengurangan beban belajar. Misal saja untuk anak autis yang ada di kelas IV B, beban belajar yang terima masih seperti untuk anak kelas 2.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah dan guru, diketahui bahwa modifikasi kurikulum dan isi materi yang dilakukan akan disesuaikan dengan kebutuhan siswa sesuai dengan hasil identifikasi dan asesmen yang telah dilakukan. Modifikasi yang ada berupa pengurangan beban belajar. Namun, tidak semua siswa ABK memerlukan adanya modifikasi, apabila dirasa IQnya masih bisa menjangkau, maka pelajaran akan disamakan dengan siswa normal.

e. Mampu mengatur pemberian layanan

Hal yang harus diperhatikan dalam aspek kurikulum selanjutnya adalah terkait pemberian layanan untuk ABK.

In : “Kalo dulu itu kan ada GPK. Jadi nanti GPK sama guru kelas yang memberi bantuan. Tapi sekarang GPK sudah kosong. Dulu pas ada GPK, hari Senin itu untuk yang ABK secara klasikal. Terus Jumatnya untuk ABK yang *slow leaner*, yang masih sulit calistung itu.”

“Jadi sekarang sini statusnya tanpa GPK yang milik sekolah?”

“Heeh, yang dari provinsi sudah nggak ada. Baru mulai Januari kemarin. *Nek* sebelumnya itu masih ada. Lha itu kan SKnya setiap tahun selalu diperbaharui. Memang provinsi itu mentargetkan, karena kan sebenarnya GPK itu bukan kewenangannya provinsi. GPK itu kan seharusnya yang ngangkat kota/kabupaten *Mbak*, jadi provinsi itu kan sebenarnya cuma membantu *to*, memfasilitasi. Tapi suatu ketika pasti semuanya itu ditarik.”

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Sekolah (2 Mei 2016) layanan yang diberikan untuk ABK secara khusus diberikan oleh GPK. Layanan tersebut diberikan dalam satu minggunya sebanyak dua kali, yaitu tiap hari Senin dan hari Jumat. Hari Senin dikhususkan untuk ABK secara klasikal, dan hari Jumat untuk siswa *slow leaner* yang masih kesulitan dalam hal calistung (baca tulis hitung). Akan tetapi, mulai bulan Januari tahun 2016 ini GPK yang merupakan bantuan dari pemerintah provinsi tersebut ditarik kembali oleh untuk dilakukannya rotasi, namun SD Negeri 1 Tirenggo belum mendapatkan bantuan GPK lagi. Surat Keputusan rotasi tersebut biasanya akan diperbaharui setiap tahunnya.

Sa : “Nanti di ruang khusus diadakan pembelajaran keterampilan.”

“Siapakah yang memberikan pembelajaran ketrampilan tersebut?”

“Dulu ada GPK *Mbak*, tapi karena sekarang GPK sudah pindah ya sementara kosong, atau nanti guru kelas membimbing tapi di kelas.”

Wawancara dengan guru Sa (13 Mei 2016) menjelaskan bahwa pemberian layanan dilakukan dengan cara memberikan pelatihan keterampilan untuk ABK oleh GPK. Pelatihan tersebut biasanya dilakukan di ruang khusus. Akan tetapi, saat ini posisi GPK sedang kosong, sehingga pembelajaran keterampilan dilakukan oleh guru kelas di dalam kelas masing-masing. Am (wawancara 4 Mei 2016) menyatakan bahwa saat ini pemberian layanan untuk ABK masih dirasa kurang maksimal. Hal tersebut dikarenakan GPK baru saja dimutasi, sehingga GPK yang menangani semua murid sedang kosong, sedangkan guru kelas juga tidak bisa fokus dengan ABK dan ABK juga tidak bisa disamakan dengan siswa reguler. An (wawancara 11 Mei 2016) menuturkan bahwa pemberian layanan dilakukan dengan cara memberikan pendampingan dan penjelasan sampai siswa jelas, hampir dua sampai tiga kali. Hingga kadang siswa yang normal materinya sudah selesai, namun untuk ABK belum selesai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah dan guru, diperoleh data bahwa pelaksanaan pemberian layanan diberikan oleh GPK setiap minggunya sebanyak dua kali. Akan tetapi saat ini GPK yang merupakan bantuan dari pemerintah provinsi SKnya sudah berakhir dan pindah dari SD Negeri 1 Tirenggo, sehingga posisi GPK

sedang kosong. Pemberian layanan sementara ini diberikan oleh guru kelas masing-masing, namun pemberian layanan dirasa tetap kurang maksimal dikarenakan guru kelas tidak bisa hanya terfokus pada ABK. Pemberian layanan tersebut dapat berupa dilakukannya pembelajaran keterampilan maupun pendampingan dan penjelasan hingga siswa ABK menjadi paham.

f. Merencanakan waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi

Waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi merupakan bagian dari PPI untuk siswa. Berikut pernyataan Kepala Sekolah terkait waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi yang ada di SD Negeri 1 Tirenggo Bantul.

In : “Itu nanti masuknya di PPI itu bukan ya *Mbak*? Kalau untuk anak reguler waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi itu sepertinya di RPP kan. Kalo RPP yang biasa itu semua guru sudah mbuat. Tapi kalau RPP yang khusus untuk ABK itu belum ada. Kaya yang tak jelasin tadi itu. Jadi ya sementara untuk ABK nya mengikuti yang anak reguler. Walaupun prakteknya ya nggak bisa disamakan. Terutama kriteria evaluasinya itu.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah (2 Mei 2016), waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi untuk ABK belum dibuat secara terpisah dengan anak reguler, karena waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi nantinya menjadi bagian dari PPI. Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya, Kepala Sekolah menyatakan bahwa untuk ABK di SD Negeri 1 Tirenggo belum memiliki PPI untuk tiap anak. Untuk ABK yang ada saat ini masih mengikuti waktu

pelaksanaan dan kriteria evaluasi sama seperti anak reguler, meskipun pada kenyataan pelaksanaannya tidak akan bisa untuk disamakan.

Hasil wawancara dengan Sa (wawancara 13 Mei 2016) juga mendukung pernyataan Kepala Sekolah. Sa menyatakan bahwa untuk ABK pada dasarnya waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi berbeda dengan anak reguler dan tidak bisa disamakan. Akan tetapi sekolah belum membuat waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi khusus untuk ABK, sehingga secara administratif masih disamakan dengan anak reguler, tapi praktek di lapangan biasanya kriteria evaluasi akan diturunkan dari pada anak reguler. Begitu juga Am wali kelas kelas IV B. Saat di wawancara, Am menjelaskan bahwa untuk ABK biasanya waktu pelaksanaan evaluasinya bersamaan dengan anak reguler, tapi kriteria evaluasinya yang dibedakan. Kalau anak reguler mengerjakan 10 soal, ABK biasanya hanya setengah dari tugas anak reguler.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah dan guru, dapat disimpulkan bahwa waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi untuk ABK secara administratif masih disamakan dengan anak reguler. Namun untuk pelaksanaannya ABK memiliki kriteria evaluasi tersendiri.

g. Memiliki model atau format PPI

Dalam pembelajaran ABK, guru akan berpedoman dengan PPI yang ada. Adanya model atau format PPI telah dijelaskan Kepala Sekolah saat wawancara pada 2 Mei 2016 sebagai berikut:

In : “Kalo contoh-contoh format sih sudah ada, yang dari UNY itu. Tinggal gurunya itu bagaimana *le* membuat.

Dalam wawancara tersebut Kepala Sekolah menjelaskan bahwa sekolah telah memiliki contoh format PPI yang berasal dari UNY. Sehingga nantinya GPK maupun guru kelas tinggal mengembangkan sesuai dengan contoh dan kebutuhan siswa. Begitu juga yang diungkapkan oleh guru Sa (wawancara 13 Mei 2016) sebagai berikut.

Sa : “Sudah ada. Dulu dari diklat, terus guru membuat.”

Sa menjelaskan bahwa sekolah sudah memiliki format PPI yang berasal dari diklat. Kemudian guru bertugas untuk membuat PPI dari contoh format yang ada. An (wawancara 11 Mei 2016) dan juga Id (wawancara 9 Mei 2016) juga menjelaskan hal yang serupa, yaitu sekolah telah memiliki format PPI.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah dan guru, dapat disimpulkan bahwa sekolah sudah memiliki format PPI yang berasal dari diklat yang diberikan pihak UNY. Kemudian guru-guru bertugas untuk membuat PPI dari contoh format yang telah ada.

2. Gambaran Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di kelas IV B Berdasarkan Aspek Tenaga Pendidik

Tugas tenaga pendidik antara lain adalah menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan

atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Kompetensi yang perlu dikuasai oleh guru bagi anak berkebutuhan khusus ialah kompetensi teknis dan kompetensi kolaboratif. Berikut penjabaran hasil penelitian yang dilakukan peneliti.

a. Kompetensi teknis

Kompetensi teknis guru salah satunya berkaitan dengan pemahaman berbagai teori tentang anak berkebutuhan khusus. Berikut penjelasan Kepala Sekolah mengenai teori tentang anak berkebutuhan khusus.

In : “*Nek* sepengetahuan saya itu berarti sekolah umum, tetapi di situ melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dalam hal ini anak-anak yang dilayani itu yang sifatnya ringan. Punya kebutuhan khusus yang tarafnya masih ringan, jadi bisa dibaurkan dengan anak-anak yang umum. Manakala ada anak-anak yang berkebutuhan khusus tapi sudah berat atau sedang itu seharusnya di SLB, supaya penanganannya lebih maksimal. Di sekolah ini pun kalo diketahui anak tidak bisa mengikuti ya dirujuk ke SLB.

“Lalu apakah ibu mengetahui beberapa contoh faktor yang menyebabkan anak itu menjadi berkebutuhan khusus?”

“Biasanya sih hereditas ya *Mbak*, keturunan. Kemudian pola pikir orang tua ketika anak dalam masa kandungan. Kemudian ya pola asuh, itu juga mempengaruhi. Kalo orang tua terlalu keras pada anak ya anak bakalan memberontak, jadi depresi dan potensinya bisa hilang.”

Berdasarkan wawancara tersebut, Kepala Sekolah menjelaskan bahwa sekolah inklusi merupakan sekolah umum yang juga melayani anak-anak berkebutuhan khusus, namun masih dalam taraf berkebutuhan khusus yang ringan. Anak-anak tersebut nantinya akan

dibaurkan dengan siswa normal lainnya. Apabila nantinya ada siswa yang berkebutuhan khususnya sudah berat maka akan dirujuk ke SLB. Kepala Sekolah juga dapat menjelaskan terkait beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak menjadi berkebutuhan diantaranya adalah faktor hereditas, pikir orang tua ketika anak dalam masa kandungan, dan juga pola asuh.

Beberapa guru lain juga dapat mengungkapkan hal serupa terkait teori mengenai anak berkebutuhan khusus. Misal saja guru Id (wawancara 9 Mei 2016) yang menyatakan bahwa pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang memadukan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal. Sedangkan guru Sa (wawancara 13 Mei 2016) menyatakan bahwa pendidikan inklusi merupakan pendidikan dimana sekolah melaksanakan pendidikan terpadu untuk siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus.

Terkait faktor yang dapat menyebabkan seorang anak menjadi berkebutuhan khusus, guru Id mengungkapkan terdapat tiga faktor yang dapat menyebabkannya, yaitu faktor keturunan, lingkungan, dan juga faktor eksternal misal saja kecelakaan. Guru Sa juga dapat mengungkapkan beberapa faktor yang dapat menyebabkan seorang anak menjadi berkebutuhan khusus, yaitu dikarenakan faktor keturunan, faktor kesehatan, dan juga faktor lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Kepala Sekolah dan guru sudah dapat menjelaskan teori anak berkebutuhan khusus terkait

pendidikan inklusi dan juga penyebab seorang anak menjadi berkebutuhan khusus.

Selain kemampuan memahami teori tentang anak berkebutuhan khusus, kompetensi teknis juga diamati berdasarkan keterlibatan dalam penjaringan, penyusunan program identifikasi, asesmen, dan pembelajaran ABK. Berikut penuturan Kepala Sekolah terkait keterlibatan dalam penjaringan, penyusunan program identifikasi, asesmen, dan pembelajaran ABK..

In : “Lha kan disini Kepala Sekolah berperan menjadi penanggung jawab *Mbak*, jadi nanti kalo anak dicurigai berkebutuhan khusus langsung direferensikan. Tidak mereka putuskan sendiri, tapi saya yang memutuskan. Jadi kalau untuk penjaringannya saya ikut. Kalau untuk penyusunan program identifikasi sama asesmen itu udah ada dari UNY itu. Kalau pembelajaran kan nanti guru kelas yang melakukan, tapi kadang saya nanti sok ikut masuk di kelas. Sering-seringnya itu kelas enam tapinya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Kepala Sekolah mempunyai peran sebagai penanggung jawab. Saat penerimaan siswa baru, Kepala Sekolah yang memiliki wewenang memutuskan siswa yang akan mengikuti identifikasi ABK. Sehingga Kepala Sekolah terlibat dalam proses penjaringan siswa berkebutuhan khusus. Untuk proses penyusunan program identifikasi dan asesmen, Kepala Sekolah belum sepenuhnya terlibat langsung, dikarenakan proses tersebut dilakukan bekerjasama dengan pihak UNY. Sedangkan untuk program pembelajaran ABK, pelaksanaan langsung di kelas adalah guru kelas. Kepala Sekolah hanya kadang-kadang saja masuk ke

dalam kelas untuk memberikah pendampingan, terutama di kelas enam.

Sementara itu Am (wawancara 4 Mei 2016) menjelaskan bahwa belum terlibat langsung dalam penjaringan, dikarenakan dalam proses penjaringan diperlukan keterampilan khusus. Sedang dalam pembelajaran ABK, Am sudah terlibat langsung, sebagai guru kelas yang mengampu pembelajaran di dalam kelas. Id (wawancara 9 Mei 2016) menjelaskan bahwa bentuk keterlibatan dalam program penjaringan yang pernah dilakukan adalah menyediakan data ABK dan juga mengkoordinasi ABK sebelum proses pengidentifikasian dan asesmen. Akan tetapi untuk proses asesmen akan dilakukan oleh pihak UNY, sehingga Id belum mengikuti proses tersebut. Id menambahkan, untuk pembelajaran ABK Id sudah terlibat langsung, yaitu saat memberikan pendampingan dalam kegiatan belajar-mengajar di kelas maupun di luar kelas.

Kompetensi teknis guru juga dapat dilihat berdasarkan keikutsertaan dalam pelatihan penanganan ABK. Berikut penjelasan Kepala Sekolah terkait keikutsertaan dalam pelatihan mengenai ABK.

In : “Pernah *Mbak*, yang terakhir kemarin di Tangerang, sebelumnya lagi itu di Bandung. Kalau di provinsi saya biasanya malah *didadekne* narasumber. *Dadi nek* pelatihan nang provinsi aku malah wis ra *dimelokke*, *biasane malah nang* luar Jogja. Dulu awal-awal di SKB, baru setelah itu di Bandung sama Tangerang itu.

Dalam wawancara pada 2 Mei 2016, Kepala Sekolah menjelaskan bahwa telah beberapa kali mengikuti pelatihan terkait

ABK. Pelatihan yang beliau ikuti terakhir kalinya adalah di Tangerang, dan sebelumnya lagi di Bandung. Untuk pelatihan dalam tingkat provinsi biasanya malah bertindak sebagai narasumber. Sa (wawancara 13 Mei 2016) menjelaskan bahwa telah mengikuti beberapa kali pelatihan yang dilaksanakan di sekolah. Semua guru yang ada diminta untuk mengikuti. Beberapa pelatihan yang sudah pernah diikuti yaitu pelatihan dari UNY dan juga pelatihan dari karinakas. Guru Am (wawancara 4 Mei 2016) juga menuturkan hal serupa, bahwa telah dua kali mengikuti pelatihan yaitu pelatihan dari PLB UNY, dan juga pelatihan dari karinakas. Semuanya dilaksanakan di sekolah.

Kompetensi teknis guru juga nampak berdasarkan kemampuannya mengajar di kelas. Berdasarkan observasi yang dilakukan selama penelitian, guru di kelas IV B sudah menerapkan beberapa metode pembelajaran yang inovatif. Misalkan saja saat pengamatan pertama, pada materi menghitung rusuk bangun ruang, Am mengajak siswa untuk membuat jaring-jaring kubus, sehingga mempermudah siswa untuk memvisualkan bangun datar. Selain hal tersebut, guru juga telah mampu memberikan bantuan khusus pada ABK saat pelajaran. Misalnya saja saat pengamatan ke IV, An mendatangi Rz saat sedang mengerjakan tugas yang diberikannya. An menyuruh Rz untuk mengerjakan tugas dengan hati-hati dan telaten, serta menanyakan apabila ada kesulitan dan akan membantunya.

Kompetensi teknis yang nampak dalam pembelajaran selain hal tersebut adalah kemampuan guru memberikan motivasi pada ABK. Misal saja pada pertemuan IV, An berkata pada Dm, bahwa teman-temannya yang lain sudah mengerjakan tugas sampai jauh. Hal ini dimaksudkan agar Dm memiliki motivasi segera menyusul teman-temannya dalam hal mengerjakan tugas yang diberikan. Selain dari menggunakan berbagai metode pembelajaran yang inovatif, memberi bantuan khusus pada ABK dan memberikan motivasi pada ABK, guru juga memberikan beberapa intervensi strategi saat pembelajaran pada anak. Beberapa diantaranya adalah strategi pemantauan kesalahan, tes lisan, *note talking*, dan juga *listening*.

Selain dari observasi di kelas, kemampuan guru menyampaikan materi pelajaran juga dijelaskan oleh beberapa siswa, sebagai berikut:

- Ed : “Gampang kok Mbak. Soalnya Pak Am kalo *njelasin sampe* paham.”
Gp : “*Nek* matika *kae sok angel. Lha* aku *ora iso*.”
Dn : “Dulu sih kadang sulit Mbak, tapi setelah banyak memperhatikan jadine gampang.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran yang diberikan, penjelasan yang diberikan selama pembelajaran sudah mudah dimengerti oleh siswa, atau apabila siswa mengalami kesulitan dalam pemahaman, guru akan mengulang materi tersebut kembali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, guru, dan siswa, serta hasil observasi di dalam kelas, beberapa kompetensi

teknis yang nampak ialah adanya pemahaman mengenai teori ABK terkait pendidikan inklusi dan faktor penyebab seorang anak menjadi ABK. Selain itu, terlihat dari tenaga pendidik yang telah beberapa kali mengikuti pelatihan mengenai ABK dalam skala nasional hingga tingkat sekolah, penggunaan berbagai metode pembelajaran yang inovatif, pemberian bantuan khusus pada ABK, pemberian motivasi pada ABK, serta penggunaan beberapa intervensi strategi khusus saat pembelajaran.

b. Kompetensi kolaboratif

Adanya kompetensi kolaboratif dimaksudkan untuk dapat terjalinnya hubungan kerjasama dengan semua orang terkait dengan upaya memberikan bantuan kepada anak berkebutuhan khusus. Berikut beberapa wujud penjalinan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh pihak sekolah.

In : “Pertemuan khusus dengan wali murid biasanya sebulan sekali. Biasanya diawal bulan di minggu pertama, tapi nek kemaren ki pertemuan terakhir pas hari Sabtu tanggal 16. Itu saya ada fotonya.”

Dalam wawancara pada 2 Mei 2016, Kepala Sekolah menjelaskan bahwa terdapat pertemuan khusus antara pihak sekolah dengan wali murid ABK. Pertemuan tersebut biasanya dilakukan satu bulan satu kali, pada minggu pertama. Untuk bulan April kemarin, pertemuan dilaksanakan pada tanggal 16. Id (wawancara 9 Mei 2016) menjelaskan bahwa pernah mengikuti pertemuan dengan wali murid. Akan tetapi intensitasnya tidak sering. Beliau menambahkan, jika

sekolah melakukan pertemuan rutin satu bulan satu kali, akan tetapi biasanya bersamaan dengan jam mengajar sehingga tidak dapat mengikuti pertemuan jika bersamaan dengan jam mengajarnya.

Sa (wawancara 13 Mei 2016) juga menyatakan hal yang serupa. Bahwasannya sekolah sudah rutin melaksanakan pertemuan dengan wali murid ABK setiap bulannya sekali. Akan tetapi Sa tidak dapat untuk selalu mengikuti pertemuan tersebut. Jika tidak berbenturan dengan jam mengajar ataupun keperluan lainnya, Sa baru dapat mengikuti pertemuan tersebut.

Berdasarkan pernyataan tersebut, pihak sekolah sudah mewujudkan adanya penjalinan hubungan dengan pihak wali murid ABK setiap bulannya rutin satu bulan sekali. Akan tetapi tidak semua guru dapat mengikuti pertemuan tersebut karena berbenturan dengan jam mengajar ataupun kepentingan lainnya.

Pertemuan dengan wali murid yang dilaksanakan oleh pihak sekolah selain melaui wawancara juga dibuktikan dengan adanya daokumentasi yang dilakukan peneliti. Dalam dokumentasi tersebut, guru-guru mengikuti pertemuan rutin dengan wali murid yang telah diadakan oleh pihak sekolah.



Gambar 4. Pertemuan Guru dengan Wali Murid

Selain mengikuti pertemuan dengan wali murid ABK., kompetensi kolaboratif juga nampak dari kemampuan bekerjasama dengan GPK membantu ABK dalam pembelajaran. Berikut penuturan Kepala Sekolah terkait kerjasama yang dilakukan bersama dengan GPK.

In : “Itukan sebenarnya sejak awal masuk, Dia itu tugasnya mengkoordinir guru kelas. Dia yang seharusnya tugasnya mentransfer ilmu yang sudah Dia dapat kepada guru-guru kelas. Demikian juga nanti guru-guru kelas menyampaikan kesulitannya. Disitukan ada *forum group discussion* antara guru kelas dan GPK. Jadi nggak gek GPK menangani semua. Kalau wujud kerjasama saya sama GPK dalam pembelajaran di kelas belum secara langsung, soalnya kan saya juga nggak sering-sering ikut pembelajaran di kelas. Tapi kalau kerjasama secara umumnya ya sok tanya jawab terkait penanganan ABK. Terus juga dalam menghadirkan tim ahli pas pertemuan itu sering musyawarah bareng. Kalau GPK kan koneksi tentang hal-hal yang berkaitan sama ABK biasanya kan banyak.”

Dalam wawancara tersebut, Kepala Sekolah menjelaskan bahwa GPK sejak awal ada di sekolah bertugas untuk mengkoordinir guru-guru kelas dalam penanganan ABK, serta mentransfer ilmu terkait penanganan ABK yang telah GPK miliki kepada guru kelas. Timbal

balik yang diberikan guru kelas yaitu jika ada kesulitan selama penanganan ABK, guru kelas dapat meminta solusi kepada GPK yang ada, baik secara langsung maupun melalui *forum group discussion* antara semua guru kelas dan juga GPK. Kepala Sekolah menambahkan, dalam pembelajaran belum dapat bekerjasama secara langsung dengan GPK dikarenakan tidak sering mengikuti pembelajaran di dalam kelas bersama dengan GPK. Kerjasama yang telah beberapa kali dilakukan bersama GPK melalui tanya jawab terkait permasalahan ABK yang ada di sekolah, dan juga *sharing* terkait tim ahli yang akan dihadirkan dalam pertemuan dengan wali murid ABK.

Am (wawancara 4 Mei 2016) menambahkan, kerjasama yang dilakukan bersama GPK yaitu pendampingan belajar pada saat pembelajaran di kelas. Pada hari-hari tertentu GPK sekolah maupun GPK mandiri siswa akan membantu memberikan pendampingan pada anak-anak, sehingga akan ada kerjasama antara guru kelas dengan GPK. Selain itu, kerjasama dalam hal lain yang dilakuakn adalah dengan saling berkonsultasi cara penanganan permasalahan ABK yang ada. Sa (wawancara 13 Mei 2016) menambahkan, kerjasama yang pernah dilakukannya secara langsung dengan GPK dalam pembelajaran yaitu dengan menanyakan cara penanganan untuk anak tuna wicara. Sa mengalami kesulitan untuk penyampaian materi terhadap anak tuna wicara, karena anak tersebut sulit menangkap

materi yang disampaikan secara lisan, akan tetapi Sa kesulitan untuk menggunakan bahasa isyarat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah dan guru, dapat disimpulkan bahwa tenaga pendidik yang ada telah melakukan kerjasama dengan GPK secara langsung maupun tidak langsung dalam pembelajaran. Kerjasama secara langsung dalam pembelajaran yang pernah dilakukan adalah melalui pendampingan belajar di dalam kelas, serta tanya jawab permasalahan dan solusi terkait ABK.

Dari pemaparan di atas, telah nampak beberapa kompetensi kolaboratif yang mampu dilakukan oleh tenaga pendidik. Beberapa diantaranya adalah mengikuti pertemuan khusus dengan wali murid ABK dan juga kerjasama yang dilakukan dengan GPK secara langsung dan tidak langsung dalam pembelajaran ABK.

3. Gambaran Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di kelas IV B Berdasarkan Aspek Sarana-Prasarana

a. Pengadaan sarana-prasarana khusus

Dengan adanya sarana-prasarana yang sesuai dengan fungsional dan kebutuhan siswa, akan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi. Terkait pengadaan sarana-prasarana di SD Negeri 1 Tirirenggo telah dijelaskan Kepala Sekolah (wawancara 2 Mei 2016) sebagai berikut.

In : “Ya sebenarnya baru sekitar 60% lah. Karena saya masih merencanakan memiliki meDia pembelajaran edukatif untuk

para ABK, agar bisa memotivasi anak. Kalo saya rasa untuk anak tuna daksa sudah mencukupi. Sudah ada prengsengan, *hand dreel*, ada toilet khusus ABK, alat terapi jalan itu juga ada, kemudian media pembelajaran untuk motorik halusnya sudah ada.

Menurut penjelasan Kepala Sekolah, sarana-prasarana yang ada baru sekitar 60% yang dapat mencukupi kebutuhan siswa ABK. Sekolah masih mengusahakan adanya media pembelajaran edukatif untuk ABK agar semakin termotivasi dalam belajarnya. Akan tetapi untuk anak tuna daksa sarana-prasarana yang ada telah dirasa mencukupi kebutuhan siswa. Terdapat beberapa sarana-prasarana khusus misalnya prengsengan, *hand dreel*, toilet khusus ABK, alat terapi jalan, serta media pembelajaran untuk motorik ABK.

Pendapat pendukung dikemukakan oleh guru-guru lain. Berikut penuturan guru.

- Id : “Kalau menurut saya sudah. Soalnya tingkat kebutuhan khusus anak kan tidak terlalu kompleks juga. Kan ada pegangan tangan, kamar mandi ABK, terapi jalan juga ada. Diruang inklusi itu ada bundaran terus bisa buat jalan itu lho.”
- Sa : “Ya ada, walau belum lengkap. Tapi ya secara umum kalau dilihat dari jenis ABK yang ada ya sudah lumayan. Ada toilet ABK, alat bantu jalan itu. Terus jalan yang naik kalau untuk anak yang pakai kursi roda itu juga ada. Di dekat kantin itu juga ada alat terapi jalan, yang batu *dijejer-jejer* itu lho *Mbak*.”

Id (wawancara 9 Mei 2016) berpendapat bahwa sarana-prasaran yang ada disekolah sudah dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan ABK, dikarenakan kebutuhan khusus yang dimiliki anak tidak begitu kompleks. Sehingga tidak begitu memerlukan sarana-prasarana yang khusus. Untuk ABK telah ada pegangan tangan yang terdapat di

sekitar sekolah yang dapat membantu akses jalan ABK, kamar mandi ABK, dan juga alat terapi jalan.

Sementara guru Sa (wawancara 13 Mei 2016) mengemukakan bahwa meskipun sarana-prasaran yang ada belum sepenuhnya lengkap, namun secara umum sudah dapat untuk mencukupi kebutuhan ABK yang ada. Terdapat toilet khusus untuk ABK, alat bantu jalan, jalan yang disetting naik untuk mempermudah akses anak yang memakai kursi roda, dan juga alat terapi jalan. Guru Am (wawancara 4 Mei 2016) juga menambahkan bahwa sekolah juga menyediakan kursi roda yang telah dimodifikasi untuk siswa yang memiliki kekhususan tuna daksa.

Dari pendapat Kepala Sekolah dan guru-guru menunjukkan bahwa meskipun ketersediaan sarana-prasaran yang ada di SD Negeri 1 Tirirenggo belum lengkap, namun secara umum sudah dapat untuk mencukupi kebutuhan ABK yang ada. Hal ini dikarenakan kekhususan ABK yang ada tidak begitu kompleks. Sudah ada beberapa sarana-prasarana yang ada di sekolah seperti toilet ABK, alat bantu jalan, alat terapi jalan, media pembelajaran untuk motorik halus.

Beberapa siswa yang peneliti wawancara juga menjawab dengan pernyataan yang mendukung pertanyaan Kepala Sekolah dan guru mengenai ketersediaan sarana-prasaran khusus. Jawaban siswa diantaranya sebagai berikut.

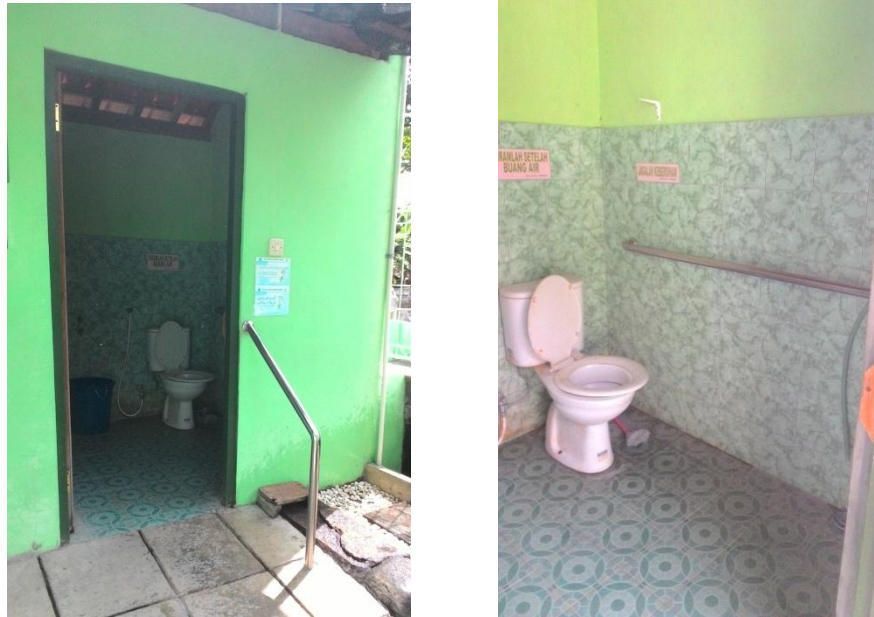
Ed : “Sudah *Mbak*. Itu ada toilet yang untuk siswa berkebutuhan juga.”

Bt : “*Uis Mbak.*”

Dn : “Sudah *Mbak.* Ada kamar mandi khusus sama yang dipinggir-pinggir sekolah itu, untuk membantu jalan yang kesulitan jalan.”

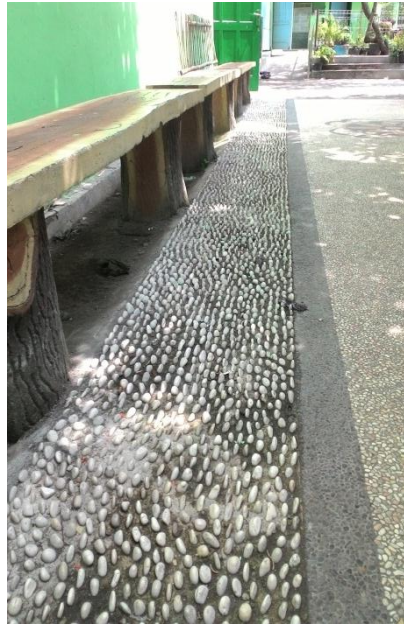
Jawaban siswa Ed (wawancara 2 Mei 2016) menjelaskan bahwa sarana-prasarana khusus sudah mencukupi sesuai kebutuhan siswa. Misalnya saja ada toilet khusus untuk ABK. Siswa Bt (wawancara 6 Mei 2016) juga menjelaskan bahwa sarana-prasarana khusus sudah mencukupi sesuai kebutuhan siswa. Dn (wawancara 5 Mei 2016) juga menjelaskan bahwa telah ada kamar mandi khusus untuk ABK dan juga terdapat alat bantu jalan yang terdapat di pinggir sekolah yang digunakan untuk siswa yang membutuhkan alat bantu jalan.

Hasil wawancara diperkuat dengan hasil observasi peneliti selama penelitian berlangsung berkaitan dengan ketersediaan sarana-prasarana khusus yang ada di SD Negeri 1 Tirirenggo. Di pojok barat laut dan tenggara sekolah terdapat toilet yang mendukung aksesibilitas ABK. Sebelum pintu masuk dan di dalam toilet terdapat pegangan yang dapat membantu ABK.



Gambar 5. Toilet Khusus ABK

Di sisi utara sekolah juga terdapat alat terapi jalan yang dapat dipergunakan siswa untuk menerapi motorik kasarnya. Di beberapa sudut sekolah juga terdapat *hand dreel* sebagai alai bantu jalan siswa, dan juga terdapat jalan yang disetting naik untuk membantu siswa yang memakai kursi roda. Di ruang sumber inklusi juga terdapat alat untuk melatih motorik halus untuk siswa. Beberapa diantaranya adalah miniatur binatang, puzzles "*Learn words spelling and Arithmetic*", balok susun, papan angka dari kayu, dll.



Gambar 6. Alat Terapi Jalan untuk ABK



Gambar 7. *Hand dreel*/alat bantu jalan



Gambar 8. Media Melatih Motorik Halus

Selain berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti juga mendapatkan dokumen terkait daftar media untuk melatih motorik halus yang terdapat di ruang sumber inklusi. Dalam dokumen tersebut dijelaskan terdapat beberapa media antara lain, miniatur binatang,

boneka upin ipin dan kawan-kawan, boneka tangan, puzzel, balok susun, ronce, stempel, pensil warna, dll

No	NAMA ALAT	JUMLAH	FUNGSI	ALAT	KELOMPOK	PETUNJUK
1.	Mengukur, mengukur	1 set	Mengukur, mengukur, dan lain-lain	Set	Set	Set
2.	Benda ipin, ipin dan kawan-kawan	1 set	Melatih kemampuan motorik halus, menggambar, dan lain-lain	Melatih motorik halus / menggambar	Melatih motorik halus / menggambar	Melatih motorik halus / menggambar
3.	Benda tangan	1 set	Melatih kemampuan motorik halus, menggambar, dan lain-lain	Melatih motorik halus / menggambar	Melatih motorik halus / menggambar	Melatih motorik halus / menggambar
4.	Benda tangan, ipin, dan kawan-kawan	1 set	Melatih kemampuan motorik halus, menggambar, dan lain-lain	Melatih motorik halus / menggambar	Melatih motorik halus / menggambar	Melatih motorik halus / menggambar
5.	Benda tangan, ipin, dan kawan-kawan	1 set	Melatih kemampuan motorik halus, menggambar, dan lain-lain	Melatih motorik halus / menggambar	Melatih motorik halus / menggambar	Melatih motorik halus / menggambar
6.	Benda tangan, ipin, dan kawan-kawan	1 set	Melatih kemampuan motorik halus, menggambar, dan lain-lain	Melatih motorik halus / menggambar	Melatih motorik halus / menggambar	Melatih motorik halus / menggambar
7.	Benda tangan, ipin, dan kawan-kawan	1 set	Melatih kemampuan motorik halus, menggambar, dan lain-lain	Melatih motorik halus / menggambar	Melatih motorik halus / menggambar	Melatih motorik halus / menggambar
8.	Benda tangan, ipin, dan kawan-kawan	1 set	Melatih kemampuan motorik halus, menggambar, dan lain-lain	Melatih motorik halus / menggambar	Melatih motorik halus / menggambar	Melatih motorik halus / menggambar
9.	Benda tangan, ipin, dan kawan-kawan	1 set	Melatih kemampuan motorik halus, menggambar, dan lain-lain	Melatih motorik halus / menggambar	Melatih motorik halus / menggambar	Melatih motorik halus / menggambar
10.	Benda tangan, ipin, dan kawan-kawan	1 set	Melatih kemampuan motorik halus, menggambar, dan lain-lain	Melatih motorik halus / menggambar	Melatih motorik halus / menggambar	Melatih motorik halus / menggambar
11.	Benda tangan, ipin, dan kawan-kawan	1 set	Melatih kemampuan motorik halus, menggambar, dan lain-lain	Melatih motorik halus / menggambar	Melatih motorik halus / menggambar	Melatih motorik halus / menggambar
12.	Benda tangan, ipin, dan kawan-kawan	1 set	Melatih kemampuan motorik halus, menggambar, dan lain-lain	Melatih motorik halus / menggambar	Melatih motorik halus / menggambar	Melatih motorik halus / menggambar
13.	Benda tangan, ipin, dan kawan-kawan	1 set	Melatih kemampuan motorik halus, menggambar, dan lain-lain	Melatih motorik halus / menggambar	Melatih motorik halus / menggambar	Melatih motorik halus / menggambar
14.	Benda tangan, ipin, dan kawan-kawan	1 set	Melatih kemampuan motorik halus, menggambar, dan lain-lain	Melatih motorik halus / menggambar	Melatih motorik halus / menggambar	Melatih motorik halus / menggambar
15.	Benda tangan, ipin, dan kawan-kawan	1 set	Melatih kemampuan motorik halus, menggambar, dan lain-lain	Melatih motorik halus / menggambar	Melatih motorik halus / menggambar	Melatih motorik halus / menggambar

Gambar 9. Dokumen data media untuk melatih motorik halus

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti, meskipun sarana-prasarana yang ada belum kesemuanya sesuai dengan kebutuhan berbagai kekhasan ABK, namun untuk SD Negeri 1 Tirirenggo sarana-prasarana yang ada sudah mencukupi sesuai kebutuhan kekhususan ABK yang ada.

b. Pengelolaan sarana-prasarana

Pengadaan sarana-prasarana yang lengkap hendaknya juga diiringi dengan pengelolaan sarana-prasarana yang baik. Sehingga diperlukan suatu *treatment* khusus dalam pengelolaan tersebut. Dalam pengelolaannya, sekolah kemudian memberikan pengarahan penggunaan sarana-prasarana yang ada untuk memenuhi kebutuhan siswa.

In : “Dulu pas peresmian sini menjadi sekolah model pendidikan berbasis budaya dan sekolah model pendidikan inklusi, terus pas itu kita sekalian *launching* kelas terapi. Sekalian mengundang

bupatinya *Mbak*, terus Kapolsek Bantul, Kepala Dinas Dikpora DIY, dan Kepala Dinas Pendidikan Dasar. Nah disitu dijelaskan ke anak-anak sama tamu-tamu termasuk orang tua siswanya guna kelas terapi. Kalau sarana prasarana lainnya misal yang toilet khusus sama *hand dreel* itu le *njelaske pas* sudah jadi alatnya. Waktu upacara itu biasane. Biar semua anak pada tahu. Kan alat-alat itu jadine juga nggak barengan, bertahap. Menjelaskan ke anak-anak juga bertahap cara penggunaannya. Kalau untuk sarana dan prasarana yang ada di ruang sumber itu, ya kaya media untuk melatih motorik halus itu ada di bawah tanggung jawab GPKnya, jadi nanti kalau siswa akan menggunakan biasanya akan dibawah pengawasan GPK. Tapi karena saat ini GPK lagi kosong, tanggung jawabnya ada di guru olahraga apa guru kelas.”

In menjelaskan (wawancara 2 Mei 2016) dalam pengelolaannya, agar siswa dapat menggunakan sarana prasarana yang ada dengan maksimal terdapat pengarahan yang diberikan. Pengarahan tersebut diberikan sewaktu sarana prasarana yang baru telah selesai pengadaan/pembuatannya. Misal sajatoilet khusus ABK, *hand dreel* ataupun alat bantu jalan untuk ABK. Pengarahan tersebut dilakukan sewaktu upacara bendera, sehingga semua anak bisa mengetahuinya secara langsung. Selain itu, pengarahan penggunaan sarana prasaran juga dilakukan pihak sekolah sewaktu peresmian SD Negeri 1 Tlirenggo menjadi sekolah model pendidikan berbasis budaya dan sekolah model pendidikan inklusi. Dalam peresmian tersebut, pihak sekolah sekaligus *launching* kelas terapi. Saat peresmian tersebut, sekolah juga mengundang Bupati Bantul dan juga wali murid siswa. Sedangkan untuk sarana dan prasarana yang ada di ruang sumber inklusi, pengelolaannya menjadi tanggung jawab dari GPK. Namun karena

saat ini posisi GPK masih kosong, maka sarana dan prasarana di ruang sumber menjadi tanggung jawab guru penjaskes maupun guru kelas.

Pernyataan Kepala Sekolah tersebut sesuai dengan pernyataan Am. Am (wawancara 4 Mei 2016) menjelaskan bahwa pengarahan penggunaan sarana-prasaran dilakukan saat sarana prasarana yang belum ada sebelumnya baru ada di sekolah. Hal tersebut akan dilakukan saat siswa-siswa mengikuti upacara bendera di sekolah ataupun akan diselipkan oleh guru kelas saat mengajar di kelas. Guru An (wawancara 11 Mei 2016) menambahkan jawaban Am, pengarahan penggunaan sarana prasaranan akan dilakukan guru kelas maupun GPK yang ada saat mengajar.

Dari hasil dokumentasi yang dilakukan peneliti, peneliti juga mendapatkan dokumen saat Bupati Bantul meresmikan SD Negeri 1 Tirenggo menjadi sekolah model pendidikan berbasis budaya dan sekolah model pendidikan inklusi, sekaligus *launching* kelas terapi yang dilakukan pada 9 Mei 2015.



Gambar 10. Bupati Bantul Meresmikan SD Negeri 1 Tirenggo sebagai Sekolah Inklusi

Berdasarkan wawancara dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa hal yang dilakukan sekolah dalam rangka mengarahkan penggunaan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan cara memberikan sosialisasi pada saat siswa melakukan upacara bendera maupun saat pembelajaran di kelas oleh guru kelas maupun GPK. Selain itu sosialisasi juga dilakukan pihak sekolah saat peresmian SD Negeri 1 Tirirenggo menjadi sekolah model pendidikan berbasis budaya dan sekolah model pendidikan inklusi, dimana pihak sekolah sekaligus *launcing* kelas terapi. Selain sosialisasi diberikan kepada siswa, sosialisasi juga diberikan kepada warga sekitar, orang tua siswa dan juga dinas-dinas terkait termasuk Bupati Bantul, Kapolsek Bantul, Kepala Dinas Dikpora DIY, dan Kepala Dinas Pendidikan Dasar. pada waktu itu.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai siasat sekolah dalam mengatasi keterbatasan sarana-prasarana. Kepala Sekolah (wawancara 2 Mei 2016) menyatakan bahwa untuk menyiasati keterbatasan sarana-prasarana yang ada, sekolah membuat proposal ke dikpora. Setelah proposal tersebut disetujui dan dana yang diminta cair, dana tersebut dipergunakan untuk membangun toilet ABK. Pernyataan Kepala Sekolah tersebut sesuai petikan wawancara berikut.

In : “Dulu pernah pihak sekolah membuat proposal ke Dikpora. Alhamdulillah juga turun itu. Terus itu untuk *mbangun* kamar mandi itu *Mbak*.”

Sementara itu, pernyataan dari guru lain juga mendukung jawaban dari Kepala Sekolah.

Am : “Beberapa waktu lalu itu pihak sekolah mengajukan proposal untuk beberapa instansi. Salah satunya itu yang turun dari dikpora dan karinakas. Lalu itu untuk membangun toilet khusus.”

An : “Dulu pernah mbuat proposal gitu *Mbak*. Kerjasama sama lembaga apa itu juga pernah. Tapi lupa mana. *Ning* ke dikpora juga itu *kayake*.”

Am (wawancara 4 Mei 2016) menjelaskan bahwa untuk menyiasati keterbatasan sarana-prasaran yang ada, pihak sekolah membuat proposal ke beberapa instansi. Beberapa proposal yang mendapatkan pembiayaan adalah dari dikpora dan karinakas. Dari dana yang turun tersebut Kemudian untuk membangun toilet khusus.

An (wawancara 11 Mei 2016) juga menjelaskan hal yang sama, yaitu dengan cara sekolah membuat proposal yang ditujukan salah satunya kepada dikpora.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Sekolah dengan guru dapat disimpulkan bahwa dalam mensiasati keterbatasan sarana-prasarana, sekolah menyiasatinya dengan cara mengajukan proposal kepada dikpora maupun lembaga karinakas. Dana yang turun tersebut Kemudian dipergunakan untuk membangaun toilet khusus ABK dan sarana-prasarana lain.

4. Gambaran Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di kelas IV B Berdasarkan Aspek Lingkungan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan guna mencapai keberhasilan pendidikan. Beberapa cara yang dapat dipergunakan untuk bekerjasama dengan masyarakat agar implementasi pendidikan inklusi dapat berjalan antara lain:

a. Mengadakan pertemuan

Salah satu program sekolah sebagai wujud pengimplementasian pendidikan inklusi lain adalah adanya pertemuan antara orang tua siswa ABK dengan tim ahli. Hal ini telah dijelaskan oleh Kepala Sekolah dalam wawancara tanggal 2 Mei 2016 sebagai berikut.

In : “Ya yang tadi itu *Mbak*. Ada setiap bulan sekali.”

Dalam wawancara tersebut, Kepala Sekolah menjelaskan bahwa terdapat pertemuan rutin antara orang tua siswa ABK dengan tim dari pihak sekolah terkait ABK. Pertemuan tersebut rutin dilakukan satu bulan sekali.

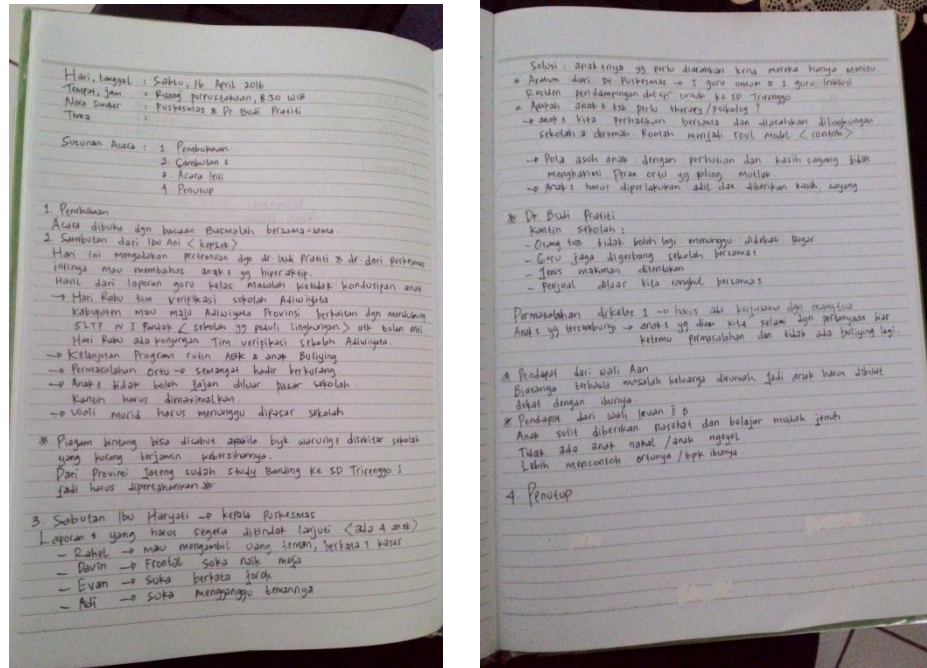
Penjelasan dari Kepala Sekolah tersebut didukung juga oleh penjelasan dari guru Sa saat wawancara 13 Mei 2016 sebagai berikut.

Sa : “Ada, pas didatangkan tim ahli tadi. Biasanya satu bulan sekali itu pasti ada.”

Sa menyatakan, bahwa terdapat pertemuan rutin yang dilakukan orang tua wali. Pertemuan tersebut dilakukan sebanyak satu bulan satu

kali, dan akan menghadirkan tim ahli yang akan membahas mengenai ABK. Id (wawancara 9 Mei 2016) juga menjelaskan bahwa terdapat pertemuan wali yang dilakukan satu bulan satu kali. Dalam pertemuan tersebut akan membahas mengenai kendala yang ada dalam pelaksanaan pendidikan ABK, dan cara penanganan masalah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara Kepala Sekolah dan guru, dapat disimpulkan bahwa tiap satu bulan satu kali terdapat pertemuan wali murid ABK. Dalam pertemuan tersebut akan menghadirkan tim ahli yang berkaitan dengan ABK, serta membahas kendala yang ada dalam pelaksanaan pendidikan inklusi dan cara penanganan masalah tersebut.

Dari hasil dokumentasi notulen yang ada, diketahui pada tanggal 16 April 2016, sekolah juga telah melaksanakan pertemuan rutin dengan orang tua siswa guna membicarakan perkembangan siswa. Dalam pertemuan tersebut terdapat beberapa hal yang dibahas antara lain terkait anak hiperaktif, kelanjutan program rutin ABK & *bullying*. Berikut dokumentasi notulen pertemuan antara pihak sekolah dan orang tua siswa berkebutuhan khusus.



Gambar 11. Notulen Hasil Pertemuan dengan Orang Tua

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa SD Negeri 1 Trirenggo telah mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua siswa berkebutuhan khusus satu bulan satu kali. Pertemuan tersebut akan menghadirkan tim ahli yang berkaitan dengan ABK, serta untuk membahas berbagai permasalahan dan penanganan terkait ABK, dan juga sebagai wujud peningkatan keberhasilan implementasi pendidikan inklusi.

b. Mengirim hasil laporan belajar

Hasil belajar merupakan hasil pencapaian studi anak yang didapatkannya selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Kepala Sekolah (wawancara 2 Mei 2016) menuturkan pengiriman hasil laporan belajar pada orang tua siswa sebagai berikut.

In : “Iya, waktu pertemuan itu juga ada. Nanti orang tua dikasih tau juga perkembangan anaknya bagaimana, termasuk nilai

dan perilakunya di sekolah. Tapi kalau yang lebih rinci lagi nanti itu diberikan waktu akhir semester.”

Berdasarkan penuturan Kepala Sekolah tersebut, pengiriman hasil belajar dilakukan sewaktu pertemuan rutin dengan orang tua siswa maupun saat akhir semester. Saat pertemuan dengan orang tua siswa, guru akan memberikan nilai dan pertimbangan yang dimiliki oleh siswa. Akan tetapi, untuk perkembangan nilai secara rinci akan diberikan sewaktu akhir semester.

Pernyataan Kepala Sekolah tersebut sesuai dengan pernyataan Am (wawancara 4 Mei 2016). Am menyatakan bahwa guru akan mengkomunikasikan hasil belajar siswa sewaktu tengah semester maupun saat setelah siswa melakukan ulangan harian. Sa (wawancara 13 Mei 2016) juga menambahkan bahwa pengkomunikasian hasil belajar siswa akan diberikan sewaktu pertemuan rutin yang diadakan oleh pihak sekolah.

Sesuai pernyataan Kepala Sekolah dan juga guru, dapat disimpulkan bahwa pengkomunikasian hasil belajar anak yang dilakukan oleh SD Negeri 1 Tirirenggo adalah sewaktu rapat rutin antara pihak sekolah dan orang tua wali, setelah anak mengikuti ulangan harian, maupun saat akhir semester.

c. Melakukan kunjungan lapangan

Kunjungan lapangan dimaksudkan untuk melaksanakan tukar pikiran antara pihak sekolah dengan lingkungan setempat maupun

orang tua. Adapun kunjungan lapangan yang pernah dilakukan pihak sekolah dijelaskan Kepala Sekolah sebagai berikut.

In : “*Home visit* itu sudah pernah. Ada anak tuna grahita ringan, tidak mau sekolah, itukan guru kelasnya sering mendatangi rumahnya. Lalu ada lagi mas Ar slow leaner, saya sendiri ikut turun kalau yang itu. Padahal pas *try out* itu nggak mau sekolah, mandi pun belum, bangunpun belum. Sering itu *Mbak*. Lalu kerumahnya An anak kelas IV B itu juga sering.”

Berdasarkan penuturan Kepala Sekolah, pihak sekolah telah beberapa kali turun langsung ke lapangan, untuk melakukan *home visit* ke rumah siswa. Biasanya home visit tersebut dilakukan apabila siswa sudah beberapa hari tidak datang ke sekolah, ataupun dilakukan pada siswa yang kurang memiliki motivasi untuk datang ke sekolah. An (wawancara 11 Mei 2016) juga menjelaskan hal yang sama. Dulu pernah ada siswa yang sering tidak berangkat ke sekolah, alasannya Dia takut dengan GPK nya, walaupun sebenarnya alasan Dia sering tidak berangkat adalah karena mentalnya yang lemah. An Kemudian sering berkunjung ke rumah anak tersebut, dan mencari kegemarannya, mengajaknya menggambar, mewarnai, serta memberikan hadiah agar anak tersebut mau berangkat sekolah lagi. Setelah ada pendekatan, akhirnya anak itu mau berangkat ke sekolah lagi. Sa (wawancara 13 Mei 2016) juga menceritakan hal yang sama. Pernah ada kejadian anak yang tidak mau berangkat ujian. Kemudian diadakan home visit ke rumah anak tersebut. Setelah diberikan pendekatan, akhirnya anak tersebut mau berangkat sekolah lagi.

Berdasarkan pernyataan Kepala Sekolah dan guru, dapat disimpulkan bahwa Kepala Sekolah maupun guru pernah melakukan kunjungan ke lapangan untuk bertukar gagasan dengan masyarakat agar terciptanya suatu perubahan yang positif dalam penerapan pendidikan inklusi.

d. Melibatkan anggota keluarga

Keterlibatan anggota keluarga juga akan menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi yang ada. Begitu pula yang dilakukan oleh SD Negeri 1 Trirenggo. Sekolah juga berusaha melibatkan anggota keluarga dalam pelaksanaan pendidikan inklusi yang ada. Hal ini sesuai dengan penjelasan Kepala Sekolah saat wawancara pada tanggal 2 Mei sebagai berikut.

In : “Tentunya iya *Mbak*. Kalo dari pihak sekolah ya misal saja mengundang wali murid untuk hadir di pertemuan rutin. Dan juga, kalau orang tua itu menyadari kekhususan anaknya disekolah, biasanya mereka akan menghadirkan GPK mandiri untuk mendampingi anak mereka. Tapi tidak sedikit juga orang tua yang menunggu anaknya di kelas.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah di atas, wujud partisipasi keterlibatan anggota keluarga dalam pendidikan untuk ABK antara lain dengan menghadiri pertemuan rutin yang diselenggarakan oleh pihak sekolah, menghadirkan GPK mandiri untuk anak mereka, maupun menunggu langsung anak mereka di kelas. Guru Sa juga menuturkan mengenai partisipasi keterlibatan orang tua dalam pendidikan untuk ABK seperti berikut ini.

Am : “Iya *Mbak*. Bentuk partisipasinyaya kaya tadi, menghadiri rapat wali terkait ABK. Dan juga pendampingan mandiri dari orang tua siswa saat di sekolah.”

Am (wawancara 4 Mei 2016) menjelaskan wujud partisipasi keterlibatan orang tua siswa berkebutuhan khusus dalam pendidikan ABK yaitu menghadiri pertemuan wali terkait ABK, dan memberikan pendampingan mandiri di sekolah. Sa (wawancara 13 Mei 2016) juga mengemukakan menunggui anak mereka di kelas, mendatangkan GPK mandiri, menghadiri pertemuan rutin, dan memeberikan pendanaan merupakan wujud partisipasi yang telah dilakukan oleh orang tua/ anggota keluarga siswa berkebutuhan khusus.

Hasil wawancara dengan guru diperoleh kesimpulan bahwa wujud partisipasi keterlibatan anggota keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi yaitu menunggui anak mereka di kelas, mendatangkan GPK mandiri, menghadiri pertemuan rutin, dan memeberikan pendanaan dalam pendidikan inklusi. Pernyataan tersebut didukung juga dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan siswa terkait pihak membantu dalam pembelajaran di kelas selain guru. Berikut jawaban siswa.

Gp : “Kadang dibantu Ibunya An, atau *Mbak* Siti itu.”

Fl : “*Sok Mbak Siti. Sok-sok yo Ibune An.*”

Dn : “Ada *Mbak* Siti dan Ibunya An.”

Gp (wawancara 3 Mei 2016) menjawab pihak yang membantunya dalam pembelajaran di kelas selain guru kelas adalah Ibu dari ABK An dan juga *Mbak* Siti, GPK mandiri dari siswa Fl. Fl

(wawancara 3 Mei 2016) juga menuturkan hal serupa bahwa pihak yang membantunya dalam pembelajaran di kelas selain guru kelas adalah Ibu dari ABK An dan juga *Mbak* Siti, GPK mandirinya. Hal serupa pun juga dikemukakan oleh Dn (wawancara 5 Mei 2016). Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat partisipasi dari orang tua siswa dengan cara menunggu langsung anak mereka di sekolah ataupun mendatangkan GPK mandiri untuk mendampingi anak mereka belajar di sekolah.

Hasil wawancara diperkuat pula dengan hasil observasi yang peneliti lakukan. Selama penelitian berlangsung, orang tua An setiap harinya selalu menunggu An di dalam kelas.



Gambar 12. Orang tua menunggu langsung anaknya di kelas

Selain melalui wawancara dan observasi, peneliti juga memperoleh data terkait partisipasi orang tua dalam pendidikan untuk ABK melalui dokumentasi. Dari hasil dokumentasi yang ada, nampak orang tua siswa ABK mengikuti rapat rutin yang diselenggarakan oleh pihak sekolah.



Gambar 13. Orang Tua Menghadiri Rapat Rutin di Sekolah

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa wujud partisipasi yang dilakukan oleh anggota keluarga dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di SD Negeri 1 Triirenggo yaitu, menghadiri pertemuan yang diadakan oleh pihak sekolah, menunggu langsung anak mereka di sekolah, mendatangkan GPK mandiri, maupun memberikan pendanaan dalam upaya peningkatan keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi di SD Negeri 1 Triirenggo.

e. Mengundang ahli

Cara lain yang dapat digunakan untuk bekerjasama dengan lingkungan adalah dengan mengundang ahli terkait ABK. SD Negeri 1 Triirenggo juga telah mengundang beberapa tim ahli terkait ABK guna meningkatkan kesiapan sekolah dalam pengimplementasian pendidikan inklusi. Kepala Sekolah menuturkan terkait kegiatan mengundang tim ahli sebagai berikut.

In : “Iya pernah *Mbak*. Dulu pernah dari DED, Dinamika Edukasi Dasar. Itu yang datang Ibu Nawak Santi. Kemudian dari Karinakas Indonesia itu. Dari Budi Mulia Dua itu juga, itu sekolah inklusi tapi yang sudah berpengalaman. Kemudian dari UGM juga, Bu dr. Pratiti.”

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa sekolah telah beberapa kali mengundang tim ahli untuk memberikan pengarahan kepada guru maupun orang tua siswa berkebutuhan khusus. Tim ahli yang pernah di undang ke sekolah antara lain dari Dinamika Edukasi Dasar, Karinakas Indonesia, dan juga dari UGM.

Jawaban Kepala Sekolah tersebut diperkuat dengan jawaban guru Id (wawancara 9 Mei 2016) berikut ini.

Id : “Iya pernah. Dari karina itu tahun kemarin. Dari UNY, dari puskesmas itu juga. Dokter pratiti dari UGM itu juga.”

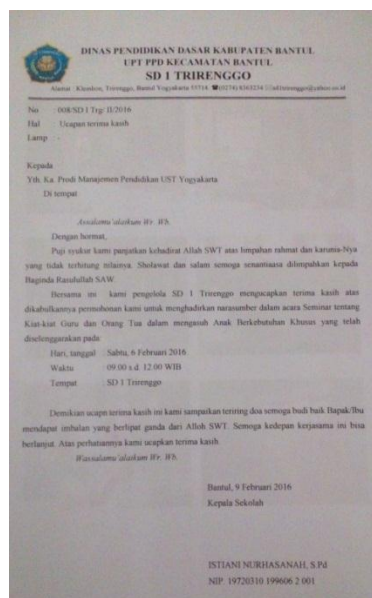
Id menyatakan bahwa terdapat beberapa tim ahli yang pernah diundang ke sekolah, antara lain dari karinakas, UNY, puskesmas, dan juga UGM. Guru Am (wawancara 4 Mei 2016) dan guru Sa (wawancara 12 Mei 2016) juga memperkuat data bahwa terdapat beberapa tim ahli yang pernah diundang ke sekolah, untuk memberikan sosialisasi maupun pelatihan terkait pelaksanaan pendidikan inklusi.

Hasil wawancara tersebut juga diperkuat dengan hasil dokumentasi yang dilakukan peneliti. Berikut hasil dokumentasi mengenai adanya tim ahli yang dihadirkan pihak sekolah, dalam pertemuan dengan orang tua siswa.



Gambar 14. Tim Ahli yang Datang Mengisi Pertemuan Dengan Orang Tua Siswa

Selain dokumentasi tersebut, peneliti juga mendapatkan dokumen surat ucapan terimakasih kepada Ka Prodi Manajemen Pendidikan UST Yogyakarta karena telah menjadi narasumber dalam acara seminar tentang “Kisi-Kisi Guru dan Orang Tua dalam Mengasuh Anak Berkebutuhan Khusus” yang diadakan oleh SD Negeri 1 Tlrenggo.



Gambar 15. Surat Ucapan Terimakasih untuk Narasumber

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa sekolah telah mendatangkan tim ahli untuk memberikan sosialisasi kepada orang tua maupun pihak sekolah dalam rangka pengimplementasian pendidikan anak berkebutuhan khusus di SD Negeri 1 Tirirenggo. Tim ahli yang pernah didatangkan oleh pihak sekolah antara lain dari Dinamika Edukasi Dasar, Karinakas Indonesia, tim dari UNY, tim dari UGM, UST dan juga puskesmas setempat.

D. Pembahasan

1. Tingkat Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di kelas IV B Berdasarkan Aspek Kurikulum.

a. Mengikuti Proses Pengembangan PPI

Sebelum PPI dibuat, sekolah terlebih dahulu harus mengikuti proses pengembangan PPI. Direktorat PLB (2007:20) mengemukakan bahwa proses pengembangan PPI meliputi tahap penjangkaran dan identifikasi, rujukan, pertemuan tim rujukan, asesmen, dan pertemuan tim asesmen. Dengan adanya tahap penjangkaran dan identifikasi, rujukan, pertemuan tim rujukan, asesmen, dan pertemuan tim asesmen, sekolah dapat mengetahui kebutuhan khusus yang dimiliki anak sehingga dapat mengembangkan PPI sesuai dengan kebutuhan siswa. Asep Karyana & Sri Widati (2013:106) menambahkan, dengan adanya asesmen pada anak, akan menjadi bahan masukkan dalam

menyusun program khusus bagi anak berdasarkan jenis keterampilan dan kemampuan serta potensi yang dimiliki anak.

Di SD Negeri 1 Trirenggo tahap penjangkaran dan identifikasi dilakukan saat anak mendaftar di sekolah. Pihak sekolah akan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak orang tua siswa terkait kekhasan yang dimiliki anaknya, atau dapat juga dengan cara membawa anak tersebut ke sekolah agar dapat diidentifikasi secara langsung. Dari tanya jawab atau pengamatan tersebut Kemudian sekolah akan mengetahui kebutuhan khusus yang dimiliki oleh anak.

Setelah siswa teridentifikasi memiliki kebutuhan khusus, siswa akan dirujuk pada tim asesmen. Pada tahap asesmen ini SD Negeri 1 Trirenggo bekerjasama dengan PLB UNY, dengan kata lain tim dari PLB UNY yang akan melakukan asesmen untuk peserta didik yang telah diidentifikasi memiliki kebutuhan khusus tersebut. Namun sekolah tidak menutup kemungkinan untuk orang tua yang akan melakukan asesmen mandiri bagi anaknya. Setelah asesmen tersebut dilakukan, pihak sekolah akan mendapatkan hasil dari asesmen yang telah dilakukan oleh PLB UNY, sehingga dapat memberikan *treatment* yang sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SD Negeri 1 Trirenggo telah melakukan beberapa tahapan dalam proses pengembangan PPI, yaitu penjangkaran dan identifikasi; rujukan; dan asesmen yang akan dilakukan oleh tim dari PLB UNY. Sedangkan

untuk pertemuan tim rujukan sekolah belum melaksanakannya dan pertemuan tim asesmen akan dilakukan oleh pelaksana asesmen yaitu dari PLB UNY.

b. Membentuk Tim Pengembang PPI

Langkah awal dalam penyusunan program pembelajaran individual adalah membentuk suatu tim yang disebut dengan tim PPI. Mulyono Abdurrahman (2003: 57) mengungkapkan bahwa tim pengembang PPI yang ideal adalah dari orang-orang yang bekerja dengan anak dan memiliki informasi yang dapat disumbangkan untuk menyusun rancangan pendidikan yang komperhensif bagi anak. Secara umum orang-orang tersebut mencakup guru khusus, guru reguler, Kepala Sekolah, orang tua, *Diagonstician*, dan spesialis lain (konselor dan *speech therapist*), serta kalau mungkin juga anak yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian, SD Negeri 1 Tirenggo belum membentuk tim pengembang PPI. Hal ini disebabkan karena PPI juga sedang dalam proses perencanaan. Beberapa waktu sebelumnya sudah ada perumusan PPI yang dilakukan oleh GPK, akan tetapi karena GPK statusnya ditarik kembali oleh dinas provinsi, maka PPI tersebut kembali batal untuk dirumuskan.

c. Melaksanakan Pengembangan PPI

Misbach (2012:46) mengungkapkan Program Individual merupakan program pengajaran dimana siswa dapat mengerjakan

dengan tepat tugas-tugas dengan tepat waktu yang cukup dan kondisi yang termotivasi. Selain memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat belajar sesuai kebutuhan, kemampuan, kecepatan, dan caranya sendiri, serta agar siswa dapat belajar secara optimal dan bisa mencapai tingkat penguasaan bahan pelajaran yang dipelajarinya. Dengan kata lain, dengan adanya PPI dapat memudahkan siswa untuk mencapai target belajar yang dapat dipelajarinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Asep Karyana & Sri Widati (2013:107) juga menambahkan manfaat dari adanya PPI, yaitu dapat membantu guru memonitor kemajuan siswa dan menyediakan kerangka kerja untuk mengkomunikasikan informasi tentang kemajuan siswa kepada orangtua, dan kepada siswa.

Dalam buku 2, Direktorat PLB (2007: 10) dijelaskan bahwa pengembangan PPI meliputi deskripsi tingkat kemampuan peserta didik, tujuan jangka panjang (umum) dan tujuan jangka pendek (khusus). Hal ini dilakukan sesuai dengan hasil asesmen kekhususan siswa. Sehingga PPI akan disesuaikan dengan kemampuan siswa, bukan siswa yang menyesuaikan PPI.

Berdasarkan hasil penelitian, di SD Negeri 1 Tirirenggo secara umum pengembangan PPI untuk tiap siswa belum dibuat. Selain dikarenakan kekosongan posisi GPK yang ada, Kepala Sekolah juga belum mewajibkan semua guru untuk membuat PPI. Kepala Sekolah menyadari banyaknya tanggungan yang harus diselesaikan oleh guru.

Akan tetapi, tidak semua guru tidak membuat PPI untuk tiap siswanya. Terdapat juga guru yang telah membuat PPI untuk peserta didik di kelasnya.

d. Melakukan Modifikasi Kurikulum dan Isi Materi

Dalam Buku 3 DPLB, (2004:32-33) dijelaskan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan relatif normal materi dalam kurikulum sekolah reguler dapat tetap dipertahankan, atau tingkat kesulitannya diturunkan sedikit sedangkan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki kecerdasan di bawah normal (peserta didik lamban belajar atau tunagrahita) materi dalam kurikulum sekolah reguler dapat dikurangi atau diturunkan tingkat kesulitannya seperlunya, atau bahkan dihilangkan bagian tertentu.

Sesuai hasil penelitian yang dilakukan, SD Negeri 1 Tirenggo, Kepala Sekolah menyatakan bahwa tidak semua ABK memerlukan adanya modifikasi kurikulum ataupun materi isi. Apabila anak dirasa masih bisa mengikuti kurikulum reguler, maka anak akan tetap diikutkan pada kurikulum tersebut. Misal saja untuk anak tuna rungu ringan. Modifikasi yang dilakukan hanya dalam hal tertentu saja, selama IQ-nya masih menjangkau, maka akan diikutkan kurikulum reguler. Namun, misal saja anak tuna grahita, karena rata-rata penangkapan materi tidak bisa seperti anak reguler maka akan diberikan modifikasi. Modifikasi tersebut berupa pengurangan beban

belajar. Saat diberikan tugas, anak ABK akan mendapatkan setengah dari tugas yang diberikan pada anak reguler.

e. Mengatur Pemberian Layanan

Ina Rosilawati (2013: 16) menyatakan bahwa agar ABK tidak terabaikan dalam pendidikan inklusi, maka perlu dilakukan manajemen layanan khusus. Hal ini dikarenakan siswa di sekolah inklusif terdiri atas anak-anak normal dan anak-anak berkebutuhan khusus. Pemberian layanan dapat mencakup manajemen kesiswaan, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana-prasarana, pendanaan dan lingkungan. Ina juga menambahkan bahwa untuk melaksanakan layanan khusus, Kepala Sekolah dapat menunjuk staf yang memahami ke-PLB-an.

Berdasarkan hasil penelitian, pemberian layanan khusus di SD Negeri 1 Trirenggo diberikan satu minggu sebanyak 2 kali, yaitu tiap hari Senin dan hari Jumat. Hari Senin dikhususkan untuk ABK secara klasikal, dan hari Jumat untuk siswa *slow learner* yang masih kesulitan dalam hal calistung (baca tulis hitung). Akan tetapi, mulai bulan Januari tahun 2016, GPK yang merupakan bantuan dari pemerintah provinsi tersebut ditarik kembali oleh untuk dilakukannya rotasi. Namun hingga saat ini SD Negeri 1 Trirenggo belum mendapatkan bantuan GPK lagi. Untuk tahun ajaran 2016/2017, SD Negeri 1 Trirenggo sudah menganggarkan untuk mengadakan GPK pribadi milik sekolah, sehingga tidak bergantung bantuan dari dinas provinsi.

Saat ini, pemberian layanan yang untuk ABK dilakukan oleh guru kelas masing-masing. Akan tetapi, layanan masih terbatas pada proses pembelajaran secara umum, misal saja pendampingan belajar dan juga penjelasan berulang pada ABK yang belum memahami materi. Guru tidak dapat hanya berfokus pada keterbatasan ABK, sebab guru juga harus mengajar anak reguler pada umumnya di kelas.

f. Merencanakan Waktu Pelaksanaan dan Kriteria Evaluasi

Buku 2, Direktorat PLB (2007:10) menjelaskan bahwa komponen waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi berisi rencana tanggal dimulainya kegiatan untuk setiap tujuan khusus, jangka waktu kegiatan dan tanggal evaluasi, untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan, selain itu juga adanya deskripsi metode dan kriteria evaluasi yang akan digunakan. Dengan adanya penjelasan tersebut, dapat menjadi acuan target guru dalam waktu pemberian materi (tujuan khusus) yang akan digunakan, serta waktu pelaksanaannya.

Mulyono (2003: 59) juga menambahkan, dengan adanya kriteria evaluasi dapat menjadi patokan pengukuran derajat pencapaian tujuan-tujuan pembelajaran khusus yang telah diselesaikan.

Berdasarkan hasil penelitian, waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi untuk ABK belum dibuat secara terpisah dengan anak reguler, karena waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi nantinya menjadi bagian dari PPI. Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya, Kepala Sekolah menyatakan bahwa untuk ABK di SD Negeri 1

Trirenggo belum memiliki PPI untuk tiap anak. Untuk ABK yang ada saat ini masih mengikuti waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi sama seperti anak reguler, meskipun pada kenyataan pelaksanaannya tidak akan bisa untuk disamakan. Kriteria evaluasi untuk ABK biasanya hanya akan separuh dari anak reguler. Jika anak reguler harus mengerjakan 10 soal, maka ABK haruslah mengerjakan 5 soal saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara administratif, waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi masih disamakan dengan anak reguler. Namun untuk pelaksanaannya ABK memiliki kriteria evaluasi tersendiri.

g. Memiliki model atau format PPI

Mulyono (2003: 56) menyatakan dengan adanya format PPI, diharapkan guru akan terdorong untuk melakukan asesmen tentang karakteristik belajar tiap ABK dan melakukan usaha-usaha untuk mempertemukan dengan kebutuhan individu mereka. Dengan kata lain, dengan adanya contoh dalam pembuatan PPI, dapat membantu guru dalam menyusun PPI untuk tiap siswa berkebutuhan.

Berdasarkan hasil penelitian, SD Negeri 1 Trirenggo sudah memiliki format PPI. Format PPI tersebut diberikan oleh PLB UNY, yang merupakan instansi yang telah bekerjasama dengan pihak sekolah. Dalam format PPI tersebut, terdapat bagian identitas siswa, identifikasi kekhususan siswa, tujuan jangka pendek dan panjang yang hendak dicapai, modifikasi tujuan, isi/materi serta penilaian. Akan

tetapi, belum semua guru membuat PPI berdasarkan format yang ada tersebut, hal ini juga dikarenakan Kepala Sekolah belum mewajibkan guru kelas untuk membuat PPI untuk tiap siswa.

2. Tingkat Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di kelas IV B Berdasarkan Aspek Tenaga Pendidik

a. Kompetensi Teknis

Lerner (dalam Mulyono (2003: 103) mengungkapkan bahwa salah satu kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh guru di sekolah inklusi adalah memahami berbagai teori tentang anak berkebutuhan khusus. Dengan seorang guru mengetahui kebutuhan khusus dari siswanya, maka guru tersebut dapat memberikan *treatment* yang sesuai dengan kebutuhan khusus siswa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, Kepala Sekolah dan guru sudah mengetahui beberapa teori terkait ABK, yaitu mengenai pendidikan inklusi serta faktor yang dapat menyebabkan seorang anak memiliki kebutuhan khusus. Dengan teori yang dimilikinya tersebut, guru dapat melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh siswa, sehingga pembelajaran yang diterima siswa menjadi lebih optimal.

Selain berdasarkan pemahaman teori terkait ABK, Lerner juga mengungkapkan kompetensi teknis yang harus dimiliki guru adalah memahami berbagai tes berkaitan dengan ABK, dan juga kemampuan

dalam melakukan asesmen dan evaluasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, belum semua guru terlibat dalam penjangkaran, penyusunan program identifikasi, asesmen, dan pembelajaran ABK. Sebagian besar partisipasi guru yang ada adalah terkait pembelajaran ABK, sedangkan untuk asesmen ABK akan dilakukan oleh pihak PLB UNY.

Untuk dapat maksimal dalam memberikan pelayanan pada ABK, hal yang perlu dilakukan oleh guru adalah dengan mengikuti pelatihan terkait ABK. Dengan kata lain keikutsertaan guru dalam pelatihan juga mampu untuk mengukur kompetensi teknis guru. Berdasarkan hasil penelitian, guru-guru di SD Negeri 1 Trirenggo telah mengikuti beberapa kali pelatihan terkait ABK. pelatihan tersebut dilakukan oleh pihak sekolah maupun guru mengikuti di lingkungan kabupaten atau provinsi. Untuk pelatihan yang dilakukan oleh pihak sekolah, misal saja pelatihan dari PLB UNY dan juga pelatihan dari karinakas. Dalam pelatihan tersebut diajarkan bagaimana penanganan siswa berkebutuhan khusus di kelas. Untuk pelatihan yang dilakukan di tingkat kabupaten maupun provinsi, telah diikuti oleh Kepala Sekolah. Misal saja pelatihan di Bandung maupun Tangerang.

Kompetensi teknis guru juga diamati selama proses belajar mengajar di kelas IV B. Beberapa kompetensi guru saat mengajar di kelas yang dapat diamati ialah dari kemampuan guru menggunakan

berbagai metode pembelajaran yang inovatif, kemampuan membantu anak ABK, kemampuan guru memberikan motivasi pada ABK, dan juga kemampuan menggunakan beberapa strategi khusus untuk siswa. Sedangkan kaitannya dalam kemampuan menjelaskan materi, siswa merasa guru di kelas IV B sudah mampu untuk menjelaskan materi dengan baik sehingga mudah untuk memahami materi,

b. Kompetensi Kolaboratif

Suyanto & Mujito (2014: 39) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan inklusi guru dituntut untuk melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumber daya alam lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dengan adanya kolaborasi tersebut, diharapkan dapat memaksimalkan pendidikan yang diberikan kepada anak reguler maupun ABK.

Kompetensi kolaboratif yang ada di SD Negeri 1 Tirirenggo Bantul adanya kerjasama antara guru kelas dan GPK dalam memberikan pelajaran pada peserta didik. Selain hal tersebut, tugas GPK adalah mengkoordinir guru kelas dalam penanganan ABK, serta mentransfer ilmu terkait penanganan ABK yang telah dimiliki kepada guru kelas. Timbal balik yang diberikan guru kelas yaitu jika ada kesulitan selama penanganan ABK, guru kelas dapat meminta solusi kepada GPK yang ada, baik secara langsung maupun melalui *forum group discussion* antara semua guru kelas dan juga GPK, akan tetapi hal tersebut berlangsung sebelum GPK ditarik kembali oleh Dinas

Provinsi. Saat ini, wujud kolaborasi yang nampak adalah dengan adanya keikutsertaan guru-guru dalam pertemuan rutin yang diadakan antara pihak sekolah dan juga pihak wali murid siswa ABK.

3. Tingkat Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di kelas IV B Berdasarkan Aspek Sarana-Prasarana

a. Pengadaan Sarana-Prasarana Khusus

Agus Wibowo (2013: 107) mengemukakan bahwa sarana dan prasarana di sekolah perlu dikembangkan dan memperhatikan aspek efisiensi, sehingga sarana tersebut dapat memberikan kemudahan tercapainya proses belajar mengajar secara efektif dan mengembangkan potensi peserta didik. Adapun administrasi sarana dan prasarana pendidikan meliputi perencanaan dan pengadaan, penyimpanan, pendayagunaan, pemeliharaan dan inventarisasi.

Dalam Buku 7 Pedoman Penyelenggaraan inklusi (2007:4) dijelaskan bahwa pengadaan sarana dan prasarana yang diberikan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi adalah hanya yang bersifat prioritas utama (sesuai dengan kebutuhan khusus, mudah dioperasikan/tidak memerlukan tenaga operasional khusus). Sehingga suatu sekolah penyelenggara inklusi tidak haruslah memiliki semua sarana-dan prasaran yang berkaitan dengan ABK untuk dapat melaksanakan sekolah inklusi, akan tetapi cukup dengan kebutuhan ABK yang ada di sekolah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, pengadaan sarana dan prasarana di SD Negeri 1 Tirenggo Bantul belumlah lengkap sesuai dengan berbagai macam kebutuhan ABK. Namun dikarenakan tingkat kekompleksan jenis ABK yang ada di sekolah tersebut tidak terlalu tinggi, sekolah sudah merasa sarana-pasarana yang ada sudah mencukupi kebutuhan ABK yang ada. Di sekolah tersebut, terdapat ABK dengan kebutuhan khusus *slow learner*, Tuna Rungu, Tuna wicara ringan, Mental *Defective*, *Below Average*, ADHD, Superior, Tuna Ganda, Disleksia, Tuna Daksa (CP), Autis Ringan, dan Hyperaktif. Meskipun terdapat sepuluh jenis anak kebutuhan khusus, akan tetapi semuanya masih dalam taraf ringan, sehingga masih bisa di bawah pengawasan sekolah dan juga menggunakan sarana prasarana umum bersamaan dengan siswa reguler yang lainnya. Sedangkan sarana dan prasarana khusus yang ada untuk ABK di SD Negeri 1 Tirenggo antara lain adalah toilet khusus untuk ABK, alat bantu jalan yang berada di sekitar ruang kelas, alat terapi jalan, ruang sumber yang berisi alat latihan jalan untuk tuna daksa, dan juga media pembelajaran untuk melatih motorik halus ABK. Selain hal tersebut, beberapa *setting* yang ada di sekolah juga sesuai dengan pendapat Mumpuniati (2001: 138), yang menyatakan bahwa jika terdapat tangga masuk, hendaknya sekolah juga menyediakan tangga yang merupakan lantai miring yang landai, untuk mempermudah aksesibilitas bagi pemakai kursi roda.

b. Pengelolaan Sarana-Prasarana

Dalam buku 7, Direktorat PLB (2007:32) dijelaskan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dilakukan oleh guru pendidikan khusus (GPK), guru kelas dan tim dari berbagai profesi yang terkait (antara lain, dokter mata, psikolog, ahli pendidikan luar biasa, ahli olah raga anak luar biasa, *social worker*, konselor, dokter ahli THT, ahli terapi wicara, neurolog, dokter spesialis anak, dokter ortopedi, ortoris protetis, fisioterapis, okupasional terapis, ahli bahasa, dll sesuai jenis dan tingkat kemampuan anak berkebutuhan khusus.

Untuk SD Negeri 1 Tirenggo, berdasarkan penelitian yang dilakukan pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Kepala Sekolah bersama dengan guru maupun GPK. Untuk sarana dan prasaran yang berada di ruang sumber inklusi akan menjadi tanggung jawab dari GPK (sewaktu posisi GPK masih diisi), sedangkan untuk saat ini ruang sumber menjadi tanggung jawab guru penjasorkes maupun guru kelas.

Wujud pengelolaan sarana dan prasaran yang dilakukan di SD Negeri 1 Tirenggo misal saja dalam pengarahannya penggunaan sarana dan prasarana yang ada. Saat *launching* kelas terapi/ ruang sumber, pihak sekolah mengundang bupati yang menjabat pada saat itu, beberapa instansi lain, dan juga masyarakat sekitar. Hal ini dimaksudkan untuk mengenalkan pada anak dan warga sekolah fungsi

dan manfaat dari adanya ruang terapi tersebut, sehingga siswa berkebutuhan dapat menggunakannya secara maksimal, serta masyarakat sekitar mengetahui visi dan misi sekolah dalam penanganan ABK. Wujud pengelolaan sarana dan prasarana yang lain adalah pengenalan sarana dan prasarana baru, yang baru saja ada di sekolah. Misal saja sewaktu *hand dreel* ataupun toilet khusus ABK baru saja selesai pembuatan dan pemasangannya. Pengarahan tersebut dilakukan sewaktu upacara bendera, sehingga semua siswa dapat mengetahuinya.

4. Tingkat Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di kelas IV B Berdasarkan Aspek Lingkungan Masyarakat

a. Mengadakan Pertemuan

Lucy C. Martin (2009: 18) mengungkapkan sekolah (guru) sangat penting untuk menjadwalkan pertemuan dengan orang tua terkait kebutuhan ABK. Hal ini dirasa penting karena kedua belah pihak sama-sama perlu mengetahui kebutuhan dan perkembangan anak di sekolah maupun di rumah.

Mulyono Abdurhaman (2003: 109) juga mengungkapkan perlunya sekolah menjalin hubungan orang tua yang diwujudkan dalam pertemuan antara orang tua dan guru. Dengan adanya pertemuan antara guru dan orang tua, dapat menjadi wahana untuk

membantu anak sehingga anak dapat mencapai kemajuan yang optimal.

SD Negeri 1 Tirirenggo sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi juga telah menjadwalkan pertemuan rutin antara pihak sekolah dengan pihak wali siswa ABK. Pertemuan tersebut dijadwalkan satu bulan satu kali. Dalam pertemuan itu akan menghadirkan tim ahli terkait ABK, dan akan membahas kendala serta masalah yang ada pada siswa maupun dalam kaitannya penyelenggaraan pendidikan inklusi.

b. Mengirim Laporan Hasil Belajar

Cecil D. Mercer (1992: 121) menyatakan dengan dikirimnya hasil belajar anak, dapat membantu menjalin komunikasi antara guru dengan orang tua, dan dapat menyampaikan berbagai informasi seperti kinerja akademik, perilaku, hubungan dengan sesama, serta tugas yang dimiliki anak. Selain itu, dengan dikirimnya hasil belajar pada orang tua, dapat memberikan kesempatan orang tua untuk mengetahui perkembangan anaknya. Terlebih dengan dikirimnya hasil belajar yang diperoleh anak setiap harinya, tidak hanya hasil belajar yang dikirim tiap semesternya.

Berdasarkan hasil penelitian, SD Negeri 1 Tirirenggo telah melakukan pertemuan rutin tiap bulan dengan wali murid siswa ABK. dalam pertemuan tersebut, pihak sekolah juga akan mengkomunikasikan hasil belajar yang telah diperoleh oleh siswa

ABK. Selain saat pertemuan rutin tiap bulannya, pengkomunikasian hasil belajar siswa juga dilakukan saat siswa mengikuti ulangan harian. Hasil ulangan harian tersebut akan dikirimkan pada orang tua agar orang tua mengetahui perkembangan yang dimiliki oleh anaknya. Untuk pengkomunikasian hasil nilai belajar secara keseluruhan, pihak sekolah akan mengkomunikasikannya sewaktu tengah semester ataupun akhir semester saat siswa menerima raport.

c. Melakukan Kunjungan Lapangan

Cook (2014: 104) menyatakan pentingnya seorang guru mendapatkan informasi dari keluarga ABK. Terlebih jika bisa melakukan observasi langsung terhadap apa yang dilakukan anak di lingkungan keluarganya. Dengan adanya observasi tersebut guru dapat mengetahui berbagai macam informasi tentang anak yang tidak bisa didapatkan di lingkungan sekolah, sehingga bisa memberikan *treatment* yang sesuai untuk memaksimalkan perkembangan anak.

Berdasarkan hasil penelitian, wujud kunjungan lapangan yang dilakukan oleh pihak SD Negeri 1 Tirenggo adalah mengunjungi rumah siswa yang kurang memiliki motivasi untuk berangkat ke sekolah. Guru kemudian memberikan motivasi secara langsung pada anak dan orang tua siswa agar mau datang ke sekolah lagi. Selain hal tersebut, *home visit* juga pernah dilakukan terhadap siswa yang takut pada GPK baru, sehingga tidak mau berangkat sekolah. Pihak sekolah Kemudian meminta guru yang dekat dengan siswa tersebut untuk

datang kerumah siswa. Setelah mengetahui hal yang disukai ABK, guru tersebut mengajaknya untuk melakukan hal yang disukai ABK agar ABK merasa termotivasi lagi dan tidak takut terhadap guru. Selain itu, guru tersebut juga memberikan hadiah pada ABK, sebagai wujud apresiasinya.

d. Melibatkan Anggota Keluarga

Suyanto & Mudjito (2014:39) mengungkapkan bahwa dalam pendidikan inklusi penting untuk melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan. Beberapa bentuk keterlibatan orang tua antara lain dalam: (1) Perencanaan; (2) Penyediaan tenaga ahli/profesional terkait; (3) Pengambilan keputusan; (4) Pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi; (5) Pendanaan; (6) Pengawasan; (7) Penyaluran lulusan.

Dalam proses perencanaan, orang tua dapat terlibat dalam penyusunan Program Pengajaran Individual (PPI); dalam proses penyedia tenaga ahli, orang tua dapat berperan menyediakan GPK mandiri maupun *shadow* untuk anaknya di sekolah; keterlibatan pengambilan keputusan dapat dilakukan saat mengikuti rapat dengan pihak sekolah, sedangkan keterlibatan dalam pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi dapat berupa pendampingan belajar anak di sekolah maupun di rumah.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti, orang tua siswa telah terlibat dalam penyediaan tenaga ahli/ profesional,

penyediaan tenaga ahli/profesional terkait, pengambilan keputusan, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi serta pendanaan. Dalam keterlibatan sebagai penyedia tenaga ahli, terdapat wali murid di kelas IV B yang telah menghadirkan pendamping untuk anaknya (FI). Setiap hari St (pendamping) mengantar-jemput FI ke sekolah dan juga mendampingi selama proses belajar berlangsung. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan berupa orang tua siswa yang rutin menghadiri rapat rutin dengan pihak sekolah tiap bulannya. Sedangkan contoh konkrit keterlibatan dalam pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi adalah kehadiran ibu An setiap harinya untuk menunggu anaknya di dalam kelas.

e. Mengundang Ahli.

Dedy Kustawan (2013: 154) mengemukakan bahwa sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dapat melibatkan instansi atau lembaga terkait yang memiliki program penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan keilmuan yang sama. Misalnya, dengan kelompok kerja pendidikan inklusif provinsi/kabupaten/kota, Sekolah Luar Biasa (SLB)/ Sekolah Khusus, *Resource Center*/Pusat Sumber Pendidikan Inklusif, rumah sakit, klinik, pusat terapi atau pusat intervensi, perguruan tinggi, pusat kajian pendidikan inklusif UPI Bandung dan asosiasi atau forum lainnya, seperti ICRAIS. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan pendidikan inklusi menjadi lebih optimal.

SD Negeri 1 Tlirenggo Bantul sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi juga telah melakukan kerjasama dengan mengundang para ahli terkait pendidikan inklusi. Beberapa instansi/ lembaga terkait yang pernah diundang di SD Negeri 1 Tlirenggo misal saja dari PLB UNY, UGM, Karinakas, Dinamika Edukasi Dasar (DED), dan juga Puskesmas. Bentuk kerjasama dengan tim ahli tersebut ada yang berupa sebagai pembicara dalam pertemuan dengan wali murid, kerjasama dalam pengadaan sarana-prasaran ABK, maupun sebagai pelaksana asesmen untuk ABK

E. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Tingkat Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Kelas IV B SD Negeri 1 Tlirenggo Bantul Yogyakarta” ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan peneliti. Kekurangan tersebut yakni peneliti tidak mengobservasi secara langsung pertemuan rutin yang dilakukan pihak sekolah, serta tidak memungkinkan mengobservasi pelatihan yang dilakukan guru. Peneliti mendapatkan data kegiatan tersebut berdasarkan dokumentasi pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, peneliti masih terbatas untuk menyimpulkan lebih luas mengenai tingkat kesiapan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan anak berkebutuhan khusus di SD Negeri 1 Tlirenggo Bantul.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV mengenai tingkat kesiapan sekolah dalam implementasi pendidikan anak berkebutuhan khusus di kelas IV B SD Negeri 1 Tlirenggo Bantul, maka dapat disimpulkan kesiapan komponen yang ditinjau sebagai berikut:

1. Pada aspek kurikulum, belum semua proses pengembangan PPI diikuti, yaitu untuk pertemuan tim rujukan dan juga pertemuan tim asesmen. Tim pengembang PPI dan pengembangan PPI juga belum dapat dilakukan di SD Negeri 1 Tlirenggo, untuk modifikasi kurikulum dan inti materi, pengaturan pemberian layanan, perencanaan waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi sudah dilakukan meskipun belum sempurna. Sedangkan untuk format PPI, SD Negeri 1 Tlirenggo telah memiliki format tersebut.
2. Pada aspek tenaga pendidik, untuk kompetensi teknis tenaga pendidik yang ada telah mengetahui tentang teori ABK, mengikuti pelatihan terkait ABK, serta memiliki kemampuan dalam mengajar diantaranya penggunaan metode mengajar yang inovatif, memberikan bantuan khusus pada ABK, memberikan motivasi pada ABK, dan adanya intervensi strategi khusus yang digunakan, namun belum semua guru terlibat dalam penjaringan, penyusunan program identifikasi, asesmen, dan pembelajaran ABK. Pada kompetensi kolaboratif, tanaga pendidik telah

mengikuti pertemuan dengan wali murid, namun untuk berkolaborasi dengan GPK tidak dapat dilakukan karena selama penelitian berlangsung posisi GPK tengah kosong.

3. Pada aspek sarana-prasarana, meskipun sarana prasaran yang ada belum bisa sesuai dengan standar yang seharusnya ada, namun dikarenakan kekhususan siswa tidak begitu kompleks, sarana dan prasarana yang ada sudah dapat menunjang kebutuhan siswa. Selain itu, sekolah juga sudah melakukan pengelolaan sarana dan prasarana khusus, yaitu dengan melaksanakan pengarahan penggunaan sarana prasarana pada siswa dan mampu mengatasi keterbatasan sarana prasaran yang ada.
4. Pada aspek lingkungan masyarakat, terdapat lima indikator kesiapan yang sudah terpenuhi. Indikator tersebut adalah: mengadakan pertemuan, mengirim hasil laporan belajar, melakukan kunjungan lapangan, melibatkan anggota keluarga, dan mengundang ahli. Akan tetapi, pengiriman hasil belajar akan lebih maksimal bila tidak hanya dilakukan satu bulan satu kali saja.

B. Saran

1. Bagi Kepala Sekolah

- a. Kesiapan sekolah harus lebih ditingkatkan lagi agar pelaksanaan pendidikan inklusi menjadi lebih maksimal. Kesiapan tersebut meliputi kurikulum, tenaga pendidik, sarana-prasarana, dan lingkungan masyarakat.

- b. Kesiapan kurikulum dapat ditingkatkan dengan dibuatnya tim pengembang PPI, serta adanya pengembangan PPI untuk tiap ABK.
- c. Guru harus lebih kreatif dalam penggunaan metode dan media pelajaran, serta lebih bervariasi dalam memberikan materi pada peserta didik, sehingga siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan lebih semangat serta materi yang disampaikan guru akan lebih mudah dipahami oleh siswa.
- d. Sekolah sebaiknya memiliki GPK sekolah, tidak hanya GPK yang diperbantukan dari dinas provinsi, sehingga tidak akan ada kekosongan saat GPK provinsi ditarik kemali oleh dinas provinsi.
- e. Sarana-prasaran sebaiknya lebih dilengkapi terutama untuk anak berkebutuhan khusus, agar dapat menunjang proses pembelajaran menjadi lebih baik. Misal saja media pembelajaran edukatif untuk ABK.

2. Bagi Pemerintah

- a. Pemerintah sebaiknya perlu mengadakan pelatihan ataupun seminar mengenai pendidikan inklusi untuk Kepala Sekolah maupun guru sehingga tenaga pendidik akan lebih memahami tentang penerapan dalam pendidikan inklusi.
- b. Pemerintah sebaiknya memberikan bantuan berupa sarana prasarana pendidikan inklusi sehingga SD inklusi dapat lebih maksimal dalam memberikan pelayanan pada ABK.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadis. (2006). *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Autistik*. Bandung: Alfabeta.
- Agus Wibowo. (2013). *Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah: Konsep dan Praktik Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Agustyawati & Solicha. (2009). *Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta.
- Andi Prastowo. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Arief Junianto. (2015). *Duh, Bantul tak Punya Guru Inklusi*. Diakses dari <http://m.harianjogja.com/baca/2015/04/10/duh-bantul-tak-punya-guru-inklusi-593417>. Pada tanggal 21/10/15. Pukul 20.10 WIB.
- Asep Karyana & Sri Widati. (2013). *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Tunadaksa : Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dengan Hambatan Gerak*. Jakarta: Luxima Metro Media.
- Chen, Cook Klein. (2014). *Adapting Early Childhood Curricula for Children with Special Needs*. United States of America: Pearson Education Limited.
- Dedy Kustawan. (2013). *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Lumixa Metro Media.
- Direktorat PLB. (2007). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.
- _____. (2007). *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Buku 2: Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.
- _____. (2007). *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Buku 3: Kegiatan Pembelajaran..* Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.
- _____. (2007). *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Buku 5: Manajemen Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.
- _____. (2007). *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Buku 7: Pedoman Khusus Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Pendidikan..* Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- E. Mulyasa. (2008). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ellah Siti Chalidah. (2005). *Terapi Permainan bagi Anak yang Memerlukan Layanan Pendidikan Khusus*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Frieda Mangunsong. (2014). *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Depok: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Florentina Atik, dkk.(2013). *Prosedur Operasional Standar dan Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif Berbasis Sekolah*. Jakarta : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jendral Pendidikan Dasar. Direktorat Pembinaan PKLK Dikdas.
- Haris Herdiansyah. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Psikologi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ina Rosilawati. (2013). *Trik Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan Inklusif*. Yogyakarta: Familia.
- Ishartiwi. (2010). *Implementasi Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Sistem Persekolahan Nasional*. Jurnal. JPK, Vol. 6. No. 2. Mei 2010.
- Lexy J. Moleang. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- M. Dalyono. (2005). *Psikologi Pendidikan (Komponen MKDK)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Martin, Lucy C. (2009). *Strategies for Teaching Studens with Learning Disabilities*. California: Corwin Press.
- Mercer, Cecil D. (1992). *Students with Learning Disabilities*. United States: Macmillan Publishing.
- Misbach. D. (2012). *Seluk-Beluk Tuna Daksa & Strategi Pembelajarannya*. Yogyakarta: Javalitera.
- Moch. Uzer Usman. (2011). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mohammad Efendi. (2006). *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mohammad Takdir Ilahi. (2013). *Pendidikan Inklusif Konsep & Aplikasi*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mulyono Abrurrahman. (2003). *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Mumpuniarti. (2001). *Pendidikan Anak Tunadaksa*. Yogyakarta: FIP UNY.
- Nana Sudjana. (2005). *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Pendidikan Khusus Layanan Khusus. (2013). *Jambore ABK Dikdas Tingkat Nasional Thn 2013 ke-3*. Diakses dari www.pk-plk.com. Pada tanggal 21/10/15. Pukul 20.00 WIB.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Praptiningrum. (2010). Fenomena Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal. JPK*, Vol 7, No. 2, Nopember 2010.
- Rusman. (2012). *Belajar dan Pembelajaran Berbasis Komputer Mengembangkan Profesionalisme Guru Abad 21*. Bandung: Alfabeta.
- Slameto. (2003). *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Smith, David J.(2006). *Inklusi, Sekolah Ramah untuk Semua*. Bandung : Nuansa.
- Subagya. (2010). Analisis Kebutuhan Rintisan Implementasi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010. Diakses dari [https://eprints.uns.ac.id/13245/1/ Publikasi_Jurnal_%2816%29.pdf](https://eprints.uns.ac.id/13245/1/Publikasi_Jurnal_%2816%29.pdf). Pada tanggal 28/10/15. Pukul 15.35 WIB.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2007). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suyanto & Mujito. (2014). *Masa Depan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar.
- Wahyu Sri Ambar Arum. (2005). *Perspektif Pendidikan Luar Biasa dan Implikasinya bagi Penyiapan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Observasi Lingkungan Fisik/Non Fisik Sekolah

PEDOMAN OBSERVASI
(Lingkungan Fisik/Non Fisik Sekolah)

Tingkat Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan ABK

No	Aspek yang Diamati	Pernyataan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Pengadaan sarana-prasarana khusus			
	a. Toilet khusus ABK			
	b. Jalur khusus untuk siswa ABK			
	c. Alat bantu visual maupun auditif			
	d. Alat asesmen			
	e. Alat bantu pelajaran atau akademik			
	f. Alat bantu visual ataupun auditif			
	g. Alat latihan fisik/motorik			
	h. Ruang asesmen			
	i. Ruang konsultasi			
	j. Ruang <i>remedial teaching</i>			
	k. Ruang latihan fisik			
	l. Ruang keterampilan			
	m. Ruang penyimpanan alat			

Lampiran 2 : Lembar Observasi Kompetensi Guru dalam Proses Pembelajaran

PEDOMAN OBSERVASI

Tingkat Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan ABK

Nama Guru :

Mata Pelajaran :

Hari/ Tanggal :

No	Aspek yang Diamati	Pernyataan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Kompetensi teknis guru			
	a. Penggunaan metode pembelajaran yang inovatif			
	b. Mengimplementasikan PPI			
	c. Memberi bantuan khusus pada ABK			
	d. Memberikan motivasi pada ABK			
2.	Intervensi Strategi			
	a. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi mendengar (<i>listening</i>)			
	b. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi membuat catatan (<i>note talking</i>)			
	c. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi pertanyaan mandiri (<i>self questioning</i>)			
	d. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi tes lisan (<i>test talking</i>)			
	e. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi pemantauan kesalahan (<i>error monitor</i>)			

Lampiran 3 : Lembar Dokumentasi

PEDOMAN DOKUMENTASI

Tingkat Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan ABK

Berilah tanda cek list(√) pada salah satu kolom yang tersedia!

No	Aspek yang Diamati	Pernyataan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Terdapat SK Tim Pengembang PPI			
2.	Dokumen hasil pengembangan PPI			
3.	Memiliki format PPI			
4.	Data siswa ABK			
5.	Data pertemuan dengan wali/masyarakat			
6.	Data Kunjungan Lapangan			
7.	Data Pelatihan Guru			
8.	Data Sarana dan Prasarana			

Lampiran 4 : Lembar Wawancara Kepala Sekolah dan Guru

PEDOMAN WAWANCARA

Kepala Sekolah

Mengenai Tingkat Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan ABK

No	Pertanyaan	Jawaban
A. Kurikulum		
1.	Apakah sekolah melaksanakan program penjaringan dan identifikasi peserta didik ABK?	
2.	Apakah sekolah melaksanakan assesment untuk siswa yang teridentifikasi memiliki kebutuhan khusus?	
3.	Apakah sekolah membentuk tim pengembang PPI?	
4.	Bagaimanakah program kerja tim pengembang PPI?	
5.	Bagaimanakah modifikasi kurikulum yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kemampuan ABK?	
6.	Bagaimanakah layanan yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar bagi ABK?	
7.	Apakah sekolah telah mengatur waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi untuk ABK?	
8.	Apakah sekolah memiliki model atau format PPI?	
B. Tenaga Pendidik		
9.	Apakah yang anda ketahui tentang pendidikan inklusi? Apa sajakah faktor dapat yang mempengaruhi seorang anak menjadi siswa berkebutuhan khusus?	

10.	Apakah Anda terlibat dalam penjarangan, penyusunan program identifikasi, asesmen, dan pembelajaran ABK?	
11.	Apakah Anda pernah mengikuti program pelatihan mengenai ABK?	
12.	Seberapa seringkah Anda melakukan pertemuan dengan wali murid guna membicarakan perkembangan ABK?	
13.	Bagaimana wujud kerjasama yang pernah Anda lakukan dengan GPK untuk membantu ABK dalam pembelajarannya?	
C. Sarana dan Prasarana		
14.	Apakah sarana dan prasarana yang ada sudah sesuai dengan aksesibilitas fungsionalnya?	
15.	Bagaimanakah sekolah dalam mengarahkan penggunaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan siswa?	
16.	Bagaimanakah sekolah mensiasati keterbatasan sarana dan prasarana?	
D. Lingkungan Masyarakat		
17.	Bagaimanakah dukungan yang dibeikan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah?	
18.	Apakah terdapat pertemuan antara tim dengan orang tua siswa untuk membicarakan perkembangan siswa?	
19.	Apakah sekolah mengkomunikasikan hasil belajar yang diterima anak pada orang tua?	

20.	Apakah Anda pernah melakukan kunjungan ke lapangan untuk bertukar gagasan dengan masyarakat agar tercipta perubahan positif dalam menerapkan inklusi?	
21.	Apakah orang tua/anggota keluarga diajak berpartisipasi dalam pendidikan untuk ABK? Jika iya, bagaimana bentuk partisipasi tersebut?	
22.	Apakah sekolah pernah mengundang ahli terkait ABK?	

Lampiran 5 : Lembar Wawancara dengan Siswa

PEDOMAN WAWANCARA

Siswa

Mengenai Tingkat Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan ABK

Nama :

Hari/Tanggal :

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah fasilitas yang diberikan sekolah telah mendukung kebutuhan siswa?	
2.	Apakah pembelajaran yang disampaikan dapat dimengerti?	
3.	Selain guru kelas, adakah yang akan membantumu dalam pembelajaran?	

Lampiran 6 : Hasil Observasi Lingkungan Fisik/ Non Fisik

HASIL OBSERVASI LINGKUNGAN FISIK/ NON FISIK

No	Aspek yang Diamati	Pernyataan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Pengadaan sarana-prasarana khusus			
	a. Toilet khusus ABK	√		Terdapat dua buah toilet khusus untuk ABK di pojok tenggara dan pojok barat laut sekolah. Pembuatan menggunakan dana bantuan dari “Karinakas”.
	b. Jalur khusus untuk siswa ABK	√		Terdapat <i>hand drill</i> untuk pegangan tangan anak tuna daksa ataupun tuna netra di sepanjang lorong sekolah. Dan juga terdapat jalan naik untuk siswa yang menggunakan kursi roda.
	c. Alat bantu visual maupun auditif	√		Di setiap kelas terdapat speaker
	d. Alat asesmen		√	Asesmen untuk siswa dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak UNY, sehingga sekolah tidak memiliki alat asesmen khusus untuk siswa.
	e. Alat bantu pelajaran atau akademik	√		Di kelas IVB terdapat globe, dan juga buku teks pelajaran untuk siswa.
	f. Alat latihan fisik/motorik	√		Terdapat alat latihan jalan untuk anak tuna daksa. Dan juga berbagai alat latihan motorik halus .

	g. Ruang asesmen		√	
	h. Ruang konsultasi	√		Ruang konsultasi menjadi bagian tersendiri dari ruang sumber inklusi.
	i. Ruang <i>remidial teaching</i>		√	
	j. Ruang latihan fisik	√		Menjadi bagian dalam ruang sumber inklusi
	k. Ruang keterampilan	√		Terdapat ruang kerawitan untuk melatih ketrampilan bermain musik jawa peserta didik.
	l. Ruang penyimpanan alat	√		Penyimpanan alat-alat latihan untuk ABK menjadi satu dengan ruang kesekretariatan.

Lampiran 7 : Hasil Observasi Kompetensi Guru dalam Proses Pembelajaran

HASIL OBSERVASI DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR

Nama Guru : Am

Mata Pelajaran : Matematika

Hari/ Tanggal : Rabu, 27 April 2016

No	Aspek yang Diamati	Pernyataan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Kompetensi teknis guru			
	a. Penggunaan metode pembelajaran yang inovatif	√		Dalam menghirung rusuk bangun ruang, siswa Diajak untuk membuat jaring-jaring kubus secara langsung. Sehingga mempermudah siswa dalam memvisualkan bangun ruang.
	b. Mengimplementasikan PPI		√	Guru belum memiliki dan mengimplementasikan PPI
	c. Memberi bantuan khusus pada ABK	√		Am membantu Rz untuk membuat jaring-jaring.
	d. Memberikan motivasi pada ABK	√		Memberikan motivasi pada kelas dan termasuk ABK didalamnya, “Ayo, setiap yang ada di sini nanti dinilai <i>Mbaknya</i> (peneliti) lho.”
2.	Intervensi Strategi			

	a. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi mendengar (<i>listening</i>)		√	
	b. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi membuat catatan (<i>note talking</i>)		√	
	c. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi pertanyaan mandiri (<i>self questioning</i>)		√	
	d. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi tes lisan (<i>test talking</i>)		√	
	e. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi pemantauan kesalahan (<i>error monitor</i>)	√		Siswa ABK Dm memanggil tamu dengan sebutan negro, kemudian Am berkata, " <i>Nek ngundang mase mau "Negro" kira-kira sopan opo ora cah?</i> "

HASIL OBSERVASI DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR

Nama Guru : Am

Mata Pelajaran : Pkn

Hari/ Tanggal : Kamis, 28 April 2016

No	Aspek yang Diamati	Pernyataan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Kompetensi teknis guru			
	a. Penggunaan metode pembelajaran yang inovatif	√		Agar siswa berlomba menjawab materi pelajaran Am berkata, "Ayo nanti yang bisa menjawab dapat nilai 75."
	b. Mengimplementasikan PPI		√	Menggunakan kurikulum terpadu
	c. Memberi bantuan khusus pada ABK	√		Am mendekati Dm dan bertanya, " <i>Hayo, sing ora iso sing endi?</i> "
	d. Memberikan motivasi pada ABK		√	-
2.	Intervensi Strategi			

	a. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi mendengar (<i>listening</i>)		√	
	b. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi membuat catatan (<i>note taking</i>)		√	
	c. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi pertanyaan mandiri (<i>self questioning</i>)		√	
	d. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi tes lisan (<i>test talking</i>)	√		Am memberikan pertanyaan pada setiap siswa secara “mencongak”
	e. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi pemantauan kesalahan (<i>error monitor</i>)		√	

HASIL OBSERVASI DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR

Nama Guru : Sa
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam
Hari/ Tanggal : Kamis, 28 April 2016

No	Aspek yang Diamati	Pernyataan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Kompetensi teknis guru			
	a. Penggunaan metode pembelajaran yang inovatif		√	-
	b. Mengimplementasikan PPI		√	Menggunakan kurikulum terpadu
	c. Memberi bantuan khusus pada ABK	√		Saat FI mulai berjalan-jalan di dalam kelas Sa menghampiri FI dan memintanya duduk, sambil membuka LKS FI agar kembali memperhatikan.
	d. Memberikan motivasi pada ABK	√		Sa memuji FI yang sudah membantunya, "Terimakasih FI sudah membantu ibu"
2.	Intervensi Strategi			

	a. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi mendengar (<i>listening</i>)		√	
	b. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi membuat catatan (<i>note talking</i>)	√		Saat mencocokkan pekerjaan, guru berkata “Ayo, <i>sing durung reti jawabane ditulis nang buku, nggo sinau.</i> ”
	c. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi pertanyaan mandiri (<i>self questioning</i>)		√	
	d. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi tes lisan (<i>test talking</i>)	√		Sa memberikan pertanyaan pada siswa secaraacak, agar semua siswa siap memperhatikan.
	e. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi pemantauan kesalahan (<i>error monitor</i>)			

HASIL OBSERVASI PENGAMATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR

Nama Guru : Ad

Mata Pelajaran : Batik

Hari/ Tanggal : Jumat/ 29 April 2016

No	Aspek yang Diamati	Pernyataan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Kompetensi teknis guru			
	a. Penggunaan metode pembelajaran yang inovatif	√		Siswa diajak membuat batik nitik karawitan menggunakan media yang ada disekitar siswa, yaitu uang koin 500an.
	b. Mengimplementasikan PPI		√	Guru belum memiliki dan mengimplementasikan PPI
	c. Memberi bantuan khusus pada ABK	√		Ad mendatangi Rz, sambil melihatnya mengerjakan beliau berkata “Nggak usah buru-buru, ini butuh kesabaran, ketelatenan.” “Yang mana, yang nggak bisa, sisi saya bantu.”
	d. Memberikan motivasi pada ABK	√		Ad berkata pada Dm, “Ayo, temenmu yang laen udah dapet segitu lho!”
2.	Intervensi Strategi			

	a. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi mendengar (<i>listening</i>)	√		Ad meminta anak-anak untuk memperhatikan contoh membuat pola di papan tulis sebelum menggambar di kertas gambar
	b. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi membuat catatan (<i>note talking</i>)		√	
	c. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi pertanyaan mandiri (<i>self questioning</i>)		√	
	d. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi tes lisan (<i>test talking</i>)		√	
	e. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi pemantauan kesalahan (<i>error monitor</i>)		√	

HASIL OBSERVASI PENGAMATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR

Nama Guru : Am
 Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
 Hari/ Tanggal : Jumat/29 April 2016

No	Aspek yang Diamati	Pernyataan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Kompetensi teknis guru			
	a. Penggunaan metode pembelajaran yang inovatif	√		Siswa diajak belajar langsung di perpustakaan, agar siswa dapat belajar secara langsung di tempat tersebut
	b. Mengimplementasikan PPI		√	Guru belum memiliki dan mengimplementasikan PPI
	c. Memberi bantuan khusus pada ABK		√	-
	d. Memberikan motivasi pada ABK	√		Am berkata, “Kalau kalian senang membaca, nanti ilmu kalian akan bertambah. Dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu.”
2.	Intervensi Strategi			

	a. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi mendengar (<i>listening</i>)	√		Am meminta anak-anak mendengarkan cerita yang di bacakan, lalu anak-anak diberikan soal terkait cerita.
	b. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi membuat catatan (<i>note talking</i>)		√	
	c. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi pertanyaan mandiri (<i>self questioning</i>)	√		Am bertanya, “Kalian apa mau menjadi seperti raja yang angkuh tadi?”
	d. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi tes lisan (<i>test talking</i>)		√	
	e. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi pemantauan kesalahan (<i>error monitor</i>)		√	

HASIL OBSERVASI PENGAMATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR

Nama Guru : Id

Mata Pelajaran : Penjaskes

Hari/ Tanggal : Senin/ 2 Mei 2016

No	Aspek yang Diamati	Pernyataan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Kompetensi teknis guru			
	a. Penggunaan metode pembelajaran yang inovatif		√	-
	b. Mengimplementasikan PPI		√	Guru belum memiliki dan mengimplementasikan PPI
	c. Memberi bantuan khusus pada ABK	√		Id mengajak Fl untuk lempar-lemparan bola sendiri, karena Fl tidak mau ikut olah raga bersama teman kelasnya.
	d. Memberikan motivasi pada ABK	√		Saat siswa bermain kasti, Id berkata, “Ayo nanti yang bisa <i>nyembok</i> Dm tak kasih bonus”
4.	Intervensi Strategi			

	a. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi mendengar (<i>listening</i>)		√	
	b. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi membuat catatan (<i>note talking</i>)		√	
	c. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi pertanyaan mandiri (<i>self questioning</i>)	√		Saat Rz jajan di sekitar tempat olah raga, Id bertanya, “ <i>Hayo, wingi peranjiane nek jajan nang njobo sekolah ono dendane lho? Wis piro dendamu nek dilumpokne?</i> ”
	d. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi tes lisan (<i>test talking</i>)		√	
	e. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi pemantauan kesalahan (<i>error monitor</i>)		√	

HASIL OBSERVASI PENGAMATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR

Nama Guru : Am

Mata Pelajaran : Matematika

Hari/ Tanggal : Selasa/3 Mei 2016

No	Aspek yang Diamati	Pernyataan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Kompetensi teknis guru			
	a. Penggunaan metode pembelajaran yang inovatif	√		Am membawa benda-benda bangun ruang dan bangun datar pada siswa, siswa diminta menyebutkan nama dan sifatnya.
	b. Mengimplementasikan PPI		√	Guru belum memiliki dan mengimplementasikan PPI
	c. Memberi bantuan khusus pada ABK		√	
	d. Memberikan motivasi pada ABK	√		Am bertanya pada Dm, " <i>Wingi wis diwarai to? Kudune saiki iso.</i> "
2.	Intervensi Strategi			

	a. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi mendengar (<i>listening</i>)		√	
	b. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi membuat catatan (<i>note taking</i>)		√	
	c. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi pertanyaan mandiri (<i>self questioning</i>)		√	
	d. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi tes lisan (<i>test talking</i>)		√	
	e. Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi pemantauan kesalahan (<i>error monitor</i>)		√	

Lampiran 8: Hasil Dokumentasi

PEDOMAN DOKUMENTASI

Tingkat Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan ABK

Berilah tanda cek list(√) pada salah satu kolom yang tersedia!

No	Aspek yang Diamati	Pernyataan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Terdapat SK Tim Pengembang PPI		√	
2.	Dokumen hasil pengembangan PPI	√		Terdapat guru kelas II B yang membuat pengembangan PPI untuk siswa
3.	Memiliki format PPI	√		Terdapat format PPI yang berasal dari UNY.
4.	Data anak usia sekolah di masyarakat, baik yang sudah maupun yang belum bersekolah		√	Hanya terdapat data siswa yang bersekolah di SD Negeri 1 Trirenggo saja. Untuk siswa yang belum bersekolah, sekolah tidak memiliki data.

5.	Data pertemuan dengan wali/masyarakat	√		Terdapat notulen hasil pertemuan dengan wali murid ABK
6.	Data Kunjungan Lapangan		√	Terdapat beberapa kunjungan namun tidak didatakan
7.	Data Pelatihan Guru	√		Terdapat daftar hadir pelatihan guru-guru di SD Negeri 1 Tirenggo oleh karinakas
8.	Data Sarana dan Prasarana	√		Terdapat data media untuk melatih motorik halus siswa.

Lampiran 9 : Hasil Wawancara dan reduksi data dengan Kepala Sekolah dan guru kelas

REDUKSI DATA HASIL WAWANCARA
TINGKAT KESIAPAN SEKOLAH DALAM INPLEMENTASI PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
DI KELAS IV B SD NEGERI 1 TIRENGGO
DENGAN KEPALA SEKOLAH DAN GURU

Pertanyaan				
A. Kurikulum				
1) Apakah sekolah melaksanakan program penjarangan dan identifikasi peserta didik ABK?				
No.	Narasumber	Jawaban	Reduksi	Kesimpulan
1.	In	“Biasanya orang tua ke sini bawa anak ABK, terus tak tanyani anake kebutuhan khusus <i>opo</i> ? Kalo Dia belum tahu anake tak suruh mbawa ke sini. Jadi itu untuk identifikasi, kan nanti sudah ada <i>tabele</i> identifikasi untuk ABK. Dari ciri fisiknya atau yang lainnya. Kalau nanti dicurigai Dia berkebutuhan khusus baru kita lakukan asesmen.”	Telah dilakukan penjarangan dan identifikasi peserta didik ABK	Sekolah sudah melaksanakan penjarangan dan identifikasi untuk siswa. Meskipun identifikasi belum dapat secara menyeluruh karena masih menggunakan observasi sekilas.
2.	Am	“Iya. Sebelum mendaftarkan itu ada tim khusus yang melakukan penilaian dan observasi pada anak.” (Rabu, 4 Mei 2016)	Telah dilakukan penjarangan dan identifikasi peserta didik ABK	
3.	Sa	“Ada. Nanti dicek ke dokter. Kan disini kerjasama. Sama bu dokter titi. Sejenis dikonsultasikan itu.” (Jumat, 13 Mei 2016)	Telah dilakukan penjarangan dan identifikasi peserta didik ABK	
4.	Id	“Iya sudah, ada kaya tes IQ untuk	Telah dilakukan penjarangan dan	

		mengidentifikasi. Semacam kaya konsultasi.” “ <i>Itu kapan ya bu waktunya?</i> ” “Biasanya waktu tahun pelajaran baru, terutama anak masuk kelas satu.” (Senin, 9 Mei 2016)	identifikasi peserta didik ABK, berupa tes IQ dan konsultasi khusus di awal tahun pelajaran.	
5.	An	“Kalau sini siswa ABK ataupun tidak langsung diterima. Soalnya ada anjuran dari dinas, kan sini yang ditunjuk dinas jadi sekolah inklusi pertama di Bantul. Jadi sini harus berjuang keras untuk mencerdaskan siswa inklusi. Makannya disini jadi over ABK. Tapi setelah mereka diterima baru ada identifikasi khusus untuk mengetahui kekhususan yang dimiliki ABK.” (Rabu, 11 Mei 2016)	Terdapat proses identifikasi untuk anak ABK, meskipun proses dilakuakn setelah anak diterima di sekolah.	
2) Apakah sekolah melaksanakan asesment untuk siswa yang teridentifikasi memiliki kebutuhan khusus?				
1.	In	“Itu nanti yang melakukan asesmen dari pihak UNY. Soalnya kan instansi kita sudah MOU <i>dadi nek</i> misalnya ada asesmen jadi kita kerjasamanya sama sana. Tapi kalo itu kolektif, kalo ada dana. Kalo tidak ada nanti mungkin orang tuanya tak suruh mandiri. Seperti kemaren kan kita sudah kolektif 40 anak terus tak asesmen. Tapi kok tiba-tiba datang lagi kesini, padahal habis ada asesmen berlalu. Ya udah tak anjurkan asesmen	Terdapat asesmen secara kolektif yang dilakukan bekerjasama dengan pihak UNY. Akan tetapi jika ada siswa yang belum mengikuti asesmen secara kolektif dianjurkan untuk melakukan asesmen mandiri.	Sudah dilasanakan asesmen untuk siswa yang teridentifikasi merupakan ABK. Asesmen dilakukan oleh pihak UNY, maupun orang tua dapat melaksanakan asesmen mandiri.

		mandiri.”		
2.	Am	“Pas observasi tadi lihat anak itu memiliki hambatan atau kebutuhan khusus yang bagaimana. Kemudian baru dikelompokkan sesuai kebutuhannya. Kalo tahun kemarin itu ada tes IQ untuk mengetahui kebutuhan khusus anak.” (Rabu, 4 Mei 2016)	Saat observasi anak dilihat kebutuhan khususnya, kemudian dikelompokkan sesuai kekhususan.	
3.	Sa	“Assesmentnya nanti ya dari UNY. Kan kita bekerjasama dengan mereka.” (Jumat, 13 Mei 2016)	Dilakukan asesmen bekerjasama dengan pihak UNY.	
4.	Id	“Ya lewat tes IQ kaya tadi itu <i>Mbak</i> .” (Senin, 9 Mei 2016)	Dilakukan tes asesmen melalui tes IQ	
5.	An	“Sekolah ini sudah bekerjasama dengan pihak UNY kalo tidak salah. Jadi nanti ada tim dari UNY yang melakukan asesmen ke siswa. Dari siswa yang sudah diidentifikasi tadi kemudian dirujuk dan assesmennya dari UNY itu.” (Rabu, 11 Mei 2016)	Dilakukan asesmen bekerjasama dengan pihak UNY.	
3) Apakah sekolah membentuk tim pengembang PPI?				
1.	In	“Sekarang PPI <i>masih</i> dalam proses. Kemarin sudah dirumuskan, diprogramkan, tetapi kemudian per Januari kemarin GPKnya ditarik ke provinsi, soalnya Bu Mn tadi kan diperbantukan disini dari provinsi. Jadi kita <i>nggak</i> punya GPK. Cuma ada GPK mandiri. Sedangkan GPK mandirinya kan punya	Tim pengembang PPI <i>masih</i> dalam proses	Belum terdapat tim pengembang PPI di sekolah.

		kesibukan masing-masing, dan mereka kan juga <i>nggak</i> terikat dengan pihak sekolah. Jadi ya kita tidak bisa menuntut mereka membuat PPInya.”		
2.	Am	“Sepertinya belum ada. Soalnya PPI untuk tiap siswa juga belum ada.”	Belum terdapat tim pengembang PPI.	
3.	Sa	“Belum <i>Mbak</i> . Kalo RPP yang secara umum itu pernah ada.” (Jumat, 13 Mei 2016)	Belum terdapat tim pengembang PPI.	
4.	Id	“Belum ada <i>Mbak</i> .” (Senin, 9 Mei 2016)	Belum terdapat tim pengembang PPI.	
5.	An	“Sementara belum. Soalnya disini gurunya juga banyak kegiatan. Jadi ya PPI juga belum dibuat.” (Rabu, 11 Mei 2016)	Belum terdapat tim pengembang PPI.	
4) Bagaimanakah wujud pengembangan PPI yang ada?				
1.	In	Secara umum <i>sih</i> disini PPI belum dibuat <i>Mbak</i> , disini guru-guru juga belum tak wajibkan mbuat. Tapi ada guru yang sudah mbuat PPI itu ada <i>Mbak</i> . Bu An, kelas II A. PPI yang Dia buat ya seperti RPP itu. Nanti dibuat khusus persiswa berkebutuhan.	Secara umum PPI belum dibuat, hanya saja ada beberapa guru yang membuat PPI persiswa berkebutuhan.	Belum kesemua guru membuat PPI untuk ABK. Kepala Sekolah belum mewajibkan guru untuk membuat PPI
2.	Am	(pertanyaan sudah terjawab di pertanyaan sebelumnya)	Belum ada PPI yang dibuat.	
3.	Sa	(pertanyaan sudah terjawab di pertanyaan sebelumnya)	Belum ada PPI yang dibuat.	
4.	Id	(pertanyaan sudah terjawab di pertanyaan sebelumnya)	Belum ada PPI yang dibuat.	

5.	An	(pertanyaan sudah terjawab di pertanyaan sebelumnya)	Belum ada PPI yang dibuat.	
5) Bagiamanakah modifikasi kurikulum yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kemampuan ABK?				
1.	In	Kalau selama ini kan masih dalam proses perintisan, memberdayaan guru kelas menjadi guru pendamping khusus itu juga sudah kita tempuh, pelatihan membuat RPP yang modifikasi itu juga sudah kita tempuh. Tetapi guru-guru itu bisanya baru memberikan sampel-sampelnya saja. Jadi tidak secara keseluruhan, kan ya tugas bebannya sudah banyak. Dan lagi kan tidak semua anak membutuhkan itu, kan hanya anak-anak tertentu to <i>Mbak</i> . Misalnya <i>sing</i> tuna rungu ringan <i>yo</i> mungkin hanya dalam hal tertentu. Jadi tidak semuanya modifikasi. Selama <i>IQ</i> nya masih bisa menjangkau, masih bisa mengikuti kurikulum yang normal Dia ya memakai yang normal. Tapi kalau Dia sudah di bawah standar, misalnya ada tuna grahita ringan, lha itu baru ada modifikasi. Kalo <i>slow leaner</i> kita saja istilahnya masih perbaikan. Diperbanyak diperbaiki dan pengayaan. Kalau yang CI kan kebetulan belum ada, kalo CI kan banyak di pengayaannya.	Tidak semua ABK memerlukan adanya modifikasi kurikulum pada setiap mata pelajaran.	Tidak semua ABK memerlukan adanya modifikasi kurikulum pada setia pelajaran. Modifikasi biasanya dilakukan dengan pengurangan beban pelajaran.
2.	Am	“Untuk modifikasi kurikulum masih sama	Pengurangan beban belajar.	

		seperti anak reguler, Cuma bebannya dikurangi. Misal saja Fl anak kelas IV B itu, Dia belajarnya <i>masih</i> kaya kelas 2.” (Rabu, 4 Mei 2016)		
3.	Sa	“Modifikasinya berupa pengurangan beban. Misal saja yang siswa normal mengerjakan 10 soal, lha yang ABK ini mengerjakan 5 soal, tapi nilainya sudah seperti 10 soal.” (Jumat, 13 Mei 2016)	Pengurangan beban belajar.	
4.	Id	“Tergantung anak itu berkebutuhan khususnya itu apa. Kan tadi sudah diidentifikasi, jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhan khususnya tadi apa.” (Senin, 9 Mei 2016)	Disesuaikan dengan kebutuhan ABK.	
5.	An	“Sementara kurikulum <i>masih</i> disamakan. Tapi proses pembelajarannya dibedakan. Misalkan yang pertama otomatis untuk yang normal, baru yang inklusi. Wujudnya konkritnya biasanya pengurangan beban belajar untuk anak inklusinya. ” (Rabu, 11 Mei 2016)	Pengurangan beban belajar untuk ABK.	
6) Bagaimanakah layanan yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar bagi ABK?				
1.	In	Kalo dulu itu kan ada GPK. Jadi nanti GPK sama guru kelas yang memberi bantuan. Tapi sekarang sudah GPK sudah diberhentikan. Dulu pas ada GPK, hari Senin itu untuk yang ABK secara klasikal. Terus Jumatnya untuk	Sewaktu terdapat GPK, layanan khusus diberikan 2x tiap minggu.	Pada saat <i>masih</i> terdapat GPK, layanan diberikan seminggu dua kali pada hari Senin dan Jumat

		<p>ABK yang <i>slow leaner</i>, yang masih sulit “calistung” itu.</p> <p><i>Jadi sekarang sini statusnya tanpa GPK yang milik sekolah?</i></p> <p>Heeh, yang dari provinsi sudah <i>nggak</i> ada. Baru mulai Januari kemarin. Nek sebelumnya itu <i>masih</i> ada. Lha itu kan SKnya setiap tahun selalu diperbaharui. Memang provinsi itu mentargetkan, karna kan sebenarnya GPK itu bukan kewenangannya provinsi. GPK itu kan seharusnya yang angkat kota/kabupaten <i>Mbak</i>, jadi provinsi itu kan sebenarnya cuma membantu to, memfasilitasi. Tapi suatu ketika pasti semuanya itu ditarik</p>		
2.	Am	<p>“Kalau layanan untuk ABK sendiri saya ngerasa belum maksimal. Soalnya GPK juga habis pindah, guru kelas kalau mau fokus dengan ABK juga <i>nggak</i> bisa. Kalau mau disamakan dengan yang anak reguler juga <i>masih</i> sulit sekali.” (Rabu, 4 Mei 2016)</p>	<p>Pelayanan <i>masih</i> kurang maksimal oleh guru kelas, dikarenakan adanya mutasi GPK.</p>	
3.	Sa	<p>“Nanti di ruang khusus diadakan pembelajaran keterampilan.”</p> <p><i>“Siapa yang memberikan pembelajaran keterampilan tersebut?”</i></p>	<p>Adanya pembelajaran keterampilan di ruang khusus sewaktu <i>masih</i> ada GPK. Saat ini bibimbing guru kelas di dalam kelas bersama siswa lain.</p>	

		“Dulu ada GPK <i>Mbak</i> , tapi karena sekarang GPK sudah pindah ya sementara kosong, atau nanti guru kelas membimbing tapi di kelas.” (Jumat, 13 Mei 2016)		
4.	Id	“Itu nanti kan ada guru pendamping. Tapi itu perminggunya ada dua kali.” (Senin, 9 Mei 2016)	Terdapat guru pendamping yang mendampingi anak seminggu dua kali.	
5.	An	Untuk penjelasan didampingi sama dijelaskan sampai jelas, hampir 2 sampai 3 kali. Kadang yang normal materi sudah selesai, tapi yang ABK belum, tapi tetep ditelateni.” (Rabu, 11 Mei 2016)	Penjelasan dilakukan secara berulang-ulang	
7) Apakah sekolah telah mengatur waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi untuk ABK?				
1.	In	“Itu nanti masuknya di PPI itu bukan ya <i>Mbak</i> ? Kalau untuk anak reguler waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi itu sepertinya di RPP kan. Kalo RPP yang biasa itu semua guru sudah mbuat. Tapi kalau RPP yang khusus untuk ABK itu belum ada. Kaya yang tak jelasin tadi itu. Jadi ya sementara untuk ABK nya mengikuti yang anak reguler. Walaupun prakteknya ya nggak bisa disamakan. Terutama kriteria evaluasinya itu.”	Secara administratif waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi masih sama dengan anak reguler, karena ABK masih beracuan pada RPP pada umumnya, belum menggunakan PPI.	Waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi untuk ABK secara administratif masih disamakan dengan anak reguler. Namun untuk pelaksanaannya ABK memiliki kriteria evaluasi tersendiri.
2.	Am	“Untuk waktu pelaksanaan evaluasi biasanya	Waktu pelaksanaan evaluasi	

		sama dengan anak reguler. Sedangkan untuk kriteria evaluasi biasanya diturunkan dari yang reguler. Kalo yang reguler misal mengerjakan 10 soal, yang ABK nanti akan mengerjakan separonya."	biasanya sama dengan anak reguler, kriteria evaluasi setengah dari anak reguler.	
3.	Sa	"Seharusnya ABK dan anak reguler memiliki waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi yang berbeda dengan anak reguler. <i>Ning</i> sekolah belum membuat waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi khusus untuk ABK, jadi kalo secara administratif masih disamakan dengan anak reguler, tapi praktek dilapangan biasanya kriteria evaluasi akan diturunkan dari pada anak reguler."	Belum dibuat waktu dan kriteria evaluasi khusus untuk ABK secara administratif	
4.	Id	"Sementara masih sama kaya anak reguler, Cuma kalo kriteriannya nanti diturunkan."	Waktu pelaksanaan sama dengan anak reguler, kriteria diturunkan.	
5.	An	"Saya kan ngajar seni ya Mbak, kalau seni itu kan nggak terlalu sulit untuk anak-anak. Jadi waktu evaluasi sama penilaiannya biasanya masih sama. Kadang yang ABK malah bisa lebih bagus juga."	Waktu pelaksanaan evaluasi dan kriteria evaluasi sama dengan anak reguler.	
8) Apakah sekolah memiliki model atau format PPI?				
1.	In	"Kalo contoh-contoh format <i>sih</i> sudah ada, yang dari UNY itu. Tinggal gurunya itu bagaimana <i>le</i> membuat."	Sudah terdapat model atau format PPI dari UNY.	Sudah terdapat model atau format PPI.

2.	Am	“Ada <i>Mbak.</i> ”	Sudah terdapat model atau format PPI.	
3.	Sa	“Sudah ada. Dulu dari diklat, terus guru membuat.” (Jumat, 13 Mei 2016)	Sudah terdapat model atau format PPI	
4.	Id	“Ada.” (Senin, 9 Mei 2016)	Sudah terdapat model atau format PPI	
5.	An	“Formatnya sudah punya.” (Rabu, 11 Mei 2016)	Sudah terdapat model atau format PPI	
B. Tenaga Pendidik				
9) Apakah yang anda ketahui tentang pendidikan inklusi? Apa sajakah faktor dapat yang mempengaruhi seorang anak menjadi siswa berkebutuhan khusus?				
1.	In	<p><i>Nek</i> sepengetahuan saya itu berarti sekolah umum, tatapi disitu melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dalam hal ini anak-anak yang dilayani itu yang sifatnya ringan. Punya kebutuhan khusus yang tarafnya <i>masih</i> ringan, jadi bisa dibaurkan dengan anak-anak yang umum. Manakala ada anak-anak yang berkebutuhan khusus tapi sudah berat atau sedang itu seharusnya di SLB, supaya penanganannya lebih maksimal. Di sekolah ini pun kalo diketahui anak tidak bisa mengikuti ya dirujuk ke SLB.</p> <p><i>“Lalu apakah ibu mengetahui beberapa contoh faktor yang menyebabkan anak itu</i></p>	<p>Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang membaurkan anak berkebutuhan khusus bertaraf ringan dengan siswa normal dalam satu sekolah. Jika anak berkebutuhan khusus sudah bertaraf sedang ataupun berat akan dirujuk ke SLB.</p> <p>Faktor yang menyebabkan anak menjadi berkebutuhan khusus adalah hereditas/ keturunan, pola pikir orang tua dan pola asuh.</p>	<p>Pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang memadukan antar anak reguler, bersamaan dengan anak berkebutuhan khusus dalam suatu lingkungan pembelajaran yang sama.</p> <p>Beberapa faktor yang dapat menyebabkan seorang anak menjadi berkebutuhan khusus diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hereditas/keturunan 2. Pola pikir/asuh orang tua 3. Kecelakaan

		<p><i>menjadi berkebutuhan khusus?”</i> Biasanya sih hereditas ya Mbak, keturunan. Kemudian pola pikir orang tua ketika anak dalam masa kandungan. Kemudian ya pola asuh, itu juga mempengaruhi. Kalo orang tua terlalu keras pada anak ya anak bakalan memberontak, jadi depresi dan potensinya bisa hilang.</p>		4. Kesehatan
2.	Am	<p>“Kalo menurut saya, pendidikan inklusi itu pendidikan yang memadukan pendidikan anak reguler dengan anak berkebutuhan khusus, dipadukan disatu sekolah yang sama tanpa dibedakan.” <i>“Apakah bapak mengetahui faktor yang dapat mengakibatkan anak menjadi ABK?”</i> “Kalo faktor itu bisa dari dalam dan dari luar si Anak. Misal dari gen orang tua, atau dari lingkungannya, atau kecelakaan.” (Rabu, 4 Mei 2016)</p>	<p>Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang memadukan anak reguler dengan anak berkebutuhan khusus tanpa adanya perbedaan.</p> <p>Faktor yang dapat mengakibatkan anak menjadi berkebutuhan khusus dapat disebabkan oleh gen, lingkungan maupun kecelakaan.</p>	
3.	Sa	<p>“Pendidikan inklusi itu pendidikan dimana sekolah melaksanakan pendidikan terpadu untuk siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus.” <i>“Lalu apakah ibu mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan anak itu menjadi berkebutuhan khusus?”</i></p>	<p>Pendidikan yang memadukan siswa reguler dengan siswa berkebutuhan khusus dalam satu tempat.</p> <p>Faktor yang dapat mengakibatkan anak menjadi</p>	

		“Faktor keturunan, faktor kesehatan, dan lingkungan <i>Mbak</i> . Bisa kaya sejenis kecelakaan itu.” (Jumat, 13 Mei 2016)	berkebutuhan khusus misalnya keturunan, faktor kesehatan, dan lingkungan	
4.	Id	<p>“Pendidikan inklusi, kalo dilihat dari peserta didik itu terutama yang mempunyai pandangan kalau kita melakukan pembelajaran antara anak yang memiliki kebutuhan khusus bersamaan dengan anak normal lain. Sekarang kan anak tidak boleh disebut anak luar biasa, sekarang kan ABK sebutannya.”</p> <p><i>“Lalu apakah ibu mengetahui beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak menjadi berkebutuhan khusus?”</i></p> <p>“Ada tiga faktor <i>Mbak</i>, ada dari keturunan, lingkungan dan juga faktor eksternal, misal saja kecelakaan.” (Senin, 9 Mei 2016)</p>	<p>Pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang menempatkan anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak normal lainnya</p> <p>Faktor yang dapat mengakibatkan anak menjadi berkebutuhan khusus misalnya faktor keturunan, lingkungan dan juga faktor eksternal (kecelakaan).</p>	
5.	An	<p>“Pendidikan khusus untuk siswa yang mengalami slow leaner, pendengaran kurang sama mental kurang. Itu pendidikannya <i>kudu ekstra</i> sabar.”</p> <p><i>“Lalu apakah Bapak mengetahui beberapa faktor yang dapat menyebabkan seorang anak</i></p>	<p>Pendidikan inklusi merupakan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus.</p> <p>Faktor yang dapat mengakibatkan anak menjadi berkebutuhan khusus misalnya</p>	

		<p><i>menjadi ABK?”</i></p> <p>“Bisa proses kelahiran, proses tumbuh kembang anak yang kurang diperhatikan orang tua, sama faktor emosional yang kurang kekontrol.” (Rabu, 11 Mei 2016)</p>	<p>proses kelahiran, proses tumbuh kembang anak yang kurang diperhatikan orang tua, dan faktor emosional yang kurang kekontrol.</p>	
10) Apakah Anda terlibat dalam penjarangan, penyusunan program identifikasi, asesmen, dan pembelajaran ABK?				
1.	In	<p>“Lha kan disini Kepala Sekolah berperan menjadi penanggung jawab <i>Mbak</i>, jadi nanti kalo anak dicurigai berkebutuhan khusus langsung direferensikan. Tidak mereka putuskan sendiri, tapi saya yang memutuskan. Jadi kalau untuk penjarangannya saya ikut. Kalau untuk penyusunan program identifikasi sama asesmen itu udah ada dari UNY itu. Kalau pembelajaran kan nanti guru kelas yang melakukan, tapi kadang saya nanti <i>sok</i> ikut masuk di kelas. Sering-seringnya itu kelas enam tapinya.”</p>	<p>Terlibat sebagai penjarang siswa yang akan mengikuti asesmen.</p>	<p>Beberapa guru terlibat dalam penjarangan dan pembelajaran ABK. Dalam hal penyusunan program identifikasi dan asesmen dilakukan bekerjasama dengan pihak lain.</p>
2.	Am	<p>“Kalau penjarangannya terlibat langsung <i>sih</i> belum <i>Mbak</i>. Kaya gitu kan butuh keterampilan khusus. Kalau pembelajarannya jelas iya. Kan saya yang mengajar di kelas.” (Rabu, 4 Mei 2016)</p>	<p>Guru belum terlibat dalam proses penjarangan, penyusunan program identifikasi, dan asesmen. Namun untuk pembelajaran guru yang bertanggung jawab utama dalam kelas.</p>	

3.	Sa	“Ya hanya mengawasi untuk jalannya pengambilan tes. Tapi kalau untuk pembelajarannya ya ikut <i>Mbak</i> .” (Jumat, 13 Mei 2016)	Terlibat secara tidak langsung, yaitu sebagai pengawas jalannya tes, sedangkan palam pembelajaran, terlibat secara langsung.	
4.	Id	“Kalau yang itu saya pernah yang penjarangan, tapi kalau yang asesmen itu tidak. Kan yang melakukan itu dari tim UNY.” “ <i>Lalu bentuk keterlibatan ibu seperti apa?</i> ” “Kan yang tahu anak teridentifikasi ABKnya yang mana kan saya. Jadi saya yang menyediakan data dan memanggil anak-anak tadi. Kalau untuk pembelajaran ABKnya ya saya ikut <i>Mbak</i> . Pas saya ngajar kan juga saya mendampingi anak ABKnya juga.” (Senin, 9 Mei 2016)	Terlibat sebagai penjaring siswa yang akan mengikuti asesmen dan juga pembelajaran di kelas..	
5.	An	“Kalau untuk penjarangan, penyusunan program identifikasi dan asesmen saya belum ikut <i>Mbak</i> . Sebagai guru ya saya hanya terlibat dalam proses pembelajarannya.” (Rabu, 11 Mei 2016)	Terlibat dalam proses pembelajaran untuk ABK. Sedangkan untuk proses penjarangan, penyusunan program identifikasi dan asesmen belum terlibat.	
11) Seberapa seringkah Anda melakukan pertemuan dengan wali murid guna membicarakan perkembangan ABK?				
1.	In	Pertemuan khusus dengan wali murid biasanya sebulan sekali. Biasanya diawal	Pertemuan dengan wali murid rutin dilakukan satu bulan sekali	Terdapat pertemuan rutin yang dilakukan antara pihak sekolah

		bulan di minggu pertama, tapi nek kemaren ki pertemuan terakhir pas hari Sabtu tanggal 16. Itu saya ada fotonya.	di minggu pertama.	dan wali murid ABK satu bulan satu kali pada minggu pertama. Namun tidak semua guru dapat mengikuti pertemuan tersebut secara rutin dikarenakan bersamaan dengan jam mengajar. Jika tidak bersamaan dengan jam mengajar maka mengikutinya.
2.	Am	“Ada bimbingan dari dr Pratiwi itu sudah rutin sebulan sekali. Dan dari wali murid ABK itu sudah dibuat kepengurusan sendiri dan itu sudah berjalan.” (Rabu, 4 Mei 2016)	Terdapat pertemuan rutin dengan wali murid satu bulan sekali dan juga sudah terdapat kepengurusan diantara orang tua murid.	
3.	Sa	“Pertemuan dengan wali murid itu sebulan sekali. Kalau pas longgar <i>nggak</i> ada jam mengajar ya ikut.” (Jumat, 13 Mei 2016)	Terdapat pertemuan rutin dengan wali murid satu bulan sekali, dan mengikuti pertemuan tersebut jika terdapat jam longgar.	
4.	Id	“Pernah saya mengikuti, tapi tidak sering. Kan ada pertemuan itu satu bulan sekali, tapi biasanya kan undangan untuk wali bersamaan dengan jam mengajar. Jadi tidak dapat ikut.” (Senin, 9 Mei 2016)	Pertemuan rutin antara pihak sekolah dilakukan satu bulan sekali, tetapi tidak dapat selalu ikut dikarenakan bersamaan dengan jam mengajar.	
5.	An	“Kalau saya jarang. Mungkin wali kelasnya. Kan saya juga Cuma guru seni.” (Rabu, 11 Mei 2016)	Jarang mengikuti, dikarenakan guru kesenian.	
12) Apakah Anda pernah mengikuti program pelatihan mengenai ABK?				
1.	In	Pernah <i>Mbak</i> , yang terakhir kemarin di Tangerang, sebelumnya lagi itu di Bandung. Kalau di provinsi saya biasanya malah <i>didadekne</i> narasumber. <i>Dadi nek</i> pelatihan	Pernah mengikuti program pelatihan mengenai ABK, biasanya skala yang nasional. Misal saja di Bandung dan	Guru-guru di SD Negeri 1 Trirenggo pernah mengikuti program pelatihan mengenai ABK, dimana sekolah

		<p>nang provinsi aku malah wis ra dimelokke, <i>biasane malah nang</i> luar jogja. Dulu awal-awal di SKB, baru setelah itu di Bandung sama Tangerang itu.</p> <p>“<i>Terus nanti itu ada SKnya begitu ya Bu?</i>”</p> <p>“Iya <i>Mbak</i>, nanti ada surat tugasnya.”</p>	Tangerang. Jika terdapat program pelatihan di provinsi biasanya menjadi narasumber/pemateri.	mendatangkan tim ahli dari pihak luar maupun study banding di sekolah lain.
2.	Am	“Sudah pernah, dulu pas ada kerjasama sama PLB UNY, sama kalo <i>nggak</i> salah itu dari karinakas.” (Rabu, 4 Mei 2016)	Pernah mengikuti pelatihan dari PLB UNY dan juga karinakas.	
3.	Sa	“Sudah pernah, dulu sekolah mendatangkan. Kalo <i>nggak</i> salah sudah tiga kali. Guru kelas semuanya mengikuti. Dari UNY itu pernah, dari karinakas juga. Sama mana ya saya lupa.” (Jumat, 13 Mei 2016)	Sekolah pernah mendatangkan tim ahli sebanyak tiga kali, dimana semua guru wajib untuk mengikuti.	
4.	Id	“Kalau di sekolah pernah. Tapi kalau diluar sekolah belum.” (Senin, 9 Mei 2016)	Pernah mengikuti program pelatihan terkait ABK di sekolah	
5.	An	“Belum pernah. Cuma dulu ada sosialisasi satu kali tentang penanganan anak. <i>Eh</i> , tapi itu termasuk pelatihan juga ya. Jadi iya, pernah satu kali itu. Sama dulu pernah study banding di Budi Mulia Dua itu.” (Rabu, 11 Mei 2016)	Pernah mengikuti sosialisasi penanganan ABK dan study banding di Budi Mulia Dua (sekolah inklusi)	
13) Bagaimana wujud kerjasama yang pernah Anda lakukan dengan GPK untuk membantu ABK dalam pembelajarannya?				
1.	In	“Itukan sebenarnya sejak awal masuk, Dia itu	Kerjasama yang pernah	Kerjasama yang pernah

		tugangnya mengkoordinir guru kelas. Dia yang seharusnya tugasnya mentransfer ilmu yang sudah Dia dapat kepada guru-guru kelas. Demikian juga nanti guru-guru kelas menyampaikan kesulitannya. Disitukan ada <i>forum group discution</i> antara guru kelas dan GPK. Jadi <i>nggak</i> gek GPK menangani semua. Kalau wujud kerjasama saya sama GPK dalam pembelajaran di kelas belum secara langsung, soalnya kan saya juga <i>nggak</i> sering-sering ikut pembelajaran di kelas. Tapi kalau kerjasama secara umumnya ya <i>sok</i> tanya jawab terkait penanganan ABK. Terus juga dalam menghadirkan tim ahli pas pertemuan itu sering musyawarah bareng. Kalau GPK kan koneksi tentang hal-hal yang berkaitan sama ABK biasanya kan banyak.”	dilakukan bersama dengan GPK adalah mengkoordinasi <i>forum group discution</i> (FGD) antara guru kelas dan GPK	dilakukan antara guru dengan GPK antara lain konsultasi cara penanganan dan penyampaian materi kepada anak berkebutuhan khusus; serta mengkoordinasi <i>forum group discution</i> (FGD) antara guru kelas dan GPK, untuk Kepala Sekolah.
2.	Am	“Yang utama ya dari pendampingan belajar itu. Dan juga nanti saling konsultasi untuk cara penanganan anak yang baik itu seperti apa.” (Rabu, 4 Mei 2016)	Kerjasama yang pernah dilakukan bersama dengan GPK adalah pendampingan belajar dan juga pengkonsultasian cara penanganan anak.	
3.	Sa	“Untuk menangani anak tua wicara itu saya menanyakan bagaimana cara penangannya. Kalau menjelaskan materi pakai lisan kan sulit ditangkap siswa itu. Kalau mau pakai	Kerjasama yang pernah dilakukan bersama dengan GPK adalah pengkonsultasian cara penyampaian materi yang baik	

		isyarat tangan saya <i>nggak</i> bisa. Jadi saya tanyakan ke GPKnya.” (Jumat, 13 Mei 2016)	untuk anak berkebutuhan khusus.	
4.	Id	“Oh iya, nanti misal pas pembelajaran olah raga, tapi ada anak ABK yang tidak dapat mengikuti olah raga, terus nanti dibidang lain berhitung atau apa nanti bisa dipegang sama guru pendamping tadi.” (Senin, 9 Mei 2016)	Kerjasama yang pernah dilakukan bersama dengan GPK adalah pembagian tugas saat anak mengikuti jam olah raga. GPK akan membimbing anak dengan kegiatan lain.	
5.	An	“Dulu pernah tanya-tanya soal cara penanganan ABK di kelas sama Bu Minarti. Tapi sekarang sudah fokus di SLB.” (Rabu, 11 Mei 2016)	Kerjasama yang pernah dilakukan bersama dengan GPK adalah konsultasi terkait cara penanganan ABK dikelas.	
C. Sarana-Prasarana				
14) Apakah sarana dan prasarana yang ada sudah sesuai dengan aksesibilitas fungsionalnya?				
1.	In	Ya sebenarnya baru sekitar 60% lah. Karena saya maih merencanakan memiliki media pembelajaran edukatif untuk para ABK, agar bisa memotifasi anak. Kalo saya rasa untuk anak tuna daksa sudah mencukupi. Sudah ada prengsengan, hand dreel, ada toilet khusus ABK, alat terapi jalan itu juga ada, kemudian media pembelajaran untuk motorik halusnya sudah ada.	Sarana-prasarana yang ada baru sekitar 60% yang sesuai untuk ABK. Namun untuk anak tunadaksa sudah mencukupi.	Sarana dan prasarana yang ada belum kesemuanya sesuai dengan aksesibilitas fungsional yang seharusnya ada.
2.	Am	Kalau menurut saya belum. Soalnya baru ada alat bantu jalan yang dipinggir itu sama toilet khusus. Tapi kalau di kelas 4 itu karena ada	Sarana dan prasarana yang ada belum sesuai dengan aksesibilitas fungsional yang seharusnya ada.	

		yang tuna daksa, dari sekolah memberikan fasilitas kursi roda itu.”	Di sekolah baru terdapat alat bantu jalan, toilet khusus dan kursi roda.	
3.	Sa	“Ya ada, walau belum lengkap. Tapi ya secara umum kalau dilihat dari jenis ABK yang ada ya sudah lumayan. Ada toilet ABK, alat bantu jalan itu. Terus jalan yang naik kalau untuk anak yang pakai kursi roda itu juga ada. Di dekat kantin itu juga ada alat terapi jalan, yang batu <i>dijejer-jejer</i> itu lho <i>Mbak</i> .” (Jumat, 13 Mei 2016)	Sarana dan prasarana yang ada belum kesemuanya yang seharusnya ada untuk ABK. baru terdapat alat bantu jalan, alat terapi jalan dan toilet ABK.	
4.	Id	“Kalau menurut saya sudah. Soalnya tingkat kebutuhan khusus anak kan tidak terlalu kompleks juga. Kan ada pegangan tangan, kamar mandi ABK, terapi jalan juga ada. Diruang inklusi itu ada bundaran terus bisa buat jalan itu lho.” (Senin, 9 Mei 2016)	Sarana dan prasarana yang ada sudahsesuai dengan aksesibilitas fungsional yang seharusnya ada, dikarenakan tingkat kebutuhan khusus anak tidak terlalu kompleks.	
5.	An	“Menurut saya sudah sebenarnya.” (Rabu, 11 Mei 2016)	Sarana dan prasarana yang ada sudahsesuai dengan aksesibilitas fungsional yang seharusnya ada.	
15) Bagaimanakah sekolah dalam mengarahkan penggunaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan siswa?				
1.	In	“Dulu pas launching peresmian kelas terapi itu kan sekalian ngundang bupatinya <i>Mbak</i> , nah disitu dijelaskan ke anak-anak sama tamu-tamu termasuk orang tua siswanya guna kelas terapi. Kalau sarana prasarana lainnya	Pengarahan penggunaan sarana prasarana khusus yang baru atau Diarahkan sewaktu upacara.	Pengarahan penggunaan sarana dan prasarana dilakukan saat peresmian sarana-prasarana baru, saat upacara bendera, ataupun saat pembelajaran

		<p>misal yg toilet khusus sama <i>hand dreel</i> atau alat bantu jalan itu le njelaske pas sudah jadi alatnya. Waktu upacara itu biasane. Biar semua anak pada tahu. Kan alat-alat itu jadine juga <i>nggak</i> barengan, bertahap. Menjelaskan ke anak-anak juga bertahap cara penggunaannya. Kalau untuk sarana dan prasarana yang ada di ruang sumber itu, ya kaya media untuk melatih motorik halus itu ada di bawah tanggung jawab GPKnya, jadi nanti kalau siswa akan menggunakan biasanya akan dibawah pengawasan GPK. Tapi karena saat ini GPK lagi kosong, tanggung jawabnya ada di guru olahraga apa guru kelas.”</p>		<p>dikelas yang dilakukan oleh guru maupun GPK</p>
2.	Am	<p>“Penjelasannya biasanya kalau pas ada sarana-prasaranya yang baru itu baru dijelaskan ke anak-anak. Waktunya misal saja pas upacara. Atau diselipkan pas pembelajaran di kelas.”</p>	<p>Pengarahan dilakukan saat terdapat sarana prasarana baru. Hal tersebut dilakukan saat upacara maupun saat pembelajaran di kelas</p>	
3.	Sa	<p>“Ada. Nanti diarahkan guru kelas yang ada ABKnya.” (Jumat, 13 Mei 2016)</p>	<p>Pengarahan dilakukan guru kelas.</p>	
4.	Id	<p>“Ada. Nanti terutama diarahkan oleh GPK.” (Senin, 9 Mei 2016)</p>	<p>Pengarahan dilakuakn oleh GPK.</p>	
5.	An	<p>“Nanti itu tugasnya guru kelas atau GPK nya.”</p>	<p>Pengarahan dilakukan oleh guru kelas maupun GPK.</p>	

16) Bagaimanakah sekolah mensiasati keterbatasan sarana dan prasarana?				
1.	In	“Dulu pernah pihak sekolah membuat proposal ke Dikpora. Alhamdulillah juga turun itu. Lalu kalo ada pertemuan dengan wali murid itu kami meminta wali murid untuk iuran Rp 10.000,00 itu untuk konsumsi sama untuk mengundang pembicara, ya sejenis uang transpot untuk pembicara.”	Cara yang digunakan pihak sekolah untuk mensiasati keterbatasan sarana dan prasarana yang ada yaitu dengan membuat proposal yang ditujukan untuk dikpora.	Cara yang digunakan pihak sekolah untuk mensiasati keterbatasan sarana dan prasarana yang ada yaitu dengan membuat proposal yang ditujukan untuk dikpora, maupun bekerjasama dengan karinakas.
2.	Am	“Beberapa waktu lalu itu pihak sekolah mengajukan proposal untuk beberapa instansi. Salah satunya itu yang turun dari dikpora dan karinakas. Lalu itu untuk membangun toilet khusus.” (Rabu, 4 Mei 2016)	Sekolah mengajukan proposal pada beberapa instansi, misal saja dikpora dan karinakas.	
3.	Sa	“Ya dulu itu denger-denger pernah membuat proposal untuk dikpora juga.” (Jumat, 13 Mei 2016)	Sekolah mengajuka proposal ke dikpora.	
4.	Id	“Wah, saya malah kurang tahu je. Tapi kayaknya yang pembuatan toilet khusus ABK itu kerjasama sama karinakas.” (Senin, 9 Mei 2016)	Bekerjasama dengan karinakas.	
5.	An	“Dulu pernah mbuat proposal gitu <i>Mbak</i> . Kerjasama sama lembaga apa itu juga pernah. Tapi lupa mana. <i>Ning</i> ke dikpora juga itu <i>kayake</i> .” (Rabu, 11 Mei 2016)	Sekolah mengajukan proposal maupun bekerjasama dengan beberapa pihak. Salah satunya dengan dikpora.	
D. Lingkungan Masyarakat				
17) Bagaimanakah dukungan yang dibeikan oleh orang tua terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah?				

1.	In	Kalau dukungan masih minim. Kita memfasilitasi ada pertemuan rutin itu, tiap pertemuan iuran Rp 10.000,00 itu untuk snack dan untuk menghadirkan narasumber. Tapi itu jalannya masih banyak kendala. Dari 40 yang diundang, biasanya hanya setengahnya yang hadir. Tapi ada juga dukungan orang tua yang berupa menghadirkan GPK mandiri untuk anaknya, jadi anaknya bisa lebih maksimal di kelas. Ning ada juga orang tua yang langsung nungguin anaknya juga Mbak.”	Dukungan orang tua berupa menghadiri rapat rutin yang dilakukan oleh sekolah; iuran untuk pelaksanaan rapat; menghadirkan GPK mandiri untuk anak mereka; maupun menunggui anak mereka langsung di kelas.	Dukungan orang tua berupa membentuk pagubayan orang tua ABK yang melakukan rapat rutin untuk kemajuan anak mereka; iuran dalam pelaksanaan rapat, menghadirkan GPK mandiri; maupun mengunggui anak mereka secara langsung di kelas.
2.	Am	“Kalau dari orang tua saya menilainya bagus. Soalnya paguyuban orang tua yang inklusi sudah intensif pertemuannya. Kalau pas ada pertemuan itu mereka termotivasi sekali. Bahkan orang tua banyak yang jadi pendamping anak mereka sendiri.” (Rabu, 4 Mei 2016)	Dukungan yang diberikan orang tua sudah bagus. Terdapat paguyuban orang tua ABK yang sudah intensif melakukan pertemuan. Orang tua menjadi pendamping anak saak di sekolah.	
3.	Sa	“Sekarang dukungannya sangat antusias. Kan mungkin karena mereka merasa nyaman, ada kerjasama sama dokter juga, ada perhatian khusus.” (Jumat, 13 Mei 2016)	Orang tua antusias memberikan dukungan terhadap kegiatan anak disekolah.	
4.	Id	“Sudah berjalan baik Mbak. Orang tua ada pendampingan untuk anak. Kalau yang mampu ya dicarikan pendamping, kalau tidak ya biasanya bagaimana caranya itu orang	Dukungan orang tau terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah sudah baik. Tidak sedikit orang yua yang	

		taunya ngasih perhataian khusus.” (Senin, 9 Mei 2016)	mencarikan guru pembimbing khusus untuk anaknya.	
5.	An	“Kadang membantu gotong royong dalam membangun sarana untuk inklusi. Tapi secara umum antusias mereka tinggi dalam pendidikan inklusi untuk anaknya.” (Rabu, 11 Mei 2016)	Antusias dukungan orang tua sangat tinggi terhadap pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah	
18) Apakah terdapat pertemuan antara tim dengan orang tua siswa untuk membicarakan perkembangan siswa?				
1.	In	Ya yang tadi itu <i>Mbak</i> . Ada setiap bulan sekali	Terdapat pertemuan antara orang tua siswa dan tim ahli satu kali tiap bulan.	Terdapat pertemuan antara orang tua siswa dan tim ahli satu kali tiap bulan.
2.	Am	“Setahu saya sewaktu mendaftar itu langsung bertemu dengan yang mengobservasi itu. Dan juga tiap bulannya juga ada pertemuan yang khusus membicarakan ABK.” (Rabu, 4 Mei 2016)	Terdapat pertemuan antara orang tua siswa dan tim ahli satu kali tiap bulan.	
3.	Sa	“Ada, pas didatangkan tim ahli tadi. Biasanya satu bulan sekali itu pasti ada.” (Jumat, 13 Mei 2016)	Terdapat pertemuan antara orang tua siswa dan tim ahli satu kali tiap bulan.	
4.	Id	“Ada, sering. Itu satu bulan sekali pasti ada pertemuan. Kalau ada masalah diambil sikap bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya tadi.” (Senin, 9 Mei 2016)	Terdapat pertemuan antara orang tua siswa dan tim ahli satu kali tiap bulan.	
5.	An	“Iya. Setiap sebulan itu sekali.” (Rabu, 11 Mei 2016)	Terdapat pertemuan antara orang tua siswa dan tim ahli satu kali tiap bulan.	

19) Apakah guru mengkomunikasikan hasil belajar yang diterima anak pada orang tua?				
1.	In	“Iya, waktu pertemuan itu juga ada. Nanti orang tua dikasih tau juga perkembangan anaknya bagaimana, termasuk nilai dan perilakunya di sekolah. Tapi kalau yang lebih rinci lagi nanti itu diberikan waktu akhir semester.”	Hasil belajar dikomunikasikan saat pertemuan dengan orang tua wali.	Terdapat pengkomunikasian hasil belajar siswa pada saat pertemuan dengan orang tua wali tiap bulannya, ataupun saat tengah/akhir semester.
2.	Am	“Iya. Waktu tengah semester apa ulangan harian itu.” (Rabu, 4 Mei 2016)	Hasil belajar dikomunikasikan saat tengah semester, ataupun saat ulangan harian.	
3.	Sa	“Nanti sebulan sekali pas pertemuan.” (Jumat, 13 Mei 2016)	Hasil belajar dikomunikasikan saat pertemuan dengan orang tua wali saat pertemuan rutin tiap bulan.	
4.	Id	“Kalo yang itu kayaknya <i>enggak</i> . Pas pertemuan biasanya istilahnya hanya secara global. Kalau yang spesifik tiap individu itu belum. Paling kaya gitu Cuma mas tiap akhir semester.” (Senin, 9 Mei 2016)	Hasil belajar dikomunikasikan saat akhir semester.	
5.	An	“Iya, ada. Waktu pertemuan rutin itu.” (Rabu, 11 Mei 2016)	Hasil belajar dikomunikasikan saat pertemuan dengan orang tua wali saat pertemuan rutin.	
20) Apakah Anda pernah melakukan kunjungan ke lapangan untuk bertukar gagasan dengan masyarakat untuk terciptanya perubahan positif dalam menerapkan inklusi?				
1.	In	<i>Home visit</i> itu sudah pernah. Ada anak tuna grahita ringan, tidak mau sekolah, itukan guru	Pernah melakukan home visit pada anak tuna grahita ringan,	Kunjungan lapangan yang dilakuak berupa home visit ke

		kelasnya sering mendatangi rumahnya. Lalu ada lagi mas Ar slow leaner, saya sendiri ikut turun kalau yang itu. Padahal pas <i>try out</i> itu <i>nggak</i> mau sekolah, mandi pun belum, bangunpun belum. Sering itu <i>Mbak</i> . Lalu kerumahnya An anak kelas IV B itu juga sering.	dan slow leaner yang enggan berangkat sekolah.	rumah siswa yang memiliki kendala dalam motivasi untuk berangkat sekolah. Kunjungan dimaksudkan agar anak kembali memiliki semangat untuk datang ke sekolah.
2.	Am	“Kalau saya pernah. Ada ABK yang ngambekan <i>nggak</i> pernah masuk. Dulu hampir sudah mau rajin, tapi seminggu itu sudah tidak masuk lagi hampir sebulan. Setelah ada pendekatan ke rumah, katanya bu kepala kalau merepotkan guru baiknya dilepaskan saja. Dari pada memikirkan satu siswa, yang lainnya malah kurang perhatian.” (Rabu, 4 Mei 2016)	Pernah mendatangi rumah siswa yang tidak mau berangkat sekolah.	
3.	Sa	“Dulu pernah <i>home visit</i> itu, anak <i>nggak</i> mau berangkat ujian. Terus di datengi rumahnya.” (Jumat, 13 Mei 2016)	Pernah melakukan home visit anak yang tidak mau berangkat ujian.	
4.	Id	“Kalau seperti itu biasanya orang tua yang kesekolah <i>Mbak</i> .” (Senin, 9 Mei 2016)	Belum melaksanakan kunjungan lapangan, orang tua yang berkunjung ke sekolah.	
5.	An	“Dulu pernah ada anak yang sering <i>nggak</i> berangkat, karena Dia takut sama GPKnya. Mungkin karena sejak awal masuk mentalnya lemah, tapi kan Dia sudah dekat dengan saya.	Pernah melakukan kunjungan lapangan dan melakukan pendekatan ke anak agar mau kembali bersekolah.	

		Saya cari kesukaannya, saya ajak menggambar, mewarnai, lalu saya kasih hadiah supaya mau berangkat sekolah.” (Rabu, 11 Mei 2016)		
21) Apakah orang tua/anggota keluarga diajak berpartisipasi dalam pendidikan untuk ABK? Jika iya, bagaimana bentuk partisipasi tersebut?				
1.	In	Tentunya iya <i>Mbak</i> . Kalo dari pihak sekolah ya misal saja mengundang wali murid untuk hadir di pertemuan rutin. Dan juga, kalau orang tua itu menyadari kekhususan anaknya disekolah, biasanya mereka akan menghadirkan GPK mandiri untuk mendampingi anak mereka. Tapi tidak sedikit juga orang tua yang menunggu anaknya di kelas.	Orang tua diajak berpartisipasi dalam pendidikan untuk ABK, misalnya saja orang tua diundang dalam rapat rutin wali murid ABK, dan juga terdapat orang tua yang menghadirkan GPK mandiri untuk anaknya, atau malah langsung menunggu di sekolah.	Orang tua diajak berpartisipasi dalam pendidikan untuk ABK, misalnya saja orang tua diundang dalam rapat rutin wali murid ABK, dan juga terdapat orang tua yang menghadirkan GPK mandiri untuk anaknya, atau malah langsung menunggu di sekolah.
2.	Am	“Iya <i>Mbak</i> . Bentuk partisipasinya kaya tadi, menghadiri rapat wali terkait ABK. Dan juga pendampingan mandiri dari orang tua siswa saat di sekolah.” (Rabu, 4 Mei 2016)	Orang tua diajak berpartisipasi dalam pendidikan untuk ABK, misalnya saja orang tua diundang dalam rapat rutin wali murid ABK, dan juga terdapat orang tua yang menghadirkan GPK mandiri untuk anaknya.	
3.	Sa	“Iya. Kan banyak orang tua yang menunggu anaknya juga. Kalau <i>enggak</i> ya mereka mendatangkan GPK mandiri. Terus waktu pertemuan sebulan sekali, terus yang	Terdapat partisipasi dari orang tua. Misalnya saja saat menghadiri pertemuan rutin, mendatangkan GPK mandiri,	

		mendanai mereka juga. Itu kan termasuk partisipasi.” (Jumat, 13 Mei 2016)	dan juga iuran khusus ABK .	
4.	Id	“Ya diajak. Kan pas rapat rutinitu diundang datang. Itu kan juga berarti orang tua Diajak untuk berpartisipasi untuk kemajuan pendidikan anaknya.	Orang tua diajak berpartisipasi dengan menghadiri rapat rutin.	
5.	An	“Iya. Banyak orang tua yang menunggui anaknya. Tapi ada juga orang tua yang malah mainan HP sendiri. Itukan mengganggu konsentrasi anak belajar juga.” (Rabu, 11 Mei 2016)	Orang tua berpartisipasi dengan menghadiri rapat ruti.	
22) Apakah sekolah pernah mengundang ahli terkait ABK?				
1.	In	Iya pernah <i>Mbak</i> . Dulu pernah dari DED, Dinamika Edukasi Dasar. Itu yang datang ibu Nawak Santi. Kemudian dari Karinakas Indonesia itu. Dari Budi Mulia Dua itu juga, itu sekolah inklusi tapi yang sudah berpengalaman. Kemudian dari UGM juga, Bu dr. Pratiti.	Sekolah pernah mengundang ahli terkait ABK diantaranya dari DED (Dinamika Edukasi Dasar), Karinakas, Budi Mulia Dua, dan juga dari UGM.	Sekolah pernah mengundang ahli terkait ABK diantaranya dari DED (Dinamika Edukasi Dasar), Karinakas, Budi Mulia Dua, dan juga dari UGM.
2.	Am	“Dari dr Pratiti itu pernah, dokter psikologi dari UGM.” (Rabu, 4 Mei 2016)	Sekolah pernah mengundang dokter psikologi dari UGM, ibu dr Pratiwi.	
3.	Sa	“Dari UNY itu. Saya lupa. Dosen UGM juga pernah, tapi saya lupa namanya. Itu temannya Bu Ani.” (Jumat, 13 Mei 2016)	Sekolah pernah mengundang pihak dari UNY dan UGM yang menangani terkait ABK.	
4.	Id	“Iya pernah. Dari karina itu tahun kemarin.	Sekolah pernah mengundang	

		Dari UNY, dari puskesmas itu juga. Dokter pratiti dari UGM itu juga.” (Senin, 9 Mei 2016)	ahli terkait ABK, diantaranya dari UNY, UGM, karinakas dan juga puskesmas.	
5.	An	Sering. Misalnya bu dr Pratiwi. <i>Ngasih</i> sosialisasi.” (Rabu, 11 Mei 2016)	Sekolah pernah mengundang dr Pratiwi sebagai tim ahli ABK	

Lampiran 10 : Hasil Wawancara dan reduksi data hasil wawancara dengan Siswa

PEDOMAN WAWANCARA

Siswa

Mengenai Tingkat Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan ABK

Pertanyaan				
1) Apakah fasilitas untuk siswa berkebutuhan khusus yang diberikan sekolah telah mendukung kebutuhan siswa?				
No.	Narasumber	Jawaban	Reduksi	Kesimpulan
1.	Ed	“Sudah <i>Mbak.</i> Itu ada toilet yang untuk siswa berkebutuhan juga.”	Fasilitas yang diberikan sekolah telah mendukung kebutuhan siswa.	Fasilitas yang diberikan sekolah telah mendukung kebutuhan siswa.
2.	Gp	“Udah <i>Mbak.</i> ”	Fasilitas yang diberikan sekolah telah mendukung kebutuhan siswa.	
3.	An	“Sudah <i>Mbak.</i> ”	Fasilitas yang diberikan sekolah telah mendukung kebutuhan siswa.	
4.	Fl	“Sudah <i>Mbak.</i> ”	Fasilitas yang diberikan sekolah telah mendukung kebutuhan siswa.	
5.	Bt	“ <i>Uis Mbak.</i> ”	Fasilitas yang diberikan sekolah telah mendukung kebutuhan	

			siswa.	
6.	Dn	“Sudah <i>Mbak</i> . Ada kamar mandi khusus sama yang dipinggir-pinggir sekolah itu, untuk membantu jalan yang kesulitan jalan.”	Fasilitas yang diberikan sekolah telah mendukung kebutuhan siswa.	
2) Apakah penjelasan guru dalam menjelaskan materi mudah dipahami?				
1.	Ed	“Gampang kok Mbak. Soalnya Pak Am kalo njelasin sampe paham.”	Penjelasan guru mudah dipahami.	Penjelasan guru mudah dipahami asalkan memperhatikan, namun ada siswa yang masih kesulitan dalam memahami pelajaran matematika.
2.	Gp	“ <i>Nek matika kae sok angel. Lha aku ora iso.</i> ”	Murid kesulitan dalam memahami penjelasan matematika	
3.	An	“ <i>Nek pas nggatekne dong mbak</i> ”	Penjelasan mudah dipahami kalau memperhatikan.	
4.	Fl	“ <i>Ho.oh Mbak.</i> ”	Penjelasan guru mudah dipahami	
5.	Bt	“Gampang kok Mbak.”	Penjelasan guru mudah dipahami	
6.	Dn	“Dulu sih kadang sulit Mbak, tapi setelah banyak memperhatikan jadine gampang.”	Penjelasan guru mudah dipahami	
3) Selain guru kelas, adakah yang akan membantumu dalam pembelajaran di kelas?				
1.	Ed	“Mbak Siti sama Ibunya An itu ada di kelas, jadi sok ngewangi Mbak nek misal ono sing tanya.”	Ada GPK Mandiri dari siswa Fl dan juga wali murid An yang kadang membantu dalam pembelajaran di kelas.	Ada GPK Mandiri dari siswa Fl dan juga wali murid An yang kadang membantu dalam pembelajaran di kelas.

2.	Gp	“Kadang dibantu Ibunya An, atau <i>Mbak</i> Siti itu.”	Ada GPK Mandiri dari siswa Fl dan juga wali murid An yang kadang membantu dalam pembelajaran di kelas.	
3.	An	“Sok diewangi ibuk.”	wali murid dari siswa bersangkutan kadang membantu dalam pembelajaran di kelas.	
4.	Fl	“ <i>Sok Mbak Siti. Sok-sok yo Ibune An.</i> ”	Ada GPK Mandiri dari siswa Fl dan juga wali murid An yang kadang membantu dalam pembelajaran di kelas.	
5.	Bt	“ <i>Sok-sok Mbak Siti. Sok-sok ibuke An Mbak.</i> ”	Ada GPK Mandiri dari siswa Fl dan juga wali murid An yang kadang membantu dalam pembelajaran di kelas.	
6.	Dn	“Ada <i>Mbak</i> Siti dan Ibunya An.”	Ada GPK Mandiri dari siswa Fl dan juga wali murid An yang kadang membantu dalam pembelajaran di kelas.	

Lampiran 11 : Reduksi, Penyajian Data dan Kesimpulan Hasil Observasi Kompetensi Guru dalam Pembelajaran

HASIL OBSERVASI PENGAMATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR

No	Aspek yang Diamati	Deskripsi	Kesimpulan
1.	Kompetensi teknis guru		
	a. Penggunaan metode pembelajaran yang inovatif	<p><u>Pengamatan I</u> Dalam menghirung rusuk bangun ruang, siswa diajak untuk membuat jaring-jaring kubus secara langsung. Sehingga mempermudah siswa dalam memvisualkan bangun ruang.</p> <p><u>Pengamatan II</u> Agar siswa berlomba menjawab materi pelajaran Am berkata, “Ayo nanti yang bisa menjawab dapat nilai 75”</p> <p><u>Pengamatan III</u> -</p> <p><u>Pengamatan IV</u> Siswa diajak membuat batik nitik karawitan menggunakan meDia yang ada disekitar siswa, yaitu uang koin 500an.</p> <p><u>Pengamatan V</u> Siswa diajak belajar langsung di perpustakaan,</p>	Guru telah menggunakan beberapa metode pembelajaran yang inovatif

		<p>agar siswa dapat belajar secara langsung di tempat tersebut.</p> <p><u>Pengamatan VI</u></p> <p>-</p> <p><u>Pengamatan VII</u></p> <p>Am membawa benda-benda bangun ruang dan bangun datar pada siswa, siswa diminta menyebutkan nama dan sifatnya.</p>	
	b. Mengimplementasikan PPI	<p><u>Pengamatan I</u></p> <p>Guru belum memiliki dan mengimplementasikan PPI (Menggunakan kurikulum terpadu)</p> <p><u>Pengamatan II</u></p> <p>Guru belum memiliki dan mengimplementasikan PPI (Menggunakan kurikulum terpadu)</p> <p><u>Pengamatan III</u></p> <p>Guru belum memiliki dan mengimplementasikan PPI (Menggunakan kurikulum terpadu)</p> <p><u>Pengamatan IV</u></p> <p>Guru belum memiliki dan mengimplementasikan PPI (Menggunakan kurikulum terpadu)</p> <p><u>Pengamatan V</u></p> <p>Guru belum memiliki dan mengimplementasikan PPI (Menggunakan kurikulum terpadu)</p> <p><u>Pengamatan VI</u></p> <p>Guru belum memiliki dan mengimplementasikan PPI (Menggunakan kurikulum terpadu)</p>	Guru belum memiliki dan mengimplementasikan PPI (Menggunakan kurikulum terpadu)

		<u>Pengamatan VII</u> Guru belum memiliki dan mengimplementasikan PPI (Menggunakan kurikulum terpadu)	
	c. Memberi bantuan khusus pada ABK	<u>Pengamatan I</u> Am membantu Rz untuk membuat jaring-jaring. <u>Pengamatan II</u> Am mendekati Dm dan bertanya, “ <i>Hayo, sing ora iso sing endi?</i> ” <u>Pengamatan III</u> Saat Fl mulai berjalan-jalan di dalam kelas Sa menghampiri Fl dan memintanya duduk, sambil membuka LKS Fl agar kembali memperhatikan. <u>Pengamatan IV</u> Ad mendatangi Rz, sambil melihatnya mengerjakan beliau berkata “Nggak usah buru-buru, ini butuh kesabaran, ketelatenan.” “Yang mana, yang nggak bisa, sisi saya bantu.” <u>Pengamatan V</u> <u>Pengamatan VI</u> Id mengajak Fl untuk lempar-lemparan bola sendiri, karena Fl tidak mau ikut olah raga bersama teman kelasnya. <u>Pengamatan VII</u>	Guru dapat memberikan bantuan khusus pada ABK, terutama dalam membimbing belajar
	d. Memberikan motivasi pada ABK	<u>Pengamatan I</u> Am memberikan motivasi pada kelas dan termasuk ABK didalamnya, “Ayo, setiap yang ada	Guru telah memberikan beberapa motivasi untuk ABK secara keseluruhan untuk siswa di kelas maupun ke individu ABK secara

		<p>di sini nanti dinilai <i>Mbaknya</i> (peneliti) lho.”</p> <p><u>Pengamatan II</u></p> <p>-</p> <p><u>Pengamatan III</u></p> <p>Sa memuji Fl yang sudah membantunya (membagikan buku), “Terimakasih Fl sudah membantu ibu”</p> <p><u>Pengamatan IV</u></p> <p>Ad berkata pada Dm, “Ayo, temenmu yang laen udah dapet segitu lho!”</p> <p><u>Pengamatan V</u></p> <p>Am berkata, “Kalau kalian senang membaca, nanti ilmu kalian akan bertambah. Dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu.”</p> <p><u>Pengamatan VI</u></p> <p>Saat siswa bermain kasti, Id berkata, “Ayo nanti yang bisa <i>nyembok</i> Dm tak kasih bonus”</p> <p><u>Pengamatan VII</u></p> <p>Am bertanya pada Dm, “<i>Wingi wis diwarai to? Kudune saiki iso.</i>”</p>	langsung
2.	Intervensi Strategi		
	Guru menekankan kemampuan pengajaran melalui strategi khusus	<p><u>Pengamatan I</u></p> <p>strategi pemantauan kesalahan (<i>error monitor</i>) Siswa ABK Dm memanggil tamu dengan sebutan negro, kemudian Am berkata, “<i>Nek ngundang mase mau “Negro” kira-kira sopan opo ora</i></p>	Guru telah menggunakan beberapa strategi khusus, diantaranya adalah strategi mendengar (<i>listening</i>); strategi membuat catatan (<i>note talking</i>); Strategi pertanyaan mandiri (<i>self questioning</i>); dan strategi pemantauan

		<p>cah?”</p> <p><u>Pengamatan II</u> strategi tes lisan (<i>test talking</i>) Am memberikan pertanyaan pada setiap siswa secara “mencongak”</p> <p><u>Pengamatan III</u> strategi membuat catatan (<i>note talking</i>) Saat mencocokkan pekerjaan, guru berkata “Ayo, sing durung reti jawabane ditulis nang buku, nggo sinau.” Strategi tes lisan (<i>test talking</i>) Sa memberikan pertanyaan pada siswa secaraacak, agar semua siswa siap memperhatikan.</p> <p><u>Pengamatan IV</u> strategi mendengar (<i>listening</i>) Ad meminta anak-anak untuk memperhatikan contoh membuat pola di papan tulis sebelum menggambar di kertas gambar</p> <p><u>Pengamatan V</u> Strategi mendengar (<i>listening</i>) Am meminta anak-anak mendengarkan cerita yang di bacakan, lalu anak-anak diberikan soal terkait cerita. Strategi pertanyaan mandiri (<i>self questioning</i>) Am bertanya, “Kalian apa mau menjadi seperti raja yang angkuh tadi?”</p>	kesalahan (<i>error monitor</i>)
--	--	--	------------------------------------

		<p><u>Pengamatan VI</u> Strategi pertanyaan mandiri (<i>self questioning</i>) Saat Rz jajan di sekitar tempat olah raga, Id bertanya, “<i>Hayo, wingi peranjiane nek jajan nang njobo sekolah ono dendane lho? Wis piro dendamu nek dilumpokne?</i>”</p> <p><u>Pengamatan VII</u> -</p>	
--	--	--	--

Lampiran 12 : Triangulasi Data

PENYAJIAN DATA, TRIANGULASI TEKNIK DAN SUMBER

No.	Aspek	Indikator dan Triangulasi Teknik	Triangulasi Sumber			Kesimpulan
			Kepala Sekolah	Guru	Siswa	
1.	Kurikulum	a. Mengikuti proses pengembangan PPI				
		Wawancara	Terdapat proses identifikasi dan asesmen untuk ABK	Guru 1 Terdapat proses identifikasi, rujukan dan asesmen untuk ABK	-	Valid, sekolah telah melaksanakan proses identifikasi, asesmen, dan rujukan. Sedangkan untuk proses pertemuan tim rujukan dan pertemuan tim asesmen sekolah belum melaksanakan,
				Guru 2 Terdapat proses identifikasi untuk anak ABK, meskipun proses dilakukan setelah anak diterima di sekolah.		
		Observasi	-			
		Dokumentasi	-			
		b. Membentuk tim pengembang PPI				
		Wawancara	Tim pengembang PPI masih dalam proses, karena GPK baru saja ditarik ke provinsi per bulan Januari.	Guru 1 Belum terdapat tim pengembang PPI, karena PPI juga belum dibuat.		Valid, sekolah belum membentuk tim pengembang PPI
				Guru 2		

				Belum terdapat tim pengembang PPI.		
		Observasi	-			
		Dokumentasi	-			
		c. Melaksanakan pengembangan PPI				
		Wawancara	Secara umum PPI belum dibuat, hanya saja ada beberapa guru yang membuat PPI persiswa berkebutuhan.	Guru 1 Belum ada PPI yang dibuat. Guru 2 Belum terdapat tim pengembang PPI.	-	Valid, Sekolah belum melaksanakan pengembangan PPI
		Observasi	-			
		Dokumentasi	-			
		d. Melakukan modifikasi kurikulum dan isi materi				
		Wawancara	Tidak semua ABK memerlukan adanya modifikasi kurikulum pada setiap mata pelajaran. Selama ABK masih bisa mengikuti kurikulum normal, maka adan digunakan kurikurum yang sama dengan anak reguler	Guru 1 Tidak semua ABK memerlukan adanya modifikasi kurikulum pada setiap mata pelajaran. Modifikasi biasanya dilakukan dengan pengurangan beban pelajaran. Guru 2 Disesuaikan dengan kebutuhan ABK, biasanya berupa pengurangan beban belajar		Valid, pengembangan kurikulum berupa pengurangan beban belajar

		Observasi	-			
		Dokumentasi	-			
		e. Mengatur pemberian layanan				
		Wawancara	Sewaktu terdapat GPK, layanan khusus diberikan 2x tiap minggu. Hari Senin untuk ABK secara klasikal, sedangkan pada hari Jumat untuk ABK yang memiliki kekhususan <i>slow leaner</i> .	Layanan yang diberikan guru kelas masih kurang maksimal, karena adanya murasi dari GPK. Sewaktu terdapat GPK, bimbingan khusus diberikan seminggu dua kali di hari Senin dan Jumat.	Layanan dari guru berupa penjelasan materi yang berulang apabila terdapat kesulitan	Valid, terdapat layanan khusus yang diberikan 2x tiap minggu. Hari Senin untuk ABK secara klasikal, sedangkan pada hari Jumat untuk ABK yang memiliki kekhususan <i>slow leaner</i>
		Observasi	-			
		Dokumentasi	-			
		f. Merencanakan waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi				
		Wawancara	Secara administratif waktu pelaksanaan dan kriteria evaluasi masih sama dengan anak reguler, karena ABK masih beracuan pada RPP pada umumnya, belum menggunakan PPI.	Guru 1 Waktu pelaksanaan evaluasi biasanya sama dengan anak reguler, kriteria evaluasi setengah dari anak reguler.		Valid, secara administratif pelaksanaan dan kriteria evaluasi masih sama dengan anak reguler, akan tetapi waktu pelaksanaan evaluasi biasanya sama dengan anak reguler, kriteria evaluasi setengah dari anak reguler.
				Guru 2 Belum dibuat waktu dan kriteria evaluasi khusus untuk ABK secara administratif		
		Observasi	-			
		Dokumentasi	-			
		g. Memiliki model atau format PPI				

		Wawancara	Sudah terdapat model atau format PPI dari UNY.	Guru 1 Sudah terdapat model atau format PPI.		Valid, karena data dari ketiga sumber menyatakan bahwa sudah ada model atau format PPI di sekolah.	
				Guru 2 Sudah terdapat model atau format PPI.			
		Observasi	-				
		Dokumentasi	-				
2.	Tenaga Pendidik	a. Kompetendi teknis					Valid, karena data dari ketiga sumber dan teknik menunjukkan bukti adanya kompetensi teknis yang dimiliki guru
		Wawancara	Kepala Sekolah telah mengetahui terkait pendidikan inklusi dan faktor yang menyebabkan anak menjadi berkebutuhan khusus	Guru telah mengetahui terkait pendidikan inklusi dan faktor yang menyebabkan anak menjadi berkebutuhan khusus			
			Terlibat sebagai penjaring siswa yang akan mengikuti asesmen.	Guru belum telibat dalam proses penjaringan, penyusunan program identifikasi, dan asesmen. Namun untuk pembelajaran guru yang bertanggung jawab utama dalam kelas.			
			Aktif mengikuti pertemuan dengan wali murid rutin yang dilakukan satu bulan sekali di minggu pertama.	Terdapat pertemuan rutin dengan wali murid satu bulan sekali, dan mengikuti pertemuan tersebut jika terdapat jam longgar.			

			Pernah mengikuti program pelatihan mengenai ABK, biasanya skala yang nasional. Misal saja di Bandung dan Tangerang. Jika terdapat program pelatihan di provinsi biasanya menjadi narasumber/pemateri	Sekolah pernah mengadakan pelatihan untuk guru, yang diisi oleh PLB UNY dan juga karinakas		
	Observasi	1. Guru telah menggunakan metode pembelajaran yang inovatif 2. Guru mampu memberikan bantuan pada ABK 3. Guru mampu memberikan motivasi pada ABK 4. Guru telah menggunakan intervensi strategi khusus				
	Dokumentasi	-				
	b. Kompetensi kolaboratif					
	Wawancara	Kerjasama yang pernah dilakukan bersama dengan GPK adalah mengkoordinasi <i>forum group discution</i> (FGD) antara guru kelas dan GPK	Kerjasama yang pernah dilakukan bersama dengan GPK adalah pendampingan belajar dan juga pengkonsultasian cara penanganan anak.	-	Valid, karena sumber dan teknik menunjukkan bukti adanya kompetensi kolaboratif yang dimiliki tenaga pendidik, yaitu mengikuti pertemuan dengan wali dan juga bekerjasama dengan	
		Mengikuti pertemuan rutin dengan wali	Mengikuti pertemuan rutin dengan wali			
	Observasi					
	Dokumentasi	Gambar 3a				

						GPK.
3.	Sarana dan Prasarana	a. Pengadaan sarana dan prasarana khusus				
		Wawancara	Sarana-prasarana yang berkaitan dengan ABK baru ada sekitar 60%. Terdapat prengsengan, hand dreel, toilet khusus ABK, alat terapi jalan, dan media pembelajaran untuk motorik halus. Saat ini sekolah tengah mengusahakan media pembelajaran edukatif untuk siswa.	Meskipun belum 100%, akan tetapi telah terdapat sarana dan prasaran untuk ABK. Antara lain alat bantu jalan, alat terapi jalan, kursi roda, dan juga toilet khusus ABK.	Fasilitas yang ada sudah sesuai untuk ABK. terdapat toilet khusus ABK dan juga alat bantu jalan.	Valid, karena ketiga sumber dan teknik telah menyatakan adanya sarana-prasaran yang berkaitan dengan ABK.
		Observasi	Terdapat ruang sumber inklusi yang didalamnya terdapat ruang bimbingan konseling. Dalam ruang sumber inklusi terdapat alat latihan jalan dan juga media pembelajaran motorik halus. Selain hal tersebut di sekitar sekolah terdapat alat bantu jalan, alat latihan jalan dan juga toilet khusus ABK.			
		Dokumentasi	Gambar 1d			
		b. Pengelolaan sarana dan prasarana				
	Wawancara	Pengelolaan sarana-prasarana dilakukan oleh Kepala Sekolah, guru dan GPK	Penjelasan penggunaan sarana-prasarana yang baru, dilakukan saat upacara bendera maupun di kelas	-	Valid, karena sumber dan teknik menunjukkan adanya bukti penglolaan sarana dan prasarana yang dilakukan di SD	

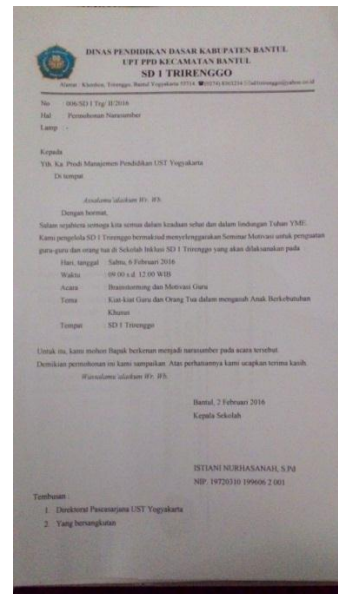
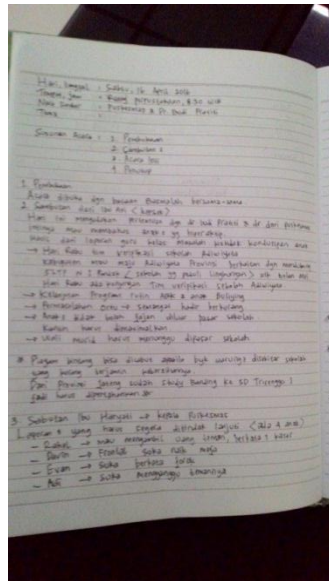
			Sekolah menyiasati keterbatasan sarana-prasarana dengan bekerjasama dengan instansi lain misal dikpora dan karina kas	Sekolah menyiasati keterbatasan sarana-prasarana dengan bekerjasama dengan instansi lain misal dikpora dan karina kas		Negeri 1 Tirirenggo, yaitu adanya penjelasan pada siswa dan masyarakat sekitar tentang sarana-prasarana inklusi, dan dalam menyiasati keterbatasan sarana-prasarana dengan bekerjasama dengan pihak lain
		Observasi	-			
		Dokumentasi	Gambar 3b			
4.	Lingkungan Masyarakat	a. Mengadakan pertemuan				
		Wawancara	Terdapat pertemuan antara orang tua siswa dan tim ahli satu kali tiap bulan.	Terdapat pertemuan antara orang tua siswa dan tim ahli satu kali tiap bulan.	-	Valid, karena data dari kedua sumber dan teknik menunjukkan bukti adanya pertemuan yang dilakukan berkaitan dengan ABK.
		Observasi	-			
		Dokumentasi	Gambar 3a			
		b. Mengirim hasil laporan belajar				
		Wawancara	Hasil belajar dikomunikasikan saat pertemuan dengan orang tua wali.	Guru 1 Hasil belajar dikomunikasikan setelah siswa mengikuti ulangan harian, saat rapat rutin tiap bulan, dan juga saat akhir semester	-	Valid, karena data dari ketiga sumber menunjukkan pengiriman hasil laporan belajar dilakukan setelah siswa mengikuti ulangan harian, saat
				Guru 2		

			Hasil belajar dikomunikasikan saat pertemuan dengan orang tua wali saat pertemuan rutin.		rapat rutin tiap bulan, dan juga saat akhir semester
		Observasi	-		
		Dokumentasi	-		
		c. Melakukan kunjungan lapangan			
		Wawancara	Pernah melakukan home visit pada anak tuna grahita ringan, dan slow leaner yang enggan berangkat sekolah.	Guru 1 Kunjungan lapangan (<i>home visit</i>) dilakukan pada anak yang kurang memiliki motivasi untuk berangkat ke sekolah Guru 2 Pernah melakukan <i>home visit</i> anak yang tidak mau berangkat ujian.	Valid, karena ketiga sumber menyatakan pernah melakukan home visit pada anak yang kurang memiliki motivasi untuk berangkat ke sekolah.
		Observasi	-		
		Dokumentasi	-		
		d. Melibatkan anggota keluarga			
		Wawancara	Orang tua diajak berpartisipasi dalam pendidikan untuk ABK, misalnya saja orang tua diundang dalam rapat rutin wali murid ABK, dan juga terdapat orang	Bentuk keterlibatan orang tua dalam pendidaiakn anak berkebutuhan khusus antara lain: 1. Menghadiri rapat rutin tiap bulan 2. Menghadirkan GPK	Ada Pengasuh dari siswa FI dan juga wali murid An yang kadang membantu dalam pembelajaran di kelas.
					Valid, karena ketiga sumber dan teknik menyatakan bahwa anggota keluarga terlibat dalam pendidikan untuk ABK, diantaranya

			tua yang menghadirkan GPK mandiri untuk anaknya, atau malah langsung menunggu di sekolah.	untuk anaknya 3. Menunggu secara langsung anaknya di kelas.		adalah dengan mengikuti rapat rutin, menghadirkan GPK mandiri untuk anaknya, maupun menunggu secara langsung anaknya di kelas.
		Observasi	Di kelas IV B terdapat wali murid dari siswa An yang menderita tuna grahita. Wali murid tersebut setiap harinya menunggu anaknya di kelas. Selain itu terdapat juga pengasuh dari siswa Fl yang menunggu siswa tersebut di kelas setiap harinya.			
		Dokumentasi	Gambar 3a dan gambar 3d			
		e. Mengundang ahli				
		Wawancara	Sekolah pernah mengundang ahli terkait ABK diantaranya dari DED (Dinamika Edukasi Dasar), Karinakas, Budi Mulia Dua, dan juga dari UGM.	Sekolah pernah mengundang dokter psikologi dari UGM, ibu dr Pratiwi, UNY, karinakas dan juga dari puskesmas.	-	Valid, karena terdapat bukti sekolah telah menghadirkan tim ahli terkait ABK.
		Observasi	-			
		Dokumentasi	Gambar 1b dan gambar 3c			

Lampiran 13. Dokumentasi

1. Dokumentasi Data Penunjang Pelaksanaan Pendidikan Inklusi



Gambar 1a. Notulen Pertemuan dengan Wali Murid ABK

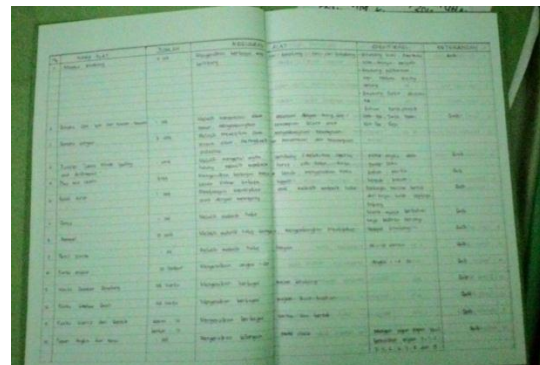
Gambar 1b. Undangan untuk Ahli Terkait ABK

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin, 30 November 2015
Akan : Pembekalan Guru Kelas Mengajar Guru Pendamping Khusus

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ISTIANI NURHASANAH	KEB. K.S.	1. [Signature]
2.	Purwati	KAB. MB.	2. [Signature]
3.	Siti Aisyah	Guru	3. [Signature]
4.	Sugengaji	Guru	4. [Signature]
5.	Alim Mubtaka	Guru	5. [Signature]
6.	Marbani	Guru	6. [Signature]
7.	Purnomono	Guru	7. [Signature]
8.	Dan Rana S.	Guru	8. [Signature]
9.	Lutfiah Nurrahma	Guru	9. [Signature]
10.	Ay. Nurhasanah	Pendamping	10. [Signature]
11.	Nurhasanah	Guru	11. [Signature]
12.	Muhammad Nurrahma	Guru	12. [Signature]
13.	Muhammad Nurrahma	Guru	13. [Signature]
14.	Muhammad Nurrahma	Guru	14. [Signature]
15.	Sugengaji	Kepengantar	15. [Signature]
16.	Muhammad Nurrahma	Guru	16. [Signature]
17.	Alim Mubtaka	Guru	17. [Signature]
18.	Muhammad Nurrahma	Guru	18. [Signature]
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			

Bastu, 30 November 2015
Kepala Sekolah
ISTIANI NURHASANAH S.Pd
NIP. 19720310 199006 2 001



Gambar 1c. Daftar Hadir Guru dalam Pelatihan dengan Karinakas

Gambar 1d. Rekapan media pembelajaran untuk melatih motorik halus ABK.

2. Dokumentasi sarana Penunjang Pelaksanaan Pendidikan Inklusi



Gambar 2a.
Ruang Sumber Inklusi



Gambar 2b.
Ruang Bimbingan Konseling



Gambar 2c. Toilet Khusus ABK

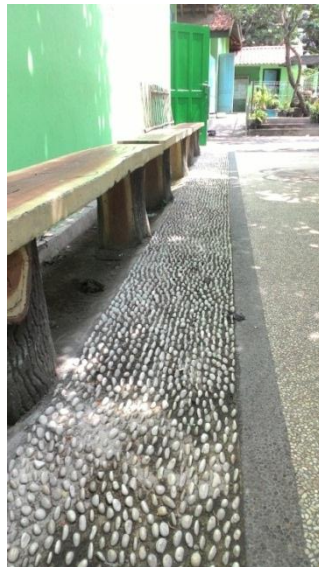




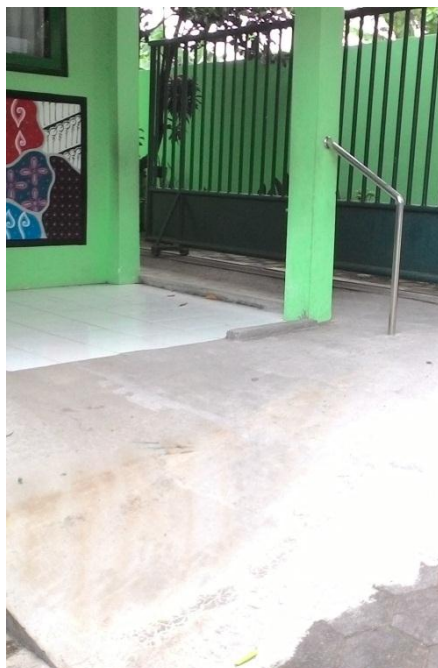
Gambar 2d. Media Pembelajaran
untuk Motorik Halus



Gambar 2e. *Snellen Chart*



Gambar 2f. Alat Terapi Jalan
untuk Tuna Daksa



Gambar 2g. Alat Bantu Jalan untuk Tuna Daksa “*Hand dreel*”

3. Dokumentasi Kegiatan Berbasis Pelaksanaan Pendidikan Inklusi



Gambar 3a. Pertemuan dengan Wali Murid Khusus ABK



Gambar 3b. Peresmian/*launching* kelas inklusi



Gambar 3c. Mengundang Ahli Terkait ABK



Gambar 3c Pendampingan Belajar dari Orang Tua

4. Dokumentasi Kegiatan dalam Penelitian



Gambar 4a. Pembelajaran di Ruang Perpustakaan



Gambar 4b. Kerjabakti di Lingkungan Sekolah



Gambar 4c. Upacara Hari Kebangkitan Nasional



Gambar 4d. Ruang Keterampilan/Kerawitan



Gambar 4e. Senam di hari Jumat

Lampiran 14: Data ABK SD Negeri 1 Tirenggo


DATA SISWA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) TAHUN PELAJARAN 2015/2016									
Nama Sekolah		: SD 1 Tirenggo							
Alamat Sekolah		: Klembon, Tirenggo, Bantul							
No. Telp Sekolah		: 085101363234							
Nama Kepala Sekolah		: Istiani Nurhasanah, S.Pd							
No. Telp/HP Kepala Sekolah		: 081327272440							
No	Nomor Induk Siswa	NAMA SISWA	Kelas	L/P	Tempat, tanggal lahir	Jenis Kerbutuhan Khusus	Nama Orang Tua	Pekerjaan Orang Tua	Alamat Rumah
1	715	Rahelsa Ferdianisayah	1	L	Bantul, 10 Februari 2009	Slow Learner	Krisdiantoro	-	Klembon, Tirenggo, Bantul
2	721	Adin Adinata Eka	1	L	Bantul, 15 Juni 2009	Slow Learner	Subekti	Dagang	Klembon, Tirenggo, Bantul
3	722	Adli Mahardika	1	L	Bantul, 17 Februari 2008	Slow Learner	Yulianto Purnomo	Buruh	Pepe, Tirenggo, Bantul
4	728	Chesya Marreta Anestasya	1	P	Bantul, 21 Maret 2009	Slow Learner	Sumanto	Wiraswasta	Pepe, Tirenggo, Bantul
5	733	Faishal Nur Rizky Ramadhan	1	L	Bantul, 12 September 2008	Slow Learner	Triyadi	Buruh	Pepe, Tirenggo, Bantul
6	736	Hasna Putri Isnaeni	1	P	Bantul, 15 Maret 2009	Slow Learner	Paryadi	Buruh	Klembon, Tirenggo, Bantul
7	739	King Michael Budi Sopotan	1	L	Sleman, 20 Januari 2009	Slow Learner	Mega Minarti	-	Code, Tirenggo, Bantul
8	741	Muhammad Farel	1	L	Bantul, 22 Oktober 2008	Slow Learner	Muh Khairudin	Buruh	Pepe Ngentak, Tirenggo, Bantul
9	730	Davin Alfatih Febrian	1	L	Bantul, 27 Februari 2009	Slow Learner	Dudy Riwantono	PNS	Code, Tirenggo, Bantul
10		Laudiya Putri Purnama Santi	1	P	Bantul, 22 Mei 2006	Slow Learner	Eko Purnomo	Karyawan Swasta	Plambongan, Triwidadi, Pajangan, Bantul
11	746	Vita Hana Faustina	1	P	Bantul, 29 November 2008	Slow Learner	Sukarjo	Buruh	Code, Tirenggo, Bantul
12	747	Wahyu Felly Widowati	1	P	Bantul, 3 Maret 2009	Slow Learner	Susanto	Buruh	Code, Tirenggo, Bantul
13	667	Aziz Maulana Ibrahim	2	L	Bandung, 27 Oktober 2005	Slow Learner	Agus Kurnia	Pedagang Kecil	Pepe, Tirenggo, Bantul
14	685	Aldhino Hilmi Firmansyah	2	L	Bantul, 31 Mei 2007	Tuna Rungu Wicara Ringan	Helmi Purwanto	Wiraswasta	Ngaglik, Jetis, Bantul
15	690	Ferdi Setyawan	2	L	Bantul, 15 November 2006	Mental Defective	Widodo Raharjo	Karyawan Swasta	Keyongan Kidul, Sabdodadi, Bantul
16	691	Fitria Ramadhani	2	P	Bantul, 14 Januari 2008	Mental Defective	Sularso	Buruh	Klembon, Tirenggo, Bantul
17	706	Diego Tegar Nugoroho	2	L	Bantul, 27 November 2007	Below Average	Eko Widayanto Nugoroho	Buruh	Klembon, Tirenggo, Bantul
18	710	Muh Fawaz Al Ghozali	2	L	Bantul, 21 Maret 2008	Tuna Rungu Wicara Ringan	Sudaryanto	Buruh	Pepe, Tirenggo, Bantul
19	696	Pandu Pratama Hardiyanto	2	L	Jambi, 11 April 2007	Tuna Rungu Wicara Ringan	Irwan Hardiyanto	PNS	Siyangan, RT01, Triharjo, Pandak
20	753	Detra Zaki Ar Raafi	2	L	Bantul, 2 April 2007	Slow Learner	Gading Newa Yulla	Buruh	Diro, Pendowoharjo, Sewon, Bantul
21	754	RA. Zahra Salma Arindra Putri	2	P	Bantul, 28 Februari 2008	Slow Learner	Hendrata Sulisty	Buruh	Pepe, Tirenggo, Bantul

No	Nomor Induk Siswa	NAMA SISWA	Kelas	L/P	Tempat, tanggal lahir	Jenis Kerbutuhan Khusus	Nama Orang Tua	Pekerjaan Orang Tua	Alamat Rumah
22	755	Muhammad Yusuf Irvansyah	2	L	Bantul, 20 September 2006	Mental Defective	Suko Purwantoro	Buruh	Kadireso, Triwidadi, Pajangan, Bantul
23	752	Muhammad Dzaky Azzahra	2	L	Bantul, 15 Januari 2007	ADHD Slow Learner	Suharyanto	Buruh	Selobentar, Trimurti, Srandakan, Bantul
24	611	Muh Jihan Nur Iza Mustaqim	3	L	Bantul, 27 Januari 2006	Slow Learner	Priyono	Buruh	Code, Trirenggo, Bantul
25	625	Olivia Dwi Lestari	3	P	Bantul, 9 Januari 2006	Slow Learner	Ismadi	Buruh	Priyan, Trirenggo, Bantul
26	650	Luthfi Musyafa	3	L	Bantul, 28 November 2005	Superior	Zahrowi	Karyawan Swasta	Nogosari, Trirenggo, Bantul
27	677	Nazara Diva Athameifarra	3	P	Bantul, 7 Mei 2006	Tuna Ganda	Mardiko Agustinus	Wiraswasta	Krandohan, Pendowoharjo, Sewon, Bantul
28	720	Dea Meidy Widyanindra	3	P	Bantul, 30 Mei 2006	Mental Defective	Candra Mawardi	PNS	Salam, Patalan, Jetis, Bantul
29	571	Rizki Anil Nugroho	4	L	Bantul, 21 Mei 2004	Disleksia Slow Learner	Eko Widayanto Nugroho	Buruh	Klembon, Trirenggo, Bantul
30	615	Aan Septiandri Nugroho	4	L	Bantul, 5 September 2005	Tuna Daksa D1 (CP)	Ahmad Zaini	Buruh	Pepe, Trirenggo, Bantul
31	630	Yanuar Falah Ardiansyah	4	L	Bantul, 8 Januari 2004	Autis Ringan	Agus Sunarya	PNS	Deresan, Ringinharjo, Bantul
32	617	Dhamar Hani Van	4	L	Bantul, 15 April 2005	Hyperaktif	Ali Kusmiran	-	Rendeng, Timbulharjo, Sewon Bantul
33	441	Rifki Sulistyawan	5	L	Bantul, 23 Juni 2003	Slow Learner	Suharjo	Buruh	Pasutan, Trirenggo, Bantul
34	592	Nada Salsabila	5	P	Bantul, 2 Maret 2005	Slow Learner	Anan Basoeki	Pedagang Kecil	Nogosari, Trirenggo, Bantul
35	286	Dewi Puryanti	6	P	Bantul, 27 November 2000	Mental Defective	Ismadi	Buruh	Priyan, Trirenggo, Bantul
36	364	Avreda tehan Nugroho	6	L	Bantul, 31 Agustus 2002	Below Average	Eko Widayanto Nugroho	Buruh	Klembon, Trirenggo, Bantul
37	367	Dhoni Ihsanudin	6	L	Bantul, 16 November 2002	Slow Learner	Ali Kusmiran	-	Rendeng, Timbulharjo, Sewon Bantul
38	385	Allya Kristi	6	P	Bantul, 6 April 2003	Slow Learner	Sutrisno	Buruh	Manding Trirenggo Bantul
39	401	Yosi Ruti Yosola	6	L	Bantul, 14 November 2002	Below Average	Miyos Mukharom	Buruh	Tanubayan, Trirenggo, Bantul
40	438	Muh Arif Dwi Kurnia	6	L	Bantul, 10 Januari 2002	Below Average	Moh Rokhim	Karyawan Swasta	Badegan, Bantul, Bantul

Bantul, Juli 2015
Kepala Sekolah

ISTIANI NURHASANAH, S.Pd
NIP. 19720310 199606 2 001

Lampiran 15: Surat Ijin Penelitian

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telpon (0274) 540611 pesawat 405, Fax (0274) 5406611
Laman: fip.uny.ac.id, E-mail: humas_fip@uny.ac.id

Nomor : 2488/UN34.11/PL/2016
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan izin Penelitian

21 April 2016

Yth. Kepala Bappeda Bantul
Jl. R. W. Monginsidi No. 1
Kecamatan Bantul,
Yogyakarta 55711

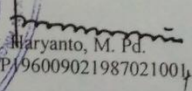
Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik yang ditetapkan oleh Jurusan Pendidikan Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, mahasiswa berikut ini diwajibkan melaksanakan penelitian:


Nama : Fahad Nisa Utami
NIM : 12108241088
Prodi/Jurusan : PGSD/PSD
Alamat : Kranggan, RT 02, Murtigading, Sanden, Bantul

Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami memintakan izin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Tujuan : Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi
Lokasi : SD Negeri 1 Tirenggo Bantul
Subyek : Kepala Sekolah, Guru Kelas IV A, Guru Pembimbing Khusus, Siswa Kelas IV A
Obyek : Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
Waktu : April-Juni 2016
Judul : Tingkat Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Kelas IV A SD Negeri 1 Tirenggo Bantul Yogyakarta

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Dekan,

NIP. 196009021987021001



Tembusan :
1. Rektor (sebagai laporan).
2. Wakil Dekan I FIP
3. Ketua Jurusan PSD FIP
4. Kabag TU
5. Kasubbag Pendidikan FIP
6. Mahasiswa yang bersangkutan
Universitas Negeri Yogyakarta



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 1865 / S1 / 2016

Menunjuk Surat

Dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Nomor 2488UN34 11/PL/2016
Universitas Negeri
Yogyakarta (UNY)

Mengingat

Tanggal 21 April 2016 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada

Nama

FAHAD NISA UTAMI

P. T / Alamat

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
Karangmalang, Yogyakarta

NIP/NIM/No. KTP

3402024801940002

Nomor Telp /HP

085640201956

Tema/Judul Kegiatan

TINGKAT KESIAPAN SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI
PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SD NEGERI 1
TIRENGGO BANTUL YOGYAKARTA

Lokasi

SD Negeri 1 Tlrenggo Bantul

Waktu

22 April 2016 s/d 22 Juli 2016

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
- Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
- Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
- Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
- Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
- Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di B a n t u l
Pada tanggal 22 April 2016


Kepala,
Kepala Bidang Data, Penelitian dan
Pengembangan, dan Kasubbid. DSP

Ir. Edi Purwanto, M.Eng
NIP. 19640401997031004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Bupati Kab. Bantul (sebagai laporan)
- Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
- Ka. UPT Pengelola Pendidikan Dasar Kecamatan Bambanglipura
- Ka. UPT Pengelola Pendidikan Dasar Kecamatan Bantul
- Ka. SD 1 Tlrenggo,
- Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
- Yang Bersangkutan (Pemohon)

Lampiran 16: Surat Keterangan Penelitian

 **DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL**
UPT PPD KECAMATAN BANTUL
SD 1 TRIRENGGO
Alamat : Klembon, Tlirenggo, Bantul Yogyakarta 55714. ☎(0274) 8363234 ✉sd1tlirenggo@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN
No : 047/SD 1 Trg/VI/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Istiani Nurhasanah, M.Pd
NIP : 19600812 198104 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Sekolah

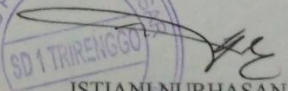
Dengan ini saya menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Fahad Nisa Utami
NIM : 12108241088
Jurusan/Prodi : Ilmu Pendidikan / PGSD
Universitas : Universitas Negeri Yogyakarta

Telah melakukan penelitian di SD 1 Tlirenggo tentang **“Tingkat Kesiapan Sekolah dalam Implementasi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Kelas IV B SD Negeri 1 Tlirenggo Bantul Yogyakarta”** pada tanggal 22 April s.d. 22 Mei 2016.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bantul, 21 Juni 2016
Kepala SD 1 Tlirenggo


ISTIANI NURHASANAH, M.Pd
NIP. 19720310 199606 2 001

